

**Penerbit & Pencetak**

Universitas Teknologi Yogyakarta  
Jalan Siliwangi, Ringroad Utara, Jombor, Mlati, Sleman,DIY  
Email: [publikasi@uty.ac.id](mailto:publikasi@uty.ac.id)  
Website: [www.uty.ac.id](http://www.uty.ac.id)

ISBN 978-623-7746-12-6



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mereproduksi isi buku ini baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk, cara dan atau alasan apapun juga tanpa izin tertulis dari pengarang



©2019

Diterbitkan Oleh:

Universitas Teknologi Yogyakarta Jl. Siliwangi,

Jombor, Sleman, Yogyakarta

Email: [publikasi@uty.ac.id](mailto:publikasi@uty.ac.id)

Website: [www.uty.ac.id](http://www.uty.ac.id)

BOOK CHAPTER : APLIKASI ILMU MANAJEMEN

Book Chapter :

# APLIKASI ILMU MANAJEMEN



PROGRAM DOKTOR – ILMU MANAJEMEN



PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

**Book Chapter:**

**APLIKASI ILMU MANAJEMEN**

**Oleh:**

**Nur Wening dkk**

**Program Doktor Ilmu Manajemen**

**UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

**2019**

**Book Chapter**  
**APLIKASI ILMU MANAJEMEN**

**Oleh:**

Nur Wening  
Sujoko  
Lustono  
Sotya Partiwidiwijoyo  
Endah Marendah Ratnaningtyas  
Saimin  
Budiono

**Desain Sampul**

Imam Mahdi,S.Kom.

Diterbitkan oleh:

Universitas Teknologi Yogyakarta  
Jl. Siliwangi, Jombor, Sleman, Yogyakarta  
Email: publikasi@uty.ac.id  
Website: <http://www.uty.ac.id>  
Aplikasi Ilmu Manajemen  
ISBN : 978-623-7746-126  
Oleh : Dr. Nur Wening dkk

-

Edisi I

Cetakan Pertama, Mei 2019  
Hak Cipta ©2019 pada penulis,

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa ijin dari penulis.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Book Chapter Hasil Penelitian Mahasiswa Doktoral Ilmu Manajemen 2019 ini dapat diselesaikan. Buku ini mengalami beberapa kali penyempurnaan diharapkan memberikan contoh dan petunjuk praktis agar mahasiswa yang lain mendapatkan gambaran secara jelas dalam membuat penelitian dan ringkasan publikasi hasil penelitian.

Terimakasih disampaikan kepada Prof. Zulhawati, MM. selaku Ketua Yayasan Dharma Bhakti Iptek beserta Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta, Dr. Bambang Moertono Setiawan, MM., Ak., CA., CPA. Terimakasih juga disampaikan kepada Dr. Erik Iman Heri Ujianto, M.Kom. atas kontribusi dalam penyempurnaan buku ini. Terimakasih kepada Dr. Sujoko, M.Si.; Sotya Partiwidiwijoyo; Lustono; Endah Marendah Ratnaningtyas; Saimin dan Budiono yang telah berkontribusi dengan mengirimkan hasil penelitian serta seluruh staf admisi Program Pascasarjana UTY dan pihak lain yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen khususnya dan bagi semua mahasiswa Program Pascasarjana yang membutuhkan.

Sleman, 20-02-2019

Penulis

Dr. Nur Wening, SE., M.Si.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Artikel Utama : Pengaruh Ketidak Amanan Kerja (Job Insecurity) Sebagai Dampak Restrukturisasi Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi Dan Intensi Keluar Survivor. Nur Wening .....	1
Artikel 1 : Pengaruh Struktur Kepemilikan, Strategi Diversifikasi, Leverage, Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai Perusahaan. Sujoko .....	16
Artikel 2 : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kunjungan Wisatawan yang Berdampak pada Pengembangan UMKM, Penciptaan Lapangan Kerja dan Penerimaan Daerah Endah Marendah .....	33
Artikel 3 : Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Lustono .....	56
Artikel 4 : Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu Sotya Partiwidiwijoyo .....	70
Artikel 5 : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi e-Commerce Dan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Saimin .....	85
Artikel 6 : Dampak Kecerdasan Emosi Terhadap Kualitas Pengambilan Keputusan Pemimpin Dan Efektivitas Sekolah Di Indonesia Budiono & Nur Wening .....	100
BIO-DATA PENULIS .....	107

**PENGARUH KETIDAK AMANAN KERJA (*JOB INSECURITY*) SEBAGAI DAMPAK  
RESTRUKTURISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI DAN INTENSI  
KELUAR *SURVIVOR*.**

Nur Wening  
Dosen Program Pascasarjana Universitas Teknologi Yogyakarta.

***Abstract***

*Restructuring is suspected to be influencing perception of job insecurity. The job insecurity will have a negative impact on job satisfaction, organization commitment, and even turnover intention. When insecurity is conceived within someone's perception, it will lower his or her job satisfaction and also commitment on the company. This research was conducted upon service (bank) and manufacturing companies which had run restructuring in the last four years. It involved 216 respondents with 78.2% of response rate. Simple regression and hierarchical regression analysis were used to analyze the data.*

*An interesting finding of this research is that restructuring conducted in bank and manufacturing companies has been found out to be having no influence on turnover intention. On the other hand, job insecurity perception does not influence job satisfaction, commitment, and turnover intention. In addition, this research came to a conclusion that organization commitment is a mediating variable between job satisfaction and turnover intention*

## 1. PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan bisnis yang terjadi harus diantisipasi perusahaan dengan melakukan adaptasi. Adaptasi dilakukan agar perusahaan tetap *survive* dan tumbuh. Salah satu adaptasi yang dapat dilakukan adalah restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan pembenahan atau perombakan mendasar seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan maksud tujuan menciptakan *competitive advantage*. Pembenahan yang dilakukan tidak hanya meliputi aspek bisnis namun juga aspek organisasi, aspek manajemen, aspek keuangan bahkan aspek hukum.

Restrukturisasi akan membawa dampak bagi perusahaan dalam melakukan perubahan secara cepat, namun berisiko. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengungkap bahwa perubahan yang dilakukan akan membawa dampak negatif baik bagi individu maupun organisasi (Band dan Tustin, 1999; Kinnunen *et al.*, 2000). Selain itu pelaksanaan restrukturisasi juga memunculkan persepsi *job insecurity* atau ketidakamanan dalam pekerjaan (Pasewark dan Strawser, 1996). Persepsi *job insecurity* memunculkan berbagai dampak negatif baik dalam aspek psikologis maupun aspek non psikologis. Di antara aspek psikologis yang muncul antara lain berupa penurunan kepuasan kerja, penurunan kreativitas, perasaan murung dan bersalah, kekhawatiran bahkan kemarahan (Band dan Tustin, 1999). Menurut Tremley *et al.* (1995) dalam Widiastuti (2003) restrukturisasi yang ekstensif dapat mendorong *career plateau* (kemandegan karir) lebih cepat muncul dalam tahapan karir, apalagi jika keadaan ini didukung oleh jenuhnyapasar kerja. Sehingga konsekuensi yang muncul adalah penurunan kepuasan kerja, kinerja maupun komitmen bahkan penurunan motivasi dan intensi *turnover* yang lebih besar. *Job insecurity* merupakan kondisi ketidakberdayaan untuk mempertahankan kesinambungan yang diinginkan dalam situasi kerja yang mengancam. Perasaan tidak aman akan membawa dampak pada *job attitudes* karyawan,

penurunan komitmen, bahkan keinginan untuk *turnover* yang semakin besar. Untuk mengurangi persepsi tersebut diperlukan sikap hati-hati dalam implementasi, dan diperlukan adanya komunikasi, bahkan dalam pelaksanaan restrukturisasi dilakukan yang secara bertahap (Johnson *et al.*, 1996 dalam Kinnunen *et al.*, 2000). Tujuan spesifik komunikasi adalah untuk mengubah perilaku, memperoleh tindakan, memberi informasi, memastikan dan mempengaruhi orang lain. Komunikasi akan efektif jika informasi yang diberikan cukup dan jelas. Peran manajemen sangat penting, untuk membuat keseimbangan dan mencegah persepsi ketidakamanan kerja karyawan.

Pelaksanaan restrukturisasi pada organisasi dimaksudkan untuk memperoleh efisiensi dalam organisasi dan meminimalkan *range* serta kompleksitas struktur organisasi, mendorong pelaksanaan delegasi atau pelimpahan wewenang, mendorong inisiasi dan inovasi, memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan adanya tekanan *shareholder* untuk menaikkan keuntungan (Downs, 1995; Uchitelle dan Kleinfeld, 1996 dalam Barling *et al.*, 1998). Pelaksanaan restrukturisasi yang tidak disertai komunikasi dan sosialisasi kepada karyawan, dapat memunculkan persepsi negatif karyawan terhadap pekerjaan. Di antara persepsi negatif yang muncul adalah berupa ketidakamanan pekerjaan (*job insecurity*) bahkan persepsi negatif terhadap organisasi. Masih terdapat kontroversi mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap intensi keluar secara langsung, meskipun ada dukungan beberapa penelitian sebelumnya (Mobley, 1977; Judge, 1993) tetapi menurut Shore dan Martin (1989) komitmen organisasional lebih berhubungan kuat dengan intensi keluar dibandingkan kepuasan kerja. Sedangkan menurut Shore dan Martin (1989) komitmen berpengaruh secara langsung terhadap intensi keluar, sedangkan kepuasan kerja berpengaruh terhadap intensi keluar melalui komitmen sebagai variabel pemediasi.

Persepsi ketidakamanan dalam pekerjaan (*job insecurity*) pada beberapa penelitian (Ashford *et al.*, 1989; Ameen *et al.*, 1995; Rosenblatt dan Ruvio, 1996) terbukti sebagai salah satu penyebab munculnya intensi (keinginan) keluar seseorang dari pekerjaan. Hasil penemuan ini ada kemungkinan juga berlaku dalam organisasi yang ada di Indonesia. Pertanyaan ini didasarkan pada pendapat Hulin *et al.* (1985); Karsten dan Spector (1987) dalam Robbins (2001), yang menyatakan kondisi pasar kerja, kecilnya harapan atas pasar kerja alternatif dan panjangnya masa kerja dalam organisasi merupakan kendala utama bagi seseorang untuk meninggalkan pekerjaan. Beberapa kondisi tersebut akan dapat berbeda pada situasi organisasi dan kultur yang berbeda. Faktor lain yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk keluar antara lain adalah usia, jenis kelamin (Rosenblatt *et al.*, 1999) atau pengalaman kerja.

Penelitian ini bertujuan membuktikan dampak restrukturisasi terhadap *job insecurity*, kepuasan kerja, komitmen dan intensi *turnover survivor*. Untuk mengendalikan efek terhadap variabel lain, dalam penelitian ini dimasukkan beberapa variabel kontrol yaitu jenis kelamin, usia dan masa kerja *survivor*. Alasan menggunakan variabel jenis kelamin sebagai variabel kontrol didasarkan pada temuan Rosenblatt *et al.* (1999) yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki perbedaan persepsi mengenai *job insecurity*.

## 2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Ruky (1999) secara umum restrukturisasi diartikan sebagai perombakan yang mendasar terhadap seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan menciptakan daya saing dan *value* perusahaan. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu bentuk perubahan yang bisa dilakukan perusahaan untuk

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam beberapa aspek, antara lain restrukturisasi bisnis, *legal*, organisasi, manajemen, dan juga keuangan (Rachmawati, 2003). Selain itu, restrukturisasi juga dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja. Restrukturisasi bisnis (*business restructuring*), merupakan penataan terhadap *value* secara keseluruhan dalam mata rantai bisnis, dengan tujuan menciptakan daya saing dan nilai perusahaan. Bentuk yang dapat dipilih antara lain: *merger* dan akuisisi, *regrouping*, *holding* dan konsolidasi, aliansi strategis, *joint operation/management*, likuidasi. Sementara Restrukturisasi keuangan (*financial restructuring*) dilakukan dalam rangka mendapatkan struktur pembelanjaan yang sehat melalui re-organisasi pembelanjaan serta rekapitalisasi. Bentuk restrukturisasi keuangan meliputi: *convert debt to equity*, *sell non core assets*, divestasi, *private placement*, *go public*.

Restrukturisasi organisasi dan manajemen, dilakukan pada perusahaan yang “*under performing*” dengan maksud untuk memperoleh suatu kepemimpinan yang baru yang lebih memiliki visi. Strategi yang dapat dipilih antara lain: *board of director* atau CEO, *corporate culture restructuring*, BPR (*business process reengineering*), *downsizing*, *delaying*. Sementara restrukturisasi hukum (*legal restructuring*), merupakan upaya memperbaiki kualitas status hukum badan usaha yang membatasi lingkup kegiatan perusahaan. Di antara strategi yang dapat digunakan antara lain: restrukturisasi badan hukum (*legal status*), restrukturisasi kepemilikan (*ownership restructuring*), *strategic partnering*, *deregulation legal*.

Sebenarnya tindakan restrukturisasi tidak harus dilakukan pada semua perusahaan yang “sakit”. Menurut Ruky (1999) ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kondisi perusahaan tertentu perlu melakukan restrukturisasi atau tidak. Beberapa kriteria

berikut menunjukkan perlu tidaknya perusahaan melakukan restrukturisasi: pertama, perusahaan terbukti memiliki kapasitas untuk didanai (*proven financing capacity*) dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding nilai likuidasinya; kedua, adanya komitmen dan kepemimpinan yang solid; dan ketiga, kondisi strategis usaha yang layak (*appropriate strategic condition*). Pelaksanaan restrukturisasi nampaknya menjadi semakin penting di Indonesia, mengingat banyak perusahaan yang seharusnya sudah dinyatakan bangkrut dalam masa krisis sejak 1998 sampai 2003.

Restrukturisasi yang dilakukan perusahaan bermuara pada perubahan kebijakan dan praktik serta struktur kapital perusahaan. Perubahan akan mempengaruhi anggota organisasi, sedangkan perubahan profil kapital akan menimbulkan perubahan pemegang kendali organisasi. Restrukturisasi pasti membawa dampak secara langsung pada pemilik, manajemen dan juga karyawan. Selain itu, juga akan membawa dampak pada *stakeholder* yang lain, misalnya *supplier*, konsumen, kreditor, pesaing, bahkan pada masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan implementasi restrukturisasi adalah unsur-unsur tersebut (pemilik, manajemen dan juga karyawan). Pelaksanaan dan implementasi restrukturisasi harus memperoleh dukungan serta komitmen mereka, atau paling tidak tingkat resistensi yang minimal dari karyawan.

Perubahan organisasional (*merger, downsizing, reorganisasi dan teknologi baru*) akan menjadi sumber ancaman bagi karyawan (Greenhalgh and Rosenblatt, 1984). Mereka akan mempersepsikan bahwa perubahan berdampak langsung terhadap eksistensinya di organisasi. Indikasi adanya pemutusan hubungan kerja sebagai konsekuensi logis perubahan menjadi penyebab persepsi *insecure* (Ashford *et al.*, 1989). Penelitian Noori (1990) menyatakan ada dampak psikologis positif akibat perubahan, yang

berupa perbaikan kinerja perusahaan. Sedangkan dampak negatifnya justru akan memperburuk kinerja karyawan yang pada akhirnya akan memperburuk kinerja perusahaan, misalnya penurunan produktivitas karyawan dan tingkat absensi yang tinggi (Kristanto, 2002).

Menurut Greenhalgh dan Rosenblatt (1984) *job insecurity* merujuk pada perasaan kehilangan kekuasaan (*powerless*) untuk menjaga kesinambungan yang diinginkan dalam situasi kerja yang terancam. Riset Greenglass *et al.* (2002) dengan sampel perawat rumah sakit menemukan dampak restrukturisasi secara langsung terhadap *job insecurity* dan berpengaruh negatif terhadap *job satisfaction*. Hubungan antara restrukturisasi dengan kenaikan *job insecurity* ditunjukkan juga dalam penelitian Campbell *et al.* (2001) yang membandingkan respon dari manajer di tiga organisasi yang berbeda. Masing-masing adalah organisasi yang mengalami restrukturisasi dan *downsizing* tahun sebelumnya; organisasi yang hanya mengalami restrukturisasi dan organisasi yang tidak mengalami restrukturisasi. Hasilnya adalah manajer dalam organisasi yang mengalami *downsize* akan mengalami penurunan *job security*, komitmen organisasional, dan moral yang lebih rendah (Greenglass *et al.*, 2002). Moral yang lebih rendah ditunjukkan dengan penurunan semangat kerja karyawan karena melihat rekan kerja yang keluar (sukarela ataupun keputusan organisasi).

Riset mengenai *outcomes job insecurity* yang difokuskan pada dampak psikologis yang negatif terhadap individual berupa munculnya perasaan cemas, depresi dan tegang (Ferrie *et al.*, 1998; Kuhnert, Sims dan Lahey, 1989 dalam Kinnunen *et al.*, 2000). Munculnya reaksi yang berupa sikap, intensi *turnover*, komitmen organisasi dan kepuasan kerja yang berkurang atas adanya persepsi *job insecurity* (Ashford *et al.*, 1989; Rosenblatt dan Ruvio, 1996).

Kepuasan kerja merupakan suatu

sikap yang dimiliki individu tentang pekerjaannya dengan didasarkan pada faktor lingkungannya (gaya penyalah, kebijakan organisasional, kondisi kerjadan tunjangan). *Satisfaction* pada *job* akan tergantung pada tingkat *outcomes intrinsic* dan *extrinsic* dan bagaimana *job holder* meninjau *outcomes* tersebut (Ivancevich dan Matteson, 2002). Hal ini akan berbeda untuk masing-masing orang, karena ada perbedaan kepentingan yang terletak pada *job outcomes*. Kepuasan kerja menggambarkan kegembiraan atau sikap emosi positif yang berasal dari pengalaman kerja seseorang (Judge dan Locke, 1993). Hal ini akan memberi dampak positif bagi individu dan organisasi. Tingkat kepuasan kerja dipengaruhi antara lain oleh *thinking process* yang dirasakan seseorang. Jika hal tersebut mengalami proses yang menyimpang (*dysfunctional*) maka membuat tingkat kepuasan kerja yang rendah dan sebaliknya jika *rethinking process* berada dalam kondisi baik dan jernih, maka akan menimbulkan tingkat kepuasan yang tinggi. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh pekerjaan, gaji, promosi, supervisi serta kelompok kerja dan kondisi kerja (Luthans, 1995). Persepsi terhadap kondisi kerja yang *insecure* akan muncul apabila dirasakan pekerjaannya terancam dan mengalami *powerless* untuk melakukan sesuatu hal. Apabila terjadi kondisi demikian maka muncul persepsi bahwa pekerjaannya *insecure* dan *uncertainty* terhadap dirinya. Kepuasan pekerjaan merupakan dambaan karyawan, meskipun dalam kadaryang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek yang sesuai dengan keinginan karyawan, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya, dan sebaliknya (Gibson *et al.*, 1995).

Hasil riset Price dan Mueller (1986) dalam Lum *et al.* (1998) menemukan ketidakpuasan atas pekerjaan berpengaruh secara tidak langsung terhadap *turnover* melalui komitmen organisasional, sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja

berpengaruh langsung pada komitmen organisasional. Individu yang puas akan cenderung memenuhi komitmen terhadap organisasi, dan menimbulkan loyalitas terhadap organisasi yang akhirnya akan menyebabkan karyawan memiliki rasa ketergantungan pada organisasi (Byard dan Rue, 1997).

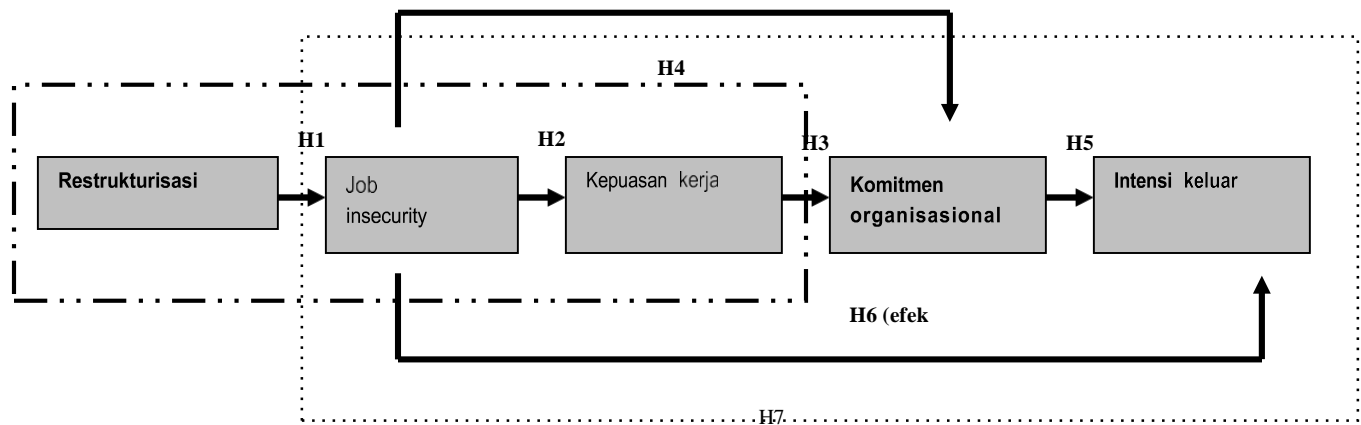
Komitmen organisasi merupakan identifikasi seseorang dan loyalitas pada organisasi (Russ dan McNeilly, 1995). Komitmen merupakan perpaduan antara sikap dan perilaku yang menyangkut rasa teridentifikasi dengan tujuan organisasi, rasa terlibat dengan tugas organisasi dan rasa setia pada organisasi (Meyer dan Allen, 1984). Seseorang yang memiliki komitmen tinggi akan berkurang keinginannya untuk keluar ataupun menerima pekerjaan yang lain (Shadicki *et al.*, 1999). Komitmen merupakan keyakinan seseorang akan *values* dan tujuan organisasi, rela menerima dan berusaha mencapai tujuan tersebut serta memiliki keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut (Meyer *et al.*, 1993). Perusahaan akan menjadi berkembang jika memiliki karyawan dengan komitmen tinggi terhadap perusahaan (Rifani, 1997 dalam Suarta, 2000). Dampak positif diperoleh perusahaan dengan adanya karyawan yang memiliki keinginan kuat untuk tetap bekerja pada perusahaan dan berusaha mencapai tujuan perusahaan.

Riset yang dilakukan Meyer *et al.* (1993) menyatakan peningkatan komitmen akan berhubungan dengan peningkatan produktivitas (Hackett *et al.*, 1994) dan *turnover* yang semakin rendah (Allen dan Meyer, 1990). Komitmen organisasional berhubungan secara signifikan dengan intensi *turnover* dari aktivitas dan jabatan dalam organisasi. Sedangkan riset Aranya dan Ferris (1984) menemukan bahwa komitmen organisasional memiliki hubungan signifikan yang negatif dengan keinginan untuk *turnover*, dengan menggunakan setting penelitian akuntan publik dan akuntan manajemen.

Seseorang yang memiliki komitmen tinggi pada organisasi (perusahaannya) maka kecil kemungkinan mencari alternatif pekerjaan lain (Gibson *et al.*,1995). Semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin rendah keinginan untuk berpindah.

Model yang dipakai untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian ditunjukkan

pada gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (hipotesis satu, dua, tiga, empat, lima dan tujuh). Selain itu juga ditunjukkan pengujian komitmen organisasi yang menjadi variabel pemediasi hubungan kepuasan kerja dengan intensi *turnover* (hipotesis enam).



Sumber: Ameen *et al.* (1995); Greenglass *et al.* (2002)

Gambar 1. Model Penelitian (Integrasi Dua Model)

Berdasarkan permasalahan yang ada maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini meliputi:

**Hipotesis 1:** restrukturisasi organisasi berpengaruh secara positif terhadap *job insecurity*.

**Hipotesis 2:** *job insecurity* berpengaruh secara negatif terhadap kepuasan kerja.

**Hipotesis 3:** kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap komitmen organisasional.

**Hipotesis 4:** *job insecurity* berpengaruh secara negatif terhadap komitmen organisasional.

**Hipotesis 5:** komitmen organisasional berpengaruh secara negatif terhadap intensi *turnover*.

**Hipotesis 6:** komitmen organisasi sebagai mediasi hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi *turnover*.

**Hipotesis 7:** *job insecurity* berpengaruh secara positif terhadap intensi *turnover*.

### 3. METODA PENELITIAN

#### 3.1. Pemilihan Sampel dan Metoda

##### Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bank dan pabrik pengolahan sebagai perusahaan yang sudah dan sedang melakukan restrukturisasi. Pemilihan perusahaan sebagai populasi penelitian didasarkan atas adanya bentuk pemutusan hubungan kerja atau pengurangan karyawan lainnya. Lokasi perusahaan berada di Jogjakarta, Jakarta dan Kalimantan Timur yang meliputi perusahaan jasa (diwakili oleh bank) dan manufaktur (diwakili dengan pabrik pengolahan). Pilihan ini didasarkan adanya sejumlah karyawan yang diPHK pada perusahaan tersebut sehubungan kegiatan restrukturisasi yang dilakukan.

Sampel penelitian adalah *survivor* perusahaan terpilih. *Survivor* adalah karyawan yang masih *survive* dan tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling* dengan melakukan pembatasan terhadap kriteria sampel. Adapun pembatasan yang dilakukan adalah pada masa kerja, usia dan

status karyawan (tetap dan tidak tetap). Jumlah keseluruhan sampel yang dijadikan kerangka penyampelan dalam penelitian ini minimal sebanyak 50 orang. Jumlah ini didasarkan pernyataan Sekaran (2000) bahwa minimal ukuran sampel adalah sejumlah variabel penelitian dikalikan beberapa kali (10 kali atau lebih). Jumlah variabel dalam penelitian ini 5 (lima) buah jika dikalikan 10 maka hasilnya adalah 50 *survivor*. Namun untuk menghindari kekurangan jumlah sampel karena beberapa sebab (misalnya tidak kembali atau kurang lengkap) maka dilakukan penyebaran sebanyak 250 kuesioner.

Pengukuran variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: pengukuran variabel *impact of restructuring* dikembangkan oleh Greenglass *et al.* (2002) dengan menggunakan skala pengukuran yang terdiri atas 7 item pertanyaan. Variabel *job insecurity* dilakukan pengukuran menggunakan skala multidimensi yang terdiri atas 5 dimensi (Ashford *et al.*, 1989). Kepuasan kerja diukur dengan JDS (*job diagnostic survey*) yang dikembangkan oleh Hackman dan Oldham (1975), meliputi 14 item pertanyaan untuk mengukur 5 kepuasan yang spesifik (*pay, job security, social, supervisory, growth satisfaction*). Komitmen organisasi diukur menggunakan OCS (Mowday *et al.*, 1979) yang terdiri atas 9 item pertanyaan. Intensitas *turnover* dilakukan pengukuran menggunakan 3 item pertanyaan yang dikembangkan Camman dkk dalam Lee (2000). Variabel kontrol yang dipakai meliputi: usia, masa kerja dan jenis kelamin.

#### 3.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) sedangkan pengujian reliabilitas digunakan *Cronbach's alpha* (Cooper dan Schindler, 2003). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dari semua variabel yang digunakan terbukti valid dalam mengukur konstruk. Hal ini didasarkan nilai *loading factor*. *Loading factor* 0,3 dianggap memenuhi level



minimal; nilai 0,4 dianggap lebih baik dan sesuai dengan rule of thumb yang dipakai para peneliti sedangkan *loading factor* 0,5 dianggap signifikan (Hair *et al.*, 1998).  
Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan

internal konsistensi reliabilitas dalam penelitian ini adalah baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai alpha yang lebih besar dari 0,60 (Sekaran, 1992). Hasil pengujian secara lengkap disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1.**

**Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas**

Variabel	Cronbach's Alpha (Reliabilitas)	Loading factor (Validitas)
Dampak restrukturisasi	0,85	0,49 – 0,67
<b>Job insecurity</b>		
✓ Sub skala <i>threat</i>	0,8	0,55-0,80
✓ Sub skala perceived powerlessness	0,6	0,30-0,39
<i>Kepuasan kerja</i>	0,90	0,48-0,70
<i>Komitmen organisasi</i>	0,90	0,46-0,77
<i>Intensi turnover</i>	0,85	0,42-0,53

Sumber: primer, diolah (2004)

**4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi dan HRA (analisis regresi hirarkikal). Berikut ini hasil pengujian

hipotesis satu, dua, tiga, empat, lima dan tujuh dengan analisis regresi.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel Independen		t	Sign.	R <sup>2</sup>	F
H1: Restrukturisasi berpengaruh positif terhadap <i>job insecurity</i>	-0,027	-0,351	0,726	0,001	0,123
H2: <i>Job insecurity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>kepuasan kerja</i>	0,047	0,601	0,549	0,002	0,361
H3: <i>Kepuasan kerja</i> berpengaruh positif terhadap <i>komitmen organisasional</i>	0,496***	7,353	0,000	0,246	54,070
H4: <i>Job Insecurity</i> berpengaruh negative terhadap <i>komitmen organisasional</i>	0,133	1,723	0,087	0,018	2,969
H5: <i>Komitmen Organisasi</i> berpengaruh negatif terhadap <i>intensi turnover</i>	-0,380***	-5,295	0,000	0,144	28,037
H7: <i>Job Insecurity</i> berpengaruh positif terhadap <i>intensi turnover</i>	-0,100	-1,297	0,196	0,010	1,684

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan untuk menguji hipotesis satu, dua, tiga, empat, lima dan tujuh (dalam tabel 2) menunjukkan bahwa **hipotesis satu** tidak didukung ( $\beta = -0,027$ ;  $t = -0,351$ ;  $p > 0,05$ ), artinya restrukturisasi secara signifikan dan negatif tidak berpengaruh terhadap *job insecurity*. Diduga ada perbedaan persepsi terhadap kondisi *secure* dan *insecure* akibat perubahan yang terjadi dalam perusahaan, sehingga karyawan memiliki persepsi yang berbeda terhadap salah satu akibat restrukturisasi yang dilakukan. Menurut Rosenblatt *et al.* (1999) persepsi *job insecurity* seseorang akan dipengaruhi antara lain oleh gender dan sektor perusahaan tersebut. Perempuan lebih merasakan *insecure* pada *job* dibandingkan laki-laki, baik pada sektor publik, domestik (bank) ataupun pabrik. Hal ini mendukung hasil uji hipotesis yang dilakukan, karena mayoritas responden adalah laki-laki (72,6%) sehingga diduga kurang begitu merasakan *insecure* terhadap pekerjaannya akibat restrukturisasi yang terjadi. Menurut Mooney (1984) dalam Suarta (2000) apabila karyawan tidak dapat mengantisipasi terjadinya perubahan pada baik pada faktor maupun pada aspek kerja, maka akan terjadi *job insecurity* yang ditandai dengan penurunan kinerja. Namun sebaliknya jika mereka mampu meningkatkan antisipasi terhadap *job insecurity*, maka justru akan meningkatkan kinerjanya. Antisipasi ini dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam penelitian ini antara lain melalui komunikasi, sosialisasi, dan memberikan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan restrukturisasi, sehingga tidak memunculkan kegelisahan karyawan (Ashford *et al.*, 1989; Johnson *et al.*, 1996 dalam Kinnunen *et al.*, 2000) dan mengantisipasi munculnya persepsi *job insecurity*, sehingga penelitian ini gagal mendukung mengkonfirmasi temuan Greenglass *et al.* (2002) dan gagal mendukung hipotesis satu.

Hasil pengujian yang dilakukan pada **hipotesis dua** menunjukkan bahwa *job insecurity* secara signifikan dan positif tidak

berpengaruh terhadap kepuasan kerja ( $\beta = 0,047$ ;  $t = 0,601$ ;  $p > 0,05$ ). Hasil ini didukung oleh hasil temuan Kinnunen *et al.* (2000) yang menunjukkan bahwa *job insecurity* secara signifikan dan positif tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Menurut Kinnunen *et al.* (2000) karyawan wanita pada bank dan pabrik pengolahan lebih merasakan *insecure* dalam pekerjaan dibandingkan laki-laki.

Pengujian **hipotesis tiga** menemukan kepuasan kerja secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap komitmen organisasi ( $\beta = 0,496$ ;  $t = -7,353$ ;  $p < 0,001$ ). Hasil ini sesuai dengan beberapa penemuan sebelumnya (Mathiew, 1988 dalam Suarta, 2000; William dan Hazer, 1986; Price dan Mueller, 1986; Rivai, 2001) yang menyatakan ada hubungan positif antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi. Seseorang yang terpuaskan akan cenderung memenuhi komitmen mereka terhadap organisasi dan akan memunculkan loyalitas pada organisasi (Byrddan Rue, 1997).

Penemuan sebelumnya (Ashford *et al.*, 1989; Ameen *et al.*, 1995; Pasewark dan Strawser, 1996; Rosenblatt dan Ruvio, 1996; Suarta, 2000) menyatakan bahwa *job insecurity* berpengaruh secara negatif terhadap komitmen organisasi, artinya semakin tinggi *insecure* yang dirasakan oleh seseorang maka membuat semakin kecil komitmen pada organisasinya. Namun temuan dalam pengujian **hipotesis empat** justru menunjukkan bahwa secara signifikan dan positif *job insecurity* tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi ( $\beta = 0,133$ ;  $t = 1,723$ ;  $p > 0,05$ ). Hasil ini diduga dipengaruhi oleh adanya perbedaan persepsi mengenai *job insecurity* pada karyawan. Temuan dalam penelitian ini didukung oleh penemuan Suwandi dan Indriantoro (1999) dalam Suarta (2000) dan Kinnunen *et al.* (2000) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara *job insecurity* dengan komitmen organisasi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian **hipotesis lima** ditemukan bahwa

komitmen organisasi secara signifikan dan negatif berpengaruh terhadap intensi *turnover* ( $\beta=-0,380; t=-5,295; p<0,001$ ), artinya semakin besar komitmen yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan akan membuat semakin rendah keinginan (intensi) *turnover*. Hasil ini konsisten dengan penemuan Ashford *et al.* (1989) dan Ameen *et al.*(1995), juga konsisten dengan kondisi yang terjadi di perusahaan dan secara umum, di Indonesia. Kecilnya intensi *turnover* karyawan di lingkungan perusahaan Indonesia disebabkan antara lain oleh penawaran tenaga kerja yang lebih besar dibanding dengan permintaannya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Hasil pengujian **hipotesis tujuh** menunjukkan

bahwa *job insecurity* secara signifikan dan negatif tidak berpengaruh terhadap intensi *turnover* ( $\beta=-0,100; t=-1,297; p>0,05$ ). Penemuan ini gagal mendukung hipotesis 7 dan gagal mengkonfirmasi hasil penemuan Ashford *et al.*(1989); Ameen *et al.*(1995); Suarta (2000) yang menyatakan bahwa semakin besar *job insecurity* yang dirasakan, maka semakin besar keinginan seseorang untuk *turnover*. Namun berhasil mendukung penemuan Pasewark dan Strawser (1996) yang menyatakan bahwa *job insecurity* bukan merupakan prediktor langsung terhadap keinginan berpindah. Pembahasan analisis regresi hirarkikal yang digunakan untuk menguji hipotesis enam disajikan pada tabel 3

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Hirarkikal (HRA)**

Variabel	Intensi $\beta$	Turnover t	t	R <sup>2</sup>
<b>Tahap 1</b>				
Jenis Kelamin	0,238*	2,974	0,072	0,000
Usia	0,020	0,207		
Masa Kerja	-0,108	-1,152		
<b>Tahap 2</b>				
Jenis Kelamin	0,185	2,210	0,094	0,022
Usia	0,054	0,553		
Masa Kerja	-0,155	-0,615		
Kepuasan Kerja	-0,163†	-0,1960		
<b>Tahap 3</b>				
Jenis Kelamin	0,135	1,651	0,171	0,077
Usia	0,055	0,587		
Masa Kerja	-0,118	-1,273		
Kepuasan kerja	-0,013	-0,143		
Komitmen Organisasi	-0,329***	-3,826		

Tingkat Signifikansi: †p<0,1 \* p<0,05 \*\* p<0,01 \*\*\*p<0,001

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian **hipotesis enam** berdasarkan analisis regresi hirarkikal yang terdiri atas 3 tahap menyatakan bahwa komitmen organisasi memberikan efek mediasi negatif pada hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi *turnover* dengan peningkatan varians sebesar 7%. Temuan ini sesuai dengan hasil yang diperoleh Price dan Mueller (1981); Shore dan Martin (1989) dalam Rivai (2001); Mueller dan Price (1990) dalam Lum *et al.* (1998). Secara lebih rinci hasil masing-masing tahap adalah: **tahap 1**, menunjukkan variabel kontrol usia dan masa kerja secara signifikan tidak berpengaruh terhadap intensi *turnover* sedangkan jenis kelamin secara signifikan berpengaruh terhadap intensi *turnover*. **Tahap 2**, pada saat ditambahkan variabel kepuasan kerja menunjukkan bahwa kepuasan kerja secara signifikan dan negatif berpengaruh terhadap intensi *turnover* ( $\beta = -0,163$ ;  $t = -1,960$ ;  $p < 0,1$ ). Sedangkan semua variabel kontrol secara signifikan tidak berpengaruh terhadap intensi keluar. Hasil pengujian pada **tahap 3** dengan menambahkan variabel komitmen organisasi, menunjukkan bahwa seluruh variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap intensi *turnover*. Kepuasan kerja secara signifikan dan negatif tidak berpengaruh terhadap intensi *turnover* ( $\beta = -0,013$ ;  $t = -0,143$ ;  $p > 0,1$ ) sedangkan komitmen organisasi secara signifikan dan negatif berpengaruh terhadap intensi *turnover* ( $\beta = -0,329$ ;  $t = -3,826$ ;  $p < 0,001$ ).

## 5. SIMPULAN

Komitmen organisasi memberikan efek mediasi negatif pada hubungan antara kepuasan kerja dengan intensi *turnover*, artinya pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan seseorang untuk *turnover* tidak secara langsung terjadi, namun melalui komitmen organisasi. Hasil ini konsisten dengan penemuan Porter (1974) dalam Rivai (2001), dan akan lebih memperkuat pernyataan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel pemediasi hubungan

antara kepuasan kerja dengan intensi *turnover*. Beberapa temuan dalam penelitian ini yang tidak sesuai dengan hasil penemuan sebelumnya, diduga adanya pengaruh karakter responden (jender, usia dan masa kerja) dan sektor perusahaan yang diteliti, sehingga tidak secara mudah dilakukan generalisasi terhadap hasil penelitian ini. *Job insecurity* adalah merupakan sebuah konstruk multidimensi, sehingga akan lebih baik jika pada penelitian selanjutnya lebih diperjelas. Hal ini untuk mengurangi perbedaan persepsi pada karyawan terhadap kondisi *secure* dan *insecure*.

Secara umum hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam mengelola karyawan terkait dengan perubahan yang dilakukan, untuk mengantisipasi dampak negatif yang muncul sebaiknya dilakukan komunikasi serta sosialisasi sebelumnya. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan kepada manajemen, bahwa untuk menurunkan intensi *turnover* dapat dilakukan dengan menaikkan kepuasan kerja mereka sehingga akan mampu menaikkan komitmen terhadap perusahaan.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: *Pertama*, perbedaan sektor perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini (jasa dan manufaktur), sehingga dimungkinkan akan mempengaruhi jawaban. Akan lebih baik apabila menggunakan sektor yang berbeda dilakukan pemisahan analisa data, sehingga hasilnya akan lebih bagus. *Ke dua*, adanya kesulitan mendapatkan responden penelitian dari perusahaan yang pernah atau sedang melakukan restrukturisasi, sehingga penelitian ini hanya menggunakan 3 perusahaan dengan 168 responden saja. Penelitian mendatang ada baiknya menggunakan responden yang lebih banyak. *Ke tiga*, penggunaan variabel *job insecurity* yang merupakan sebuah konstruk multidimensi, akan dapat memunculkan

perbedaan persepsi masing-masing responden. *Ke empat*, data yang diperoleh bersifat *self report*, sehingga dimungkinkan terjadi *common method bias* (Podsakoff *et al.*,

,2003), selain itu seluruh item pertanyaan diisi oleh responden yang sama dalam sebuah paket daftar pertanyaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen and Meyer, J. P., (1990), "The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization", *Journal of Occupational Psychology*, 63.
- Ameen, E. C., C. Jackson, W. R. Pasewark dan J. R. Strawser., (1995), "An Empirical Investigation of Antecedents and Consequences of Job Insecurity on The Turnover Intentions of Academic Accountants", *Issues in Accounting Education*, 10(1):65-82.
- Aranya, N. and Ferris, K. R., (1984), "A Reexamination of Accountants Organizational Professional Conflict", *Accounting Review*, 59 (1):1-15.
- Ashford, S., Lee, C. dan Bobko, P., (1989), "Content, Causes and Consequences of Job Insecurity: A Theory Based Measure and Substantive Test", *Academic of Management Journal*, 32:803-829.
- Band, D.C., dan Tustin, C. M., (1995), "Strategic Downsizing", *Management Decision*, 33 (8):36-41.
- Cooper, D. R. dan Schindler, P. S., (2000), *Business Research Methods*, 7<sup>th</sup> edition, McGraw Hill:Irwin.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., dan Donnelly, Jr., J. H., (1995), *Organizations*, 8<sup>th</sup> Edition, Irwin.
- Greenglass, E. R., Burke, R. dan Fiksenbaum, L., (2002), "Impact of Restructuring, Job Insecurity and Job Satisfaction in Hospital Nurses", *Stress News*, January, 14(1):1-7.
- Greenhalgh, L. dan Rosenblatt, Z., (1984), "Job Insecurity: Towards Conceptual Clarity", *Academic of Management Review*, 9:438-448.
- Hackett, Schlager dan Walker, (1994), "The Role of Communication in Resolving Commons Dilemmas: Experimental Evidence With Heterogenous Appropriators", *Journal and Environmental Economics and Management*, 27: 99-126.
- Hackman, J.R. dan Oldham, G. R., (1975), "Development of The Job Diagnostic Survey", *Journal of Applied Psychology*, 60:159-170.
- Hair, J.F. Jr., Anderson, R. E., Tatham, R.L., dan Black, W. C., (1998), *Multivariate Data Analysis*, 5<sup>th</sup> edition, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Ivancevich, J. M. dan Matteson, M.T., (2002), *Organizational Behavior and Management*, 6<sup>th</sup> Edition, International Edition, McGraw Hill: New York.

- Johnson, J. R., Bernhagen, M. J., Miller, V dan Allen, M., (1996), "The Role of Communication in Managing Reductions in Work Force", *Journal of Applied Communication Research*, 24:139-164.
- Judge, T.A. dan Locke, E.A., (1993), "Effect of Dysfunctional Thought Process on Subjective WellBeing and Job Satisfaction", *Journal of Applied Psychology*, 78:475-490.
- Kinnunen, U., Mauno, S., Natti, J. dan Happonen, M., (2000), "Organizational Antecedents and Outcomes of Job Insecurity: S Longitudinal Study in Three Organizations in Finland", *Journal of Organizational Behavior*, 21:443-459.
- Kristanto, H., (2002), "Mempersiapkan Anggota Perusahaan Menghadapi Perubahan", *Kajian Bisnis*, No.27, September-Desember.
- Lum, L., Kervin, J., Clark, K., Reidh, F. dan Sirola, W., (1998), "Explaining Nursing Turnover Intent: Job Satisfaction, Pay Satisfaction or Organizational Commitment?", *Journal of Organizational Behavior*, 19:305-320.
- Luthans, F. 1995, *Organizational behavior*, 7<sup>th</sup> Edition, NY" McGraw Hill, Inc.
- Meyer dan Allen, (1984), "Testing The Side Get Theory of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations", *Journal of Applied Psychology*, 69:372-378.
- Meyer, J. P., Allen, N. J. and Smith, C. A., (1993), "Commitment to Organization and Occupation: Extention and Test of Three Component Conceptualization", *Journal of Applied Psychology*, 78(4): 538-551.
- Mooney, M., (1984), "Let's Use Job Security as A Productivity Builder", *Personnel Administrator*, January, 38.
- Nabiu, M., Budiayati, Hastuti, Munawar, Akhmadi, Wibowo, Soelaksono dan Kusumastuti Rahayu, (2000), "Krisis Ekonomi dan Tenaga Kerja ter-PHK Lulusan Universitas/Akademi: Adaptasi Terhadap Realitas Pasar Kerja Baru", *Laporan khusus Social Monitoring and Early Response Unit*, June:1-43.
- Noori, H., (1990), *Managing the Dynamics of New Technologies*, NY: Prentice Hall, Inc.
- Nunnally, J. C., (1978), *Psychometric theory*, 2<sup>nd</sup> Edition, NY: McGraw Hill Book Company
- Pasewark, W.R, dan Strawser, J., (1996), "The Determinants and Outcomes Associated with Job Insecurity in a Professional Accounting Environment", *Behavioral Research in Accounting*, 8:91-113.
- Podsakoff, P.M., McKenzie S.B., Lee J., dan Podsakoff N. P., (2003), "Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of The Literature and Recommended Remedies", *Journal of Applied Psychology*, 88: 879- 903.
- Rachmawati, E. N., (2003), "Restrukturisasi Perusahaan: Mengapa Diperlukan?", *Jurnal Kompetensi*,

1(3) September – Desember:222-235.

Rivai, H.A.2001, Pengaruh Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional terhadap Intensi

Keluar: Pengujian Empiris Model Turnover Lum *et al.*, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(1) April:335-352.

Rosenblatt, Z., dan Ruvio, A., (1996), “A Test of Multidimensional Model of Job Insecurity: The Case of Israeli Teachers”, *Journal of Organizational Behavior*, 17:587-605.

Ruky, S. M., (1999), Restrukturisasi dan Rekapitulasi perusahaan, *Usahawan*,No.12, Th XXVIII, Desember:30- 39.

Russ dan McNeilly., (1995), “Links Among Satisfaction, Commitment and Turnover Intentions: The Moderating Effect of Experience, Gender and Performance”, *Journal of Business Research*, 34:57-65.

Santosa, S. dan Tjiptono, F., (2001), *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, Jakarta: PT Elex Media Computindo, Gramedia.

Sekaran, U.,(2000), *Research Methods for Business: a Skill-Building Approach*, 3<sup>rd</sup> edition, John Willey and Sons, Inc.

Shadicki, D.P., Folder, R dan Tesluk, P., (1999), “Personality as Moderator in The Relationship Between Fairness and Retaliation”, *Academy of Management Journal*, 100-108.

Shore, L.M. dan H. J., Martin (1989), ”Job Satisfaction and Organizational Commitment in Relation to Work Performance and Turnover Intention”, *Human Relations*,42: 625-638

Suarta, I. W., (2000), “Antecedents dan Outcomes Job Insecurity”, *Tesis MSi UGM*, Tidak dipublikasikan.

Widiastuti, I., (2003), “Wanita Saat Ini, Antara Karier dan Keluarga”, *Jurnal Kompetensi*, 1(2), Mei:83-92.

Williams, L. J., and Hazer, J.T., (1986), “Antecedents and Consequences of Satisfaction & Commitment in Turnover models: a Re-analysis Using Latent Variable Structural Equation Methods”, *Journal of Applied Psychology*, 71:219-231.



PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, STRATEGI DIVERSIFIKASI, LEVERAGE, FAKTOR INTERN DAN FAKTOR EKSTERN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Sujoko

Dosen Program Pascasarjana Universitas Teknologi Yogyakarta

**ABSTRACT**

*The main objective of the study is to examine the impact of ownership structure, diversification strategy, leverage, external factor, internal factor on the value of the firms. It is argued that unlike the agency problem of advanced stock market, the agency problem in the Jakarta Stock Exchange is the divergence of interest between the minority holders and majority holders. The hypotheses are: (1) there are the impact of ownership structure, external factor, and internal factor on diversification strategy, (2) there are the impact of ownership structure, external factor, internal factor, and diversification strategy on leverage, (3) there are the impact of ownership structure, external factor, internal factor, leverage, diversification strategy on value of the firm. This study is to examine Agency Theory, Jensen and Meckling (1976), Pecking Order Theory, Myers (1984), Trade Off Model and Signaling Theory (1979). Population in this study are public company listed in Jakarta Stock Exchange during 2000 – 2004. As many as 134 firms listed in Jakarta Stock Exchange were taken as a sample using a purposive sampling method. The data were then analyzed by the structural equation modeling ( SEM) analysis, using the AMOS Program version 4.01.*

*The results of this study show that (1) there are the impact of ownership structure, external factor, internal factor on diversification strategy, (2) there are the impact of ownership structure, diversification, external factor, internal factor on leverage, (3) there are the impact of ownership structure, external factor, internal factor, leverage, diversification on value of the firm. The result does not support the Agency Theory, from Jensen and Meckling (1976), but supports Pecking Order Theory from Myers (1984), Trade off model and Signaling Theory from Battacharya (1979). The result of the study is hoped to contribute theoretically and practically. Theoretical contribution is bounded to examine the Agency Theory from Jensen and Meckling (1976), Pecking Order Theory from Myers (1984), Trade off model and Signaling Theory from Battacharya (1979). The study indicate that practice public company in Indonesia is not concern with Agency Theory from Jensen and Meckling (1976), Trade Off Model and Signaling Theory from Battacharya, (1979) are concerned with the practice public company in Indonesia.*

**Key word:** *Diversification Strategy, Merger & Acquisition, Tobins'Q, Leverage.*

## PENDAHULUAN

Jensen dan Meckling (1976) berargumentasi bahwa konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Konflik keagenan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Penurunan nilai perusahaan akan mempengaruhi kekayaan dari pemegang saham sehingga pemegang saham akan melakukan tindakan pengawasan terhadap perilaku manajemen. Studi empiris yang meneliti strategi diversifikasi terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang bertentangan. Rumelt (1974) menemukan bukti bahwa *related diversification* mempunyai kinerja lebih baik dibanding *unrelated diversification*. Michael dan Shaked (1984) menemukan bukti bahwa *unrelated diversification* mempunyai kinerja lebih baik dari pada *related*. Lang dan Stulz (1974) menemukan bukti bahwa perusahaan terdiversifikasi secara negatif berhubungan dengan *tobin's q*, sebagai pengukur kinerja pasar. Servaes (1986) menemukan bukti bahwa perusahaan terdiversifikasi dijual secara diskon yang substansial dibanding segmen tunggal. Strategi diversifikasi akan berpengaruh terhadap pendanaan perusahaan sehingga akan berpengaruh kepada penentuan struktur modal perusahaan (Wibowo dan Erkaningrum, 2002). Diskusi dan perdebatan tentang hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan sampai saat ini masih berlangsung (Wibowo dan Erkaningrum, 2002). Secara singkat ada dua pandangan yang terus diperdebatkan oleh ahli-ahli

keuangan di dunia. Pandangan pertama dikenal dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Pandangan tradisional diwakili oleh dua teori yaitu *Trade off Theory* dan *Pecking Order Theory* (Wibowo dan Erkaningrum, 2002). Pandangan kedua dikemukakan oleh Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Walaupun diskusi tentang kedua pandangan tersebut terus berlangsung di kalangan akademisi, dalam praktek para manajer keuangan perusahaan lebih menerima pandangan tradisional untuk diterapkan dalam praktek bisnis mereka.

Struktur modal perusahaan diprediksi juga dipengaruhi oleh faktor ekstern dan faktor intern perusahaan. Variabel faktor ekstern dan faktor intern telah digunakan oleh Domian (1996) dan Mukerjee (1997) untuk mengukur pengaruhnya terhadap *stock return*. Sudarma (2003) juga menemukan bukti bahwa faktor ekstern dan faktor intern berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh konflik keagenan. Kinerja digunakan sebagai proksi besaran konflik keagenan yang bisa menyebabkan penurunan kekayaan pemegang saham. Struktur kepemilikan menjadi penting dalam teori keagenan karena sebagian besar argumentasi konflik keagenan disebabkan oleh adanya

pemisahan kepemilikan dan pengelolaan. Konflik keagenan tidak terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan seratus persen oleh manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Struktur kepemilikan saham diprediksi berpengaruh dalam penentuan struktur modal. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan cenderung akan mengurangi utang. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, maka akan terjadi pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Manajemen akan semakin berhati-hati dalam melakukan peminjaman, sebab jumlah utang yang terlalu tinggi akan menimbulkan risiko *financial distress* sehingga nilai perusahaan akan menurun. Jumlah utang yang melewati titik optimalnya akan membuat penghematan pajak dari penggunaan utang lebih rendah dari pada nilai sekarang dari *financial distress* dan *agency cost* (*model trade off*). Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan juga diprediksi akan meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi akan membuat pengawasan yang dilakukan pemilik terhadap manajemen akan semakin efektif sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu ingin meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusi dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan (Shleifer dan Vishny, 1986). Shleifer dan Vishny berargumentasi bahwa perusahaan akan diawasi dengan baik oleh pihak institusi

tersebut. Institusi memiliki para profesional dibidang investasi yang mengetahui bagaimana menilai suatu perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap manajemen.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: apakah ada pengaruh struktur pemilikan, strategi diversifikasi, leverage, faktor intern dan faktor ekstern terhadap nilai perusahaan.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kerangka Konseptual dan Model Hipotesis**

Diversifikasi usaha yang banyak dilakukan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun dalam prakteknya, strategi diversifikasi usaha yang dilakukan perusahaan tidak selalu dapat meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham mempengaruhi strategi diversifikasi, namun penelitian lain justru menemukan sebaliknya, bahwa struktur kepemilikan saham tidak mempengaruhi strategi diversifikasi (Lane dkk., 1998, 1999). Penelitian empiris yang menemukan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi strategi diversifikasi salah satunya adalah Denis dkk. (1997).

Denis dkk. (1997) secara empiris menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara perusahaan yang terdiversifikasi dengan kepemilikan orang dalam perusahaan dan secara negatif berhubungan dengan Kepemilikan mayoritas. Hubungan negatif ini dijelaskan oleh teori keagenan yaitu terdapatnya konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik. Teori keagenan memprediksi jika manajer memperoleh keuntungan pribadi yang melebihi biaya, maka manajer akan melakukan strategi diversifikasi meskipun akan mengurangi kemakmuran pemilik. Kepemilikan orang dalam akan menjadikan kepentingan manajer sejalan dengan kepentingan pemilik, sehingga kepemilikan orang dalam akan berhubungan negatif dengan strategi diversifikasi.

Penelitian lain yang mendukung struktur kepemilikan mempengaruhi strategi diversifikasi adalah Amihud dan Lev (1981). Amihud dan Lev (1981) menemukan bahwa struktur kepemilikan saham mempengaruhi *merger* konglomerasi. Strategi diversifikasi yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi pendanaan yang dilakukan perusahaan. Dalam hal pembiayaan, secara teoritis perusahaan dihadapkan oleh

berbagai macam pertimbangan. Salah satu teori yang mendasari keputusan pendanaan perusahaan adalah *pecking order theory*, Myers (1984) yang mengemukakan adanya kecenderungan perusahaan untuk menentukan pemilihan sumber pendanaan atas dasar hirarki fisiko (*pecking order theory*). Baskin (1989) mengemukakan bahwa dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa *pecking order theory* yang diusulkan oleh Donaldson (1961) nampak bisa menggambarkan tentang praktek perusahaan. Myers (1984) berpendapat bahwa keputusan pendanaan berdasarkan *pecking order theory* yang dikemukakan Donaldson pada tahun 1961 mengikuti urutan pendanaan sebagai berikut: (1) perusahaan lebih menyukai pendanaan dari sumber internal, (2) perusahaan menyesuaikan target pembayaran deviden terhadap peluang investasi, (3) kebijakan deviden bersifat *sticky*, fluktuasi profitabilitas dan peluang investasi berdampak pada aliran kas internal bisa lebih besar atau lebih kecil dari pengeluaran investasi (4) bila dana eksternal dibutuhkan, perusahaan akan memilih sumber dana dari hutang karena dipandang lebih aman dari penerbitan ekuitas baru sebagai pilihan terakhir sebagai sumber untuk memenuhi

kebutuhan investasi. Permasalahan tersebut akan diatasi oleh perusahaan dengan menggunakan sekuritas yang tidak dinilai rendah oleh pasar. Dengan demikian, perusahaan akan lebih memilih mendanai investasinya berdasarkan suatu urutan resiko. Bayless dan Diltz (1994) mengemukakan bahwa *pecking order* cenderung akan memilih *internal fund*, *riskless debt*, *risky debt* dan *equity*. Myers dan Majluf (1984), dan Myers (1984) mengacu terhadap masalah ini sebagai hipotesis *pecking order* yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mempergunakan *internal equity* terlebih dahulu, dan apabila memerlukan *external finance*, maka perusahaan akan mengeluarkan *debt* sebelum menggunakan *external equity*. Struktur kepemilikan secara teoritis mempunyai hubungan dengan *leverage*. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham maka pengawasan yang dilakukan pemilik terhadap manajemen akan semakin efektif. Manajemen akan semakin berhati-hati dalam memperoleh pinjaman, sebab jumlah utang yang semakin meningkat akan menimbulkan *financial distress*. Terjadinya *financial distress* akan mengakibatkan nilai perusahaan akan mengalami penurunan sehingga mengurangi

kemakmuran pemilik.

Dari uraian diatas hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

- H1 = *Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap strategi diversifikasi*
- H2 = *Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap strategi diversifikasi*
- H3 = *Suku bunga berpengaruh negatif terhadap strategi diversifikasi*
- H4 = *Keadaan pasar modal berpengaruh positif terhadap strategi diversifikasi*
- H5 = *Pertumbuhan pasar berpengaruh positif terhadap strategi diversifikasi*
- H6 = *Profitabilitas berpengaruh positif terhadap strategi diversifikasi*
- H7 = *Pembayaran dividen berpengaruh negatif terhadap strategi diversifikasi*
- H8 = *Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap strategi diversifikasi*
- H9 = *Pangsa pasar relatif berpengaruh positif terhadap strategi diversifikasi*
- H10 = *Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap leverage*
- H11 = *Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap leverage*
- H12 = *Suku bunga berpengaruh negatif terhadap leverage*
- H13 = *Keadaan pasar modal berpengaruh negatif terhadap leverage*
- H14 = *Pertumbuhan pasar berpengaruh positif terhadap leverage*

- H15 = Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap leverage
- H16 = Pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap leverage
- H17 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap leverage
- H18 = Pangsa pasar relatif berpengaruh positif terhadap leverage
- H19 = Strategi diversifikasi berpengaruh positif terhadap leverage
- H20 = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H21 = Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H22 = Suhu bunga berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan
- H23 = Keadaan pasar modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H24 = Pertumbuhan pasar berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H25 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H26 = Pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H27 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H28 = Pangsa pasar relatif berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H29 = Strategi diversifikasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
- H30 = Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang *listed* di BEJ. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu sampel yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan tercatat di BEJ tahun 2000-tahun 2004.
2. Data laporan keuangan tersedia berturut-turut untuk laporan tahun 2000 – tahun 2004. Kriteria ini diperlukan untuk memperoleh data informasi segmen bisnis, yang dipergunakan untuk menghitung *herfindahl index* sebagai ukuran diversifikasi perusahaan.
3. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

### Variabel Penelitian Variabel Endogen

1. Leverage (Struktur Modal)  
Struktur modal adalah perbandingan nilai hutang dengan nilai modal sendiri yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan akhir tahun. Variabel ini dinyatakan dalam rasio total hutang dengan penjumlahan total hutang dan modal sendiri pada neraca akhir tahun. Pengukuran ini mengacu dari penelitian Friend dan Lang (1988), Homaifar (1994), dan Sudarma (2003).

## 2. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumberdaya pada tahun  $t$  yang tercermin pada harga saham tahun  $t+1$ . Pengukuran variabel nilai perusahaan adalah rasio kenaikan/penurunan harga saham tahun  $t+1$  dengan nilai buku per saham pada neraca akhir tahun  $t$ . Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran yang digunakan dalam penelitian Miller (1961) dan Husnan (1994), dan Sudarma (2003).

## 3. Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi merupakan strategi pertumbuhan perusahaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis yang bersaing dalam beberapa industri dan pasar produk dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Sulastri (2003).

### Variabel Eksogen

1. Struktur Kepemilikan saham  
Struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan.

2. Kepemilikan institusional  
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur

dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Pengukuran ini mengacu dari penelitian Sudarma (2003), Mohammad *et al.* (1988), Friend dan Hasbrouk (1988).

### a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham terbesar oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki manajemen. Pengukuran ini mengacu dari Keasey (1994), Mohammad *et al.* (1998) dan Sudarma (2003).

### b. Tingkat sukubunga

Pengertian operasional variabel tingkat suku bunga adalah tingkat bunga kredit investasi dan tingkat bunga kredit modal kerja bank umum pemerintah rata-rata per tahun yang dibebankan kepada perusahaan atas penggunaan dana modal kerja dalam bentuk hutang jangka pendek dan dana investasi dalam bentuk hutang jangka panjang pada akhir tahun.

### c. Keadaan pasar modal

Keadaan pasar modal merupakan besarnya nilai transaksi perdagangan di BEJ pada akhir tahun sebagai cermin perkembangan BEJ. Variabel keadaan pasar modal diukur dengan  $\ln$  dari nilai perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta pada akhir tahun. Semakin besar nilai transaksi perdagangan saham di pasar modal mencerminkan semakin berkembangnya pasar modal tersebut. Pengukuran ini didasarkan penelitian Sudarma (2003).

#### d. Pertumbuhan Pasar

Pertumbuhan pasar adalah persepsi tentang peluang bisnis yang tersedia di pasar yang harus direbut oleh perusahaan. Pertumbuhan pasar yang tinggi juga menunjukkan daya tarik industri suatu unit bisnis strategik semakin tinggi sehingga menarik perusahaan untuk melakukan kebijakan diversifikasi usaha. Pertumbuhan pasar ini diukur dari nilai rasio selisih volume penjualan industri pada tahun  $t$  dengan volume penjualan industri pada tahun  $t-1$  dibagi dengan volume penjualan industri pada tahun  $t-1$ . Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Sulastri (2003).

#### e. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama satu tahun yang dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun. Semakin efisien suatu perusahaan maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha. Pengukuran ini sesuai dengan penelitian Titman (1988), Jensen et al. (1992) dan Moh'd (1998) dan Sudarma (2003).

#### f. Pembayaran dividen

Pembayaran dividen merupakan besarnya laba yang dibagikan kepada pemegang saham pada akhir tahun yang juga akan mencerminkan besarnya laba yang akan ditanamkan

pada laba ditahan akhir tahun. Variabel ini dinyatakan dalam rasio dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham akhir tahun. Pengukuran variabel pembayaran dividen sesuai dengan pengukuran variabel pembayaran dividen pada penelitian Howard dan Brown (1992), Moh'd (1998) dan Sudarma (2003).

#### g. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun, yang diukur dengan  $\ln$  dari total aktiva. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran variabel ukuran perusahaan yang digunakan Friend and Lang (1988) dan Homaifar (1994), dan Sudarma (2003).

#### h. Pangsa pasar relatif

Pangsa pasar relatif adalah persepsi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan pesaing utamanya di pasar. Pangsa pasar relatif menunjukkan besarnya pangsa pasar yang dikuasai perusahaan dibanding pesaing utamanya. Semakin besar pangsa pasar relatif berarti semakin kuat daya saing perusahaan dibanding pesaing utamanya. Pangsa pasar relatif ini diukur dari volume penjualan perusahaan tahun  $n$  dibagi dengan volume penjualan pesaing utama tahun  $n$ .



## Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: laporan keuangan, harga saham akhir bulan, data penjualan per segmen masing-masing perusahaan dan klasifikasi industri Indonesia (KLUI) untuk menghitung Herfindahl Indeks.

**Tabel 1**  
**Hasil Pengujian**  
**Hipotesis**

	Variabel independ	Variabel dependen	Koefisien path (p-value)	Keputusan
H1	Struktur kepemilikan Saham	Strategi diversifikasi	0,402 (0,013)	Signifikan
H1A	Kepemilikan institusional	Strategi diversifikasi	0,128 (0,038)	Signifikan
H1B	Kepemilikan manajerial	Strategi diversifikasi	0,021 (0,716)	Tidak Signifikan
H2	Faktor ekstern	Strategi diversifikasi	0,186 (0,017)	Signifikan
H2A	Suku bunga	Strategi diversifikasi	-0,398 (0,025)	Signifikan
H2B	Keadaan pasar modal	Strategi diversifikasi	0,104 (0,013)	Signifikan
H2C	Pertumbuhan pasar	Strategi diversifikasi	0,188 (0,006)	Signifikan
H3	Faktor intern	Strategi diversifikasi	0,034 (0,048)	Signifikan
H3A	Profitabilitas	Strategi diversifikasi	0,092 (0,000)	Signifikan
H3B	Dividen	Strategi diversifikasi	-0,013 (0,556)	Tidak Signifikan
H3C	Ukuran perusahaan.	Strategi diversifikasi	0,135 (0,001)	Signifikan
H3D	Pangsa pasar relatif	Strategi diversifikasi	0,155 (0,098)	Signifikan
H4	Struktur kepemilikan saham	Leverage	-0,177 (0,042)	Signifikan
H4A	Kepemilikan institusional	Leverage	-0,107 (0,008)	Signifikan
H4B	Kepemilikan manajerial	Leverage	0,011 (0,309)	Tidak Signifikan

## HASIL PENELITIAN

Hasil analisis SEM menggunakan AMOS 4,01 disajikan pada lampiran. Hasil uji terhadap koefisien perusahaan pada setiap jalur model struktural dapat dilihat pada tabel1.

H5	Faktor ekstern	Leverage	0,108 (0,004)	Signifikan
H5A	Suku bunga	Leverage	-0,401 (0,000)	Signifikan
H5B	Keadaan pasar modal	Leverage	0,261 (0,610)	Tidak Signifikan
H5C	Pertumbuhan pasar	Leverage	0,380 (0,010)	Signifikan
H6	Faktor intern	Leverage	0,186 (0,000)	Signifikan
H6A	Profitabilitas	Leverage	-0,201 (0,004)	Signifikan
H6B	Dividen	Leverage	0,047 (0,001)	Signifikan
H6C	Ukuran perusahaan.	Leverage	0,051 (0,041)	Signifikan
H6D	Pangsa pasar relatif	Leverage	0,062 (0,504)	Tidak Signifikan
H7	Strategi Diversifikasi	Leverage	0,108 (0,000)	Signifikan
H8	Struktur kepemilikan saham	Nilai Perusahaan	-0,084 (0,038)	Signifikan
H8A	Kepemilikan institusional	Nilai Perusahaan	-0,106 (0,014)	Signifikan
H8B	Kepemilikan manajerial	Nilai Perusahaan	0,047 (0,677)	Tidak Signifikan
H9	Faktor ekstern	Nilai Perusahaan	0,702 (0,022)	Signifikan
H9A	Suku bunga	Nilai Perusahaan	-0,098 (0,001)	Signifikan
H9B	Keadaan pasar modal	Nilai Perusahaan	0,252 (0,005)	Tidak Signifikan
H9C	Pertumbuhan pasar	Nilai Perusahaan	0,156 (0,007)	Signifikan

H <sub>10</sub>	Faktor intern	Nilai Perusahaan	0,134 (0,004)	Signifikan
H <sub>10A</sub>	Profitabilitas	Nilai Perusahaan	0,205 (0,000)	Signifikan
H <sub>10B</sub>	Dividen	Nilai Perusahaan	0,048 (0,008)	Signifikan
H <sub>10C</sub>	Ukuran perusahaan.	Nilai Perusahaan	0,012 (0,002)	Signifikan

## PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian, kerangka teoritis dan data empiris maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Strategi Diversifikasi

Variabel kepemilikan saham institusional mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan dalam penelitian ini tidak mendukung *agency theory*, Jensen dan Meckling (1976). Berdasarkan teori keagenan, diprediksi terjadi pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belum terjadi pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan. Peranan pendiri perusahaan masih sangat dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

### 2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Strategi Diversifikasi

Variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan penelitian ini tidak mendukung *agency theory*, Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa terjadi pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan dengan fungsi

H <sub>10D</sub>	Pangsa pasar relatif	Nilai Perusahaan	0,155 (0,001)	Signifikan
H <sub>11</sub>	Strategi Diversifikasi	Nilai Perusahaan	-0,138 (0,007)	Signifikan
H <sub>12</sub>	Leverage	Nilai Perusahaan	-0,391 (0,000)	Signifikan

Sumber : Hasil Analisis

Pengaruh Variabel Pertumbuhan Pasar Terhadap Strategi Diversifikasi.

Variabel pertumbuhan pasar mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pertumbuhan pasar suatu unit usaha strategik, maka perusahaan cenderung melakukan diversifikasi usaha.

### 3. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Strategi Diversifikasi

Variabel tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Sulastri (2003) yang menemukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap strategi diversifikasi usaha. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat bunga diper timbangkan perusahaan dalam menentukan strategi diversifikasi.

### 4. Pengaruh Variabel Keadaan Pasar Modal terhadap Strategi Diversifikasi

Variabel keadaan pasar modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat perdagangan saham di BEJ maka akan berpengaruh terhadap keinginan perusahaan untuk melakukan kebijakan diversifikasi usaha. Perdagangan saham yang semakin meningkat menunjukkan gairah investor untuk membeli saham semakin meningkat sehingga perusahaan akan semakin mudah melakukan akses pendanaan melalui pasar modal.

**5. Pengaruh Variabel Pertumbuhan Pasar Terhadap Strategi Diversifikasi.**

Variabel pertumbuhan pasar mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pertumbuhan pasar suatu unit usaha strategik, maka perusahaan cenderung melakukan diversifikasi usaha

**6. Pengaruh Variabel Profitabilitas Terhadap Strategi Diversifikasi**

Variabel profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan publik yang *profitable* akan mampu memupuk modal sehingga akan tertarik untuk melakukan diversifikasi usaha. Temuan penelitian ini juga mendukung *pecking order theory*, Myers (1984) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembiayaan, perusahaan mendasarkan pada urutan dari laba yang ditahan, kemudian hutang dan yang terakhir melalui emisi saham baru.

**7. Pengaruh pembayaran dividen terhadap strategi diversifikasi**

Variabel pembayaran dividen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran dividen bukan merupakan variabel yang dipertimbangkan perusahaan dalam melakukan kebijakan diversifikasi usaha.

**8. Pengaruh Variabel Ukuran Perusahaan Terhadap Strategi Diversifikasi**

Variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berskala besar mempunyai kecenderungan untuk melakukan diversifikasi usaha.

**9. Pengaruh Variabel Pangsa Pasar Relatif Terhadap Strategi Diversifikasi**

Variabel pangsa pasar relatif mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap strategi diversifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jika perusahaan mempunyai daya saing yang lebih tinggi dibanding pesaing utamanya maka ada kecenderungan perusahaan tersebut melakukan diversifikasi usaha.

**10. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap leverage**

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *leverage*. Temuan ini konsisten dengan temuan Sudarma (2003), Moh'd et al. (1998). Semakin meningkat kepemilikan institusional diharapkan semakin kuat kontrol terhadap manajemen. Bila biaya monitoring tersebut tinggi maka mereka akan menggunakan pihak ketiga yaitu *debt holder* untuk membantu melakukan pengawasan.

**11. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap leverage**

Variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *leverage*. Temuan penelitian ini juga tidak mendukung *agency theory*, Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan tentang adanya pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan.

**12. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap leverage**

Variabel suku bunga berpengaruh negatif terhadap *leverage*. Semakin tinggi suku bunga akan mengurangi minat perusahaan untuk melakukan peminjaman sehingga *leverage* akan menurun. Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sudarma (2003) yang menemukan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap *leverage*.

### **13. Pengaruh keadaan pasar modal terhadap leverage**

Keadaan pasar modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *leverage*. Semakin bergairah pasar modal ternyata tidak mengurangi minat perusahaan untuk melakukan peminjaman ke bank. Fenomena ini adalah menarik untuk kita kaji. Banyak perusahaan besar di Indonesia yang masih menggantungkan dirinya pada pembiayaan dari sektor perbankan.

### **14. Pengaruh pertumbuhan pasar terhadap leverage**

Pertumbuhan pasar berpengaruh positif terhadap *leverage*. Semakin tinggi pertumbuhan pasar maka peluang bisnis perusahaan semakin besar. Peluang bisnis yang semakin besar akan memerlukan *assets* strategis dalam jumlah yang cukup besar sehingga akan memengaruhi strategi pembiayaan yang salah satunya melalui pinjaman bank.

### **15. Pengaruh profitabilitas terhadap leverage**

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *leverage*. Temuan ini mendukung teori struktur modal yaitu *pecking order theory*. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba yang ditahan. Tingginya laba yang ditahan akan mengurangi minat perusahaan untuk melakukan peminjaman ke bank sehingga *leverage* akan menurun.

### **16. Pengaruh pembayaran dividen terhadap leverage**

Variabel pembayaran dividen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *leverage*. Hasil penelitian ini mendukung *pecking order theory*, dimana dalam

melakukan pembiayaan, perusahaan mendasarkan pada urutan dari laba yang ditahan, kemudian hutang dan yang terakhir adalah emisi saham baru.

### **17. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap leverage**

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *leverage*. Perusahaan besar mempunyai *assets* dalam jumlah besar. Besarnya *assets* yang dimiliki perusahaan bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank, sehingga perusahaan besar akan terdorong untuk melakukan peminjaman dan *leverage* akan meningkat.

### **18. Pengaruh pangsa pasar relatif terhadap leverage**

Pangsa pasar relatif tidak berpengaruh signifikan terhadap *leverage*. Temuan penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Sulastri (2003) yang menemukan bahwa variabel pangsa pasar relatif berpengaruh positif terhadap *leverage*. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan peminjaman, perusahaan tidak mempertimbangkan bagaimana daya saing perusahaan di pasar.

### **19. Pengaruh strategi diversifikasi terhadap leverage**

Strategi diversifikasi berpengaruh positif terhadap *leverage*. Perusahaan bisa melakukan akuisisi yaitu dengan membeli perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Cara ini membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Kebutuhan dana dalam jumlah yang besar ini bisa dipenuhi dari pinjaman bank. Jika uang tunai yang dibutuhkan untuk membiayai unit strategis ini berasal dari pinjaman bank maka hal ini disebut dengan *leverage buyout* (LBO).

## **20. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini tidak konsisten dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan, karena perusahaan akan diawasi dengan lebih baik oleh pihak institusi yang menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan mayoritas oleh institusi maka hal ini berpotensi untuk menimbulkan benturan dengan pemilik minoritas sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Temuan penelitian ini tidak mendukung temuan penelitian Demsetz dan Lehn (1985), Pound (1988), Mc Conell dan Servaes (1990) yang menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan menghilangkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, karena insentif yang dimiliki pemilik untuk memonitor manajer.

## **21. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini tidak mendukung *agency theory*, Jensen dan Meckling (1976) yang memprediksi bahwa kepemilikan manajerial akan mengurangi konflik keagenan karena kepentingan manajemen dengan pemilik menyatu. Pengaruh variabel suku bunga terhadap nilai perusahaan, variabel tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membeli saham perusahaan, investor mempertimbangkan bagaimana perkembangan tingkat suku bunga.

## **22. Pengaruh Keadaan Pasar Modal Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel keadaan pasar modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para pemodal di Indonesia yaitu pemodal asing dan pemodal domestik secara umum akan mempertimbangkan faktor perkembangan pasar modal dalam membeli saham.

## **23. Pengaruh Variabel Pertumbuhan Pasar Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel pertumbuhan pasar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini mendukung *signaling theory*. Battacharya (1979) yang menyatakan bahwa pertumbuhan pasar merupakan *signal* bahwa perusahaan mempunyai prospek bagus di masa yang akan datang.

## **24. Pengaruh Variabel Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini mendukung *signaling theory*, Battacharya (1979) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *earning* yang semakin meningkat merupakan *signal* bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek bagus di masa yang akan datang.

## **25. Pengaruh Pembayaran Dividen Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel pembayaran dividen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Sujoko (1999) yang menemukan bahwa pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap retur saham. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan *signaling theory*, Battacharya (1979) yang menyatakan

bahwa seorang manajer yang mempunyai informasi lebih mendalam menggunakan dividen untuk menginformasikan kepada investor tentang kualitas *earnings*.

#### **26. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian Sudarma (2003) dan Ratnawati (2001). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa investor mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam membeli saham. Ukuran perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja bagus.

#### **27. Pengaruh Variabel Pangsa Pasar Relatif Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel pangsa pasar relatif mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pembelian saham banyak investor yang mempertimbangkan pangsa pasar relatif.

#### **28. Pengaruh Strategi Diversifikasi Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel strategi diversifikasi mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Temuan dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Rumelt (1974), Michael dan Shaked (1984) yang menemukan bahwa strategi diversifikasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil

penelitian Rumelt (1984) menemukan bahwa diversifikasi berhubungan mempunyai kinerja lebih baik dari pada diversifikasi tidak berhubungan. Sedangkan hasil penelitian Michael dan Shaked (1984) menemukan bahwa diversifikasi tidak berhubungan mempunyai kinerja lebih baik dari pada diversifikasi berhubungan.

#### **29. Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan**

Variabel *leverage* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung teori struktur modal model *trade off* yang menyatakan bahwa jumlah hutang yang semakin meningkat akan menurunkan nilai perusahaan. Argumentasi yang mendasari hal ini karena diprediksi nilai sekarang *financial distress cost* dan *agency cost* melebihi penghematan pajak dari penggunaan hutang.

#### **IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Konsentrasi kepemilikan dalam penelitian ini hanya pada perusahaan domestik dan belum mengakomodir kepemilikan mayoritas oleh investor asing. Penelitian mendatang perlu meneliti kepemilikan oleh asing. Penelitian ini belum bisa memberikan informasi sejauh mana konsentrasi kepemilikan dapat dikurangi. Penelitian ini juga belum membedakan jenis-jenis strategi diversifikasi yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang akan datang perlu membedakan jenis-jenis diversifikasi yang dilakukan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adedeji, A. (1998). Does The Pecking Order Hypothesis Explain The Dividend Payout Ratios of Firm in The UK. *Journal of Business Finance & Accountin.* 25: 1127- 1155.
- Amihud, Yakov dan Baruch Lev, 1981. Risk Reduction as a Managerial Motive for Conglomerate Mergers. *Bell Jour of Economics I.* 605-617.
- Amihud, Yakov dan Baruch Lev, 1999. Does Corporate Ownership Structure affect its strategy towards diversification?. *Strategic management Journal* 20. 1063- 1069.21.
- Ang, James S., Rebel A. Cole, dan James Wuh Lin, 2000. Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Finance* 55 (1), 81-106.
- Barclay MJ, and Smith CW, 1995. *The Maturity Structure of Corporate Debt.* The Journal of Finance. Vol. L. No. 3 pp. 609-631.
- Copeland, T.E. dan J. F. Weston (1992). *Financial Theory and Corporate Policy.* Addison- Wesley.
- Donaldson, G. (1961). *Corporate Debt Capacity : a Study of Corporate Debt Policy and The Determination of Corporate Debt Capacity.* Boston, Division of Research, Harvard Graduate School of Business Administration.
- Emery, D.R., Finnerty, J.D., 1997. *Corporate Financial Management.* United States of America. Prentice Hall International Inc.
- Fama, E.F. (1974). The Empirical Relationship Between the Dividend and Investment Decisions if Firms. *American Economic Revie.,* 64:304-318.
- Gaver, Jennifer J., dan Kenneth M. Gaver, 1993. *Additional Evidence on the Association Between the Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies.* Journal of Accounting and Economics 16,-125-160.
- Ghos A, Cai F, 1999. *Capital Structure: New Evidence of Eptimality and pecking Order Theory.* American Business Review.
- Gilson Stuart C., 1997. *Transaction Cost and Capital Structure Choic: Evidence From Financially Distressed firm.* The Journal of Finance Vol. VII. No. 1 March 1997.
- Barclay MJ, and Smith CW, 1995. *The Priority Structure of Corporate Liabilities.* The Journal of Finance. Vol. L. No. 3 pp. 899-917.
- Gill, J., J.P. Green (1993). *Dividend Policy and its Relationship to Investment and Financing Pilicies: UK Empirical Evidence.* Working Paper (University of Ulster).

- Greene, W.H. (1993). *Econometric Analysis*. 2<sup>nd</sup> ed., Macmillan.
- Harris, M., dan A. Raviv (1991). the Theory of Capital Structure. *Journal of Finance*. March, 297-355.
- Jensen, M.C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow. Corporate Finance and Takeovers. *American Economic Review*. 76:323-329.
- Jensen, M. and W. Meckling (1976). *theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Finance Economics* 3, 305-360.
- Larry Lang, Elijek, Renc M Stulx, 1994. Leverage, Investment, and Firm Growth. *Journal of Financial Economics*.
- Lee Kc, Kwok CCY, 1988. *Multination Corporation VS. Domestic Corporation: International Enviromental Factors and Determinats of Capital Structure*. *Journal of International Business Studies*, pp. 195-217.
- Lins dan Servaes (1999). International evidence on the value of corporate diversification. *Journal of Finance* 34: 549-561.
- Lintner, J. (1956). Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. *American Economic Association*. May :94-98
- Michael dan Shaked (1984). Does business diversification affect performance. *Financial Management Winter*. 18-24.
- Modigliani F. Miller MH (1958). *The Cost Of Capital, Corporae finance and the Theory of Investement* . The American Economics review. Vol. XIVIII. No. 3: 261-297.
- Myers, S (1984). The capital structure puzzle. *Journal of Finance* , Vol XXXIX July.
- Myers, S and Majluf (1984). *Corporate Financing and Investment Decision When Firms have information Investors Do not Have*. *Journal of Finance Economics* 13; 187- 221.
- Prowsen, Stephen (19880). *Corporate Governance, Emerging issues and Lessons frem East Asia*.
- Rumelt, Ricahard (1974). *Strategy, Structure and Economic Performance*. Boston Mass: Graduate School of Business Administration, Harvard University.
- Smith, Michael P (1996). *Shareholder activision by institusional investor, evidence from Calpers*. *Journal of Finance*. Vol. XII , no. I.
- Sudarma, made (2003). *Pengaruh Struktur Kepemilikan saham, Faktor Intern, Faktor Ekstern terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan*. Disertasi program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.



- Sujoko (1999). *Analisis kandungan Informasi Dividen, pengaruhnya terhadap return saham*. thesis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjahmada Yogyakarta.
- Sulastri (2003). *Diversifikasi atau Fokus, dampaknya terhadap kinerja perusahaan*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Shleifer dan Vishny (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance* 52, 737-783.
- Theobald, M (1978). Intertemporal Dividends Models, An Empirical Analysis Using recent UK data. *Journal Of Business Fimnance and Accounting* . 5: 123- 132.
- Undang- Undang No. I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang- undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Walsh dan Seward (1990). *On the efficiency of internal and external corporate control mechanism*, *Academy of management Review* 15; 421-458.
- Weston, J fred and Brigham, F Eugene (1994). *Essential of management Finance*. The Dryden Press , A Advison of Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Wibowo, Erkaningrum (2002). Analisis hubungan Dividen, financial Leverage dan Investasi dalam pengujian Hipotesis Pecking Order. *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16: 33- 54.
- Wilopo dan Mayangsari (2002). *Pengaruh Struktur kepemilikan, Perilaku manajemen laba, Free cash flow dan Economic value added*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN YANG BERDAMPAK PADA PENGEMBANGAN UMKM, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PENERIMAAN DAERAH

Endah Marendah Ratnaningtyas

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi- Universitas Teknologi Yogyakarta  
Dosen Stiebbank (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Dan Perbankan)  
Email : ratnaningtyasendah9@gmail.com

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keeratan hubungan antara aktivitas pariwisata ( stabilitas keamanan dan kebijakan makro ekonomi, kebijakan dan anggaran wisata, strategi pengembangan obyek wisata, strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung, program peningkatan lama tinggal). Secara spesifik, penelitian ini menganalisis besaran pengaruh aktivitas pariwisata secara parsial dan simultan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, pengaruh kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara secara parsial dan simultan terhadap pengembangan usaha UMKM, pengaruh pengembangan usaha UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja dan penerimaan daerah sektor pariwisata. Penelitian di laksanakan di DKI Jakarta pada tahun 2018. Populasi penelitian adalah perusahaan sektor pariwisata sebanyak 350, yang terdiri dari atas 120 biro perjalanan, 70 hotel dan 160 restoran. Penelitian di peroleh melalui proporsional stratified random sampling dengan jumlah sebanyak 172 perusahaan (besar, sedang dan kecil). Penelitian ini juga menggunakan data sekunder diperoleh dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Asosiasi Tour & Travel Indonesia (ASITA), Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (APHRI) yang dikumpulkan berurutan lengkap (time series) mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Menggunakan metode analisis data deskriptif dan inferensial. Jenis penelitian adalah explanotary research yang menggunakan analisis jalur untuk menjelaskan besarnya kontribusi langsung dan tidak langsung antar variabel. Sebagai alat bantu dalam pengolahan data statistik di gunakan program SPSS Ver. 23. Hasil penelitian berimplikasi akan perlunya penciptaan iklim usaha yang kondusif didukung peraturan, diperlukan pula pembentukan pusat informasi pariwisata, peningkatan kualitas SDM dan bantuan permodalan bagi UMKM, dan pengembangan jaringan usaha. Disamping itu, peran yang lebih aktif dari asosiasi kepariwisataan, peningkatan kesejahteraan karyawan dan kerjasama yang saling mendukung dengan provinsi- provinsi lainnya di Indonesia harus menjadi pertimbangan dasar dalam memajukan industri pariwisata nasional.*

Keywords: Wisatawan, UMKM, pariwisata, obyek wisata, kebijakan, strategi

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan suatu industri multidimensi yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

Sifat multidimensi ini mengakibatkan setiap jenis produk wisata terdiri dari beberapa produk baik yang dapat dinilai secara kuantitatif maupun secara

kualitatif. Dalam UU No. 10 th 2009 Kepariwisata dimaknai sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah dari sektor industri pariwisata baik berasal dari wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, akan terkait dengan jumlah anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk mendanai sarana dan prasarana pariwisata, besarnya anggaran untuk promosi baik didalam negeri maupun di luar negeri, selain itu dipengaruhi oleh jumlah kunjungan yang dilakukan oleh para wisatawan termasuk lama tinggal,

pengaruh daya tarik objek-objek wisata unggulan baik dari segi jumlahnya maupun keunggulan produk yang ditawarkan (paket-paket wisata), fasilitas untuk mencapai objek wisata seperti sarana transportasi (darat, laut, sungai dan udara), akomodasi di lokasi tujuan wisata (hotel, restoran, tempat-tempat penjualan souvenir dan lain-lain), informasi yang diberikan (katalog, media cetak, media elektronik dan lain-lain), lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti biro perjalanan, pelayanan *passport* dan lain-lain.

Penerimaan daerah dari sektor pariwisata secara langsung berdampak pada ketersediaan kegiatan dan unit-unit usaha mikro kecil dan menengah disekitar proses pelayanan pariwisata sampai tempat tujuan pariwisata sehingga kenaikan aktivitas ini dapat mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan berpeluang dapat meningkatkan lapangan kerja. Penduduk miskin di Indonesia Secara jumlah, mencapai 25,76 juta orang pada September 2018, berkurang 910.000 orang dibandingkan September 2017 yang mencapai 25,95 juta orang. Penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 berkurang 0,16 persen atau jika dibandingkan Maret 2018 dan

menurun 0,46 persen dibandingkan September 2017.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta pada Februari 2018 sebesar 5,34 persen. Angkatan kerja pada Februari 2018 berkurang sebanyak 0,60 persen jika dibandingkan dengan Februari 2017. Penduduk DKI Jakarta pada Februari 2018 paling banyak bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil yaitu sebesar 24,04 persen (1.236 ribu orang). Pada Februari 2018, penduduk DKI Jakarta yang bekerja pada sektor informal meningkat sebesar 0,43 persen dibandingkan dengan Februari 2017. Penyerapan tenaga kerja pada Februari 2018 didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SMA sederajat, yaitu sebesar 42,60 persen (2.189 ribu orang). Pada Februari 2018, persentase perempuan yang bekerja di bawah jam kerja normal (1-34 jam per minggu) lebih besar dibandingkan persentase pekerja laki –laki..

Aktifitas pariwisata juga memiliki pengaruh yang signifikan bagi aktifitas usaha-usaha lainnya seperti hotel, restoran, sarana hiburan lainnya, perusahaan angkutan, biro perjalanan,

toko cendera mata, dan jenis serta aktifitas usaha lainnya. Diperkirakan dampak aktifitas usaha selain untuk meningkatkan penerimaan daerah DKI Jakarta juga meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lapangan kerja yang berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing pariwisata di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Obyek wisata yang ada meliputi wisata konferensi, wisata belanja, wisata sejarah, wisata budaya dan wisata lainnya. Objek tersebut kurang memiliki kekhasan yang bisa ditonjolkan oleh pemerintah daerah setempat karena terbentur masalah pendanaan serta tenaga kerja pariwisata (misalnya sarana promosi dan *tourist guide*/pemandu wisata). Selain itu, objek wisata di DKI Jakarta juga kurang mendapat perhatian dari segi informasi dan perawatan sehingga nilai kesejarahannya kurang memiliki daya tarik wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Masih rendahnya biaya promosi daerah tujuan wisata di berbagai daerah di Indonesia maupun DKI Jakarta menyebabkan daerah tujuan wisata kurang dikenal wisatawan nusantara maupun

mancanegara. Pelaksanaan dari strategi pengembangan obyek wisata dan strategi pengembangan sarana prasarana pendukung wisata di Indonesia dan DKI Jakarta khususnya dalam upaya peningkatan lama tinggal bagi wisatawan Mancanegara dan wisatawan Nusantara belum optimal. Rendahnya sarana dan prasarana (infrastruktur), khususnya menyangkut kemudahan transportasi yang aman dan nyaman, pusat-pusat-pusat belanja wisata yang menarik dan penginapan yang terjangkau pengunjung untuk mencapai kawasan di lokasi wisata DKI Jakarta mempersulit akses antara wisatawan menuju tempat-tempat tujuan wisata.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia belum menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata jangka waktu tinggal wisatawan Mancanegara Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan, demikian pula jumlah dana yang dikeluarkan dalam setiap kunjungan. Selain itu jumlah dana yang dikeluarkan per hari sedikit mengalami kenaikan. Kondisi yang dirasakan tidak aman dan tidak nyaman serta adanya kesan yang

negatif dari wisatawan mancanegara tentang stabilitas politik dan keamanan di Indonesia pada umumnya serta kondisi kota DKI Jakarta pada khususnya diduga menjadi penyebab keengganan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat di DKI Jakarta terhadap apresiasi pentingnya sektor pariwisata, bahkan tidak jarang menjadi faktor pengganggu terhadap wisatawan itu sendiri, yang memberikan ketidaknyamanan dan permasalahan atas keamanan wisatawan. Banyaknya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin puyuh (puting beliung), tanah longsor, aktivitas gunung berapi, serta kecelakaan darat, laut dan udara mempengaruhi citra bagi wisatawan mancanegara untuk berniat dan berkunjung ke Indonesia. DKI Jakarta dikenal sebagai daerah rawan banjir pada musim hujan, lalu lintas macet setiap hari (tingkat polusi udara yang tinggi), padat penduduk, penyebaran virus flu burung, demam berdarah, lingkungan yang kumuh serta daerah kriminalitas yang tinggi menyebabkan wilayah yang kurang nyaman untuk dikunjungi baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan dan stabilitas makro ekonomi, peningkatan anggaran bidang pariwisata belum optimal karena lemahnya Undang-undang, peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tentang kepariwisataan serta ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing khususnya terhadap nilai tukar Dollar AS juga mempengaruhi industri pariwisata. Upaya pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan dan pembinaan pengembangan UMKM sektor pariwisata di DKI Jakarta dirasakan belum optimal menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

Penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor variabel stabilitas keamanan dan kebijakan makro ekonomi, kebijakan dan anggaran wisata, strategi pengembangan obyek wisata, strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung, program peningkatan lama tinggal terhadap kunjungan wisatawan, pengembangan UMKM sektor pariwisata, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan objek penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta,

yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan maupun Kepulauan Seribu. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan diantara Variabel Stabilitas Keamanan dan kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan dan Anggaran Wisata, Strategi Pengembangan Obyek Wisata, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung, Program Peningkatan Lama Tinggal.
2. Sejauhmana pengaruh secara parsial dan simultan dari Variabel Stabilitas Keamanan dan kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan dan Anggaran Wisata, Strategi Pengembangan Obyek Wisata, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung, Program Peningkatan Lama Tinggal terhadap Kunjungan wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta.
3. Sejauhmana pengaruh secara parsial dan simultan dari Variabel Stabilitas Keamanan dan kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan dan Anggaran Wisata, Strategi Pengembangan Obyek Wisata, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung, Program Peningkatan

- Lama Tinggal terhadap Kunjungan wisatawan Nusantara di DKI Jakarta.
4. Sejauhmana pengaruh secara parsial dan simultan dari Variabel Kunjungan wisatawan mancanegara dan Variabel Kunjungan wisatawan Nusantara terhadap Pengembangan Usaha UMKM sektor Pariwisata di DKI Jakarta.
  5. Sejauhmana pengaruh Pengembangan Usaha UMKM sektor Pariwisata terhadap Penciptaan Lapangan Kerja sektor Pariwisata di DKI Jakarta
  6. Sejauhmana pengaruh Pengembangan Usaha UMKM sektor Pariwisata terhadap Peningkatan Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di DKI Jakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pembangunan

Menurut Todaro (2000, h. 17), istilah pembangunan (*development*) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (*Gross National Product*)-nya.

### Pemahaman Pariwisata

Pariwisata menurut McIntosh dan Shashikant Gupta dalam Nyoman S. Pendit (2006, h. 34) adalah gabungan dan gejala dan hubungan yang timbul dan interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya.

### Aktifitas Pariwisata

Menurut Wahab (2003 : h. 9) kegiatan pariwisata adalah suatu lalu lintas dua arah. Setiap negara harus menjadi negara sumber wisatawan dan sekaligus juga menjadi negara penerima wisatawan, meskipun dengan taraf yang beraneka tingkat. Aktivitas pariwisata melibatkan para pelaku, tetapi mutlak harus diperhitungkan yaitu (J. Damanik dan H.F Weber, 2006, h.20) : wisatawan, industri pariwisata, pendukung jasa wisata, pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga swadaya masyarakat.

### Kebijakan Anggaran Pariwisata

Hal yang paling sentral dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan berwisata adalah biaya. Biaya akan menentukan bentuk, tujuan,

waktu berwisata, tipe penginapan, modal angkutan serta jasa lain yang digunakan. Oleh sebab itu ketersediaan informasi yang akurat dan terbaru tentang perkembangan ekonomi dan finansial di daerah destinasi wisata sangat penting untuk memudahkan calon wisatawan menentukan biaya wisatanya. (Freyer, dalam J. Damanik dan H.F. Weber, 2006, h. 6).

### **Strategi Pengembangan Objek Pariwisata**

Strategi menurut John Tribe (1997) dalam J. Damanik dan H.F. Weber (2006, h. 39) adalah rencana induk yang mempunyai ciri kunci tertentu. Menurut identifikasi WTO (1998) dalam F. Vellas dan L. Becherel (2008, h. 421), produk pariwisata di masa depan meliputi : wisata eko, pariwisata budaya, tema, pasar kapal pesiar dan pariwisata petualangan.

### **Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata**

Sarana pendukung pariwisata adalah sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang dan sarana pelengkap. Prasarana wisata terdiri dari tempat-tempat penginapan wisatawan, tempat-tempat menemui wisatawan dan

tempat-tempat rekreasi dan sport. (Wahab, 2003, h. 111).

### **Program Peningkatan Lama Tinggal**

Lama berwisata menjadi pertimbangan tersendiri. Dalam hal ini faktor ketersediaan waktu luang dan uang kembali memainkan peran penting. Waktu luang (musim liburan) menjadi salah satu faktor penentu besar-kecilnya arus wisatawan. Wisatawan mancanegara secara umum cenderung ketat dalam pengaturan waktu berwisata. Jauh sebelum keberangkatan mereka telah melakukan perencanaan perjalanan, mulai alokasi waktu perjalanan, kunjungandi Objek dan Daya Tarik Wisata, jenis rekreasi yang akan dilakukan dan sebagainya. (J. Damanik dan Weber, 2006, 9).

### **Program Dana Yang Dibelanjakan Wisatawan**

Seorang wisatawan rata-rata mengeluarkan  $\pm$  50% biaya perjalanannya untuk keperluan penginapan hotel dan makanan. Komponen pengeluaran terdiri dari: 20% untuk hiburan dan transport lokal, 10% untuk kunjungan-kunjungan singkat (*ekskursi*), 10% untuk belanja



cenderung, 10% untuk lain-lain. (Wahab, 2003, h. 47).

## **Kebijakan Ekonomi dan Pengembangan UMKM.**

### **a. Kebijakan Moneter**

Kebijakan moneter menurut Nafziger (1997, h. 398), mempengaruhi uang (berbentuk uang + tabungan-tabungan pada bank) dan tingkat bunga (pinjaman).

### **b. Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal menurut Nafziger (1997, h. 398), didalamnya termasuk tingkat pajak dan besarnya belanja penerimaan.

### **c. Karakteristik dan Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Menurut Prawirokusumo (2001, h. 78), karakteristik UKM secara umum adalah fleksibel, permodalannya tidak selalu tergantung pada modal dari luar tetapi bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri, dalam hal pinjaman sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi dan UKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sektor merupakan sarana distributor barang dan jasa dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat.

## **Kontribusi UMKM Pada Produk Domestik Bruto (PDB)**

Dari aspek pembentukan PDB, secara umum UKM masih memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan usaha besar. Selama periode 2016-2018 secara total peran UKM masih diatas 50 persen, ini menunjukkan UKM masih memiliki peranan sangat penting dalam menciptakan nilai tambah. Namun demikian dalam kurun waktu 3 tahun terlihat terjadi penurunan peran UKM dalam memberikan kontribusi terhadap total PDB, ini dapat dimungkinkan mulai terjadinya pergeseran usaha kecil bergeser ke usaha menengah dan usaha menengah bergeser ke usaha besar.

## **Penambahan Jumlah Kunjungan Wisatawan**

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka berdampak langsung pada kebutuhan wisata, yang dalam hal ini permintaan wisata. Unsur-unsur penting dalam permintaan wisata adalah wisatawan dan penduduk lokal yang menggunakan sumber daya. Faktor lain yang turut berperan adalah

aksesibilitas yang semakin mudah pada produk dan objek wisata. Perjalanan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti distribusi dan peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat, pengurangan jam kerja, iklim dan lingkungan hidup.

### **Penerimaan Daerah**

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. (Widjaja, 2002, h. 148).

### **Lapangan Kerja Pariwisata**

Lapangan kerja pariwisata meliputi pekerjaan dalam berbagai sektor seperti akomodasi, restoran, daya tarik, penerbangan, toko cenderamata, biro perjalanan serta agen perjalanan,

transportasi, dan lain-lain. Sektor yang berbeda diasosiasikan sebagai lapangan kerja yang luas dengan persyaratan sumber daya manusia yang beragam. (Diamond dalam F. Vellas dan L. Becherel, 2008, h. 206).

### **Daya Saing Sektor pariwisata**

Daya saing pada tingkat nasional adalah derajat yang mana negara itu, dalam kondisi pasar yang bebas dan adil, dapat memproduksi barang dan jasa yang memenuhi uji pasar internasional sementara secara simultan meningkatkan pendapatan riil warga negaranya. Daya saing pada tingkat nasional didasarkan pada kinerja produktivitas yang superior. (Laporan Komisi Daya Saing Presiden, yang dituliskan untuk pemerintahan Reagan pada tahun 1984 dalam Dong-Sung Cho dan Hwy-Chang Moon, 2003, h. 246).

## Penelitian Yang Relevan

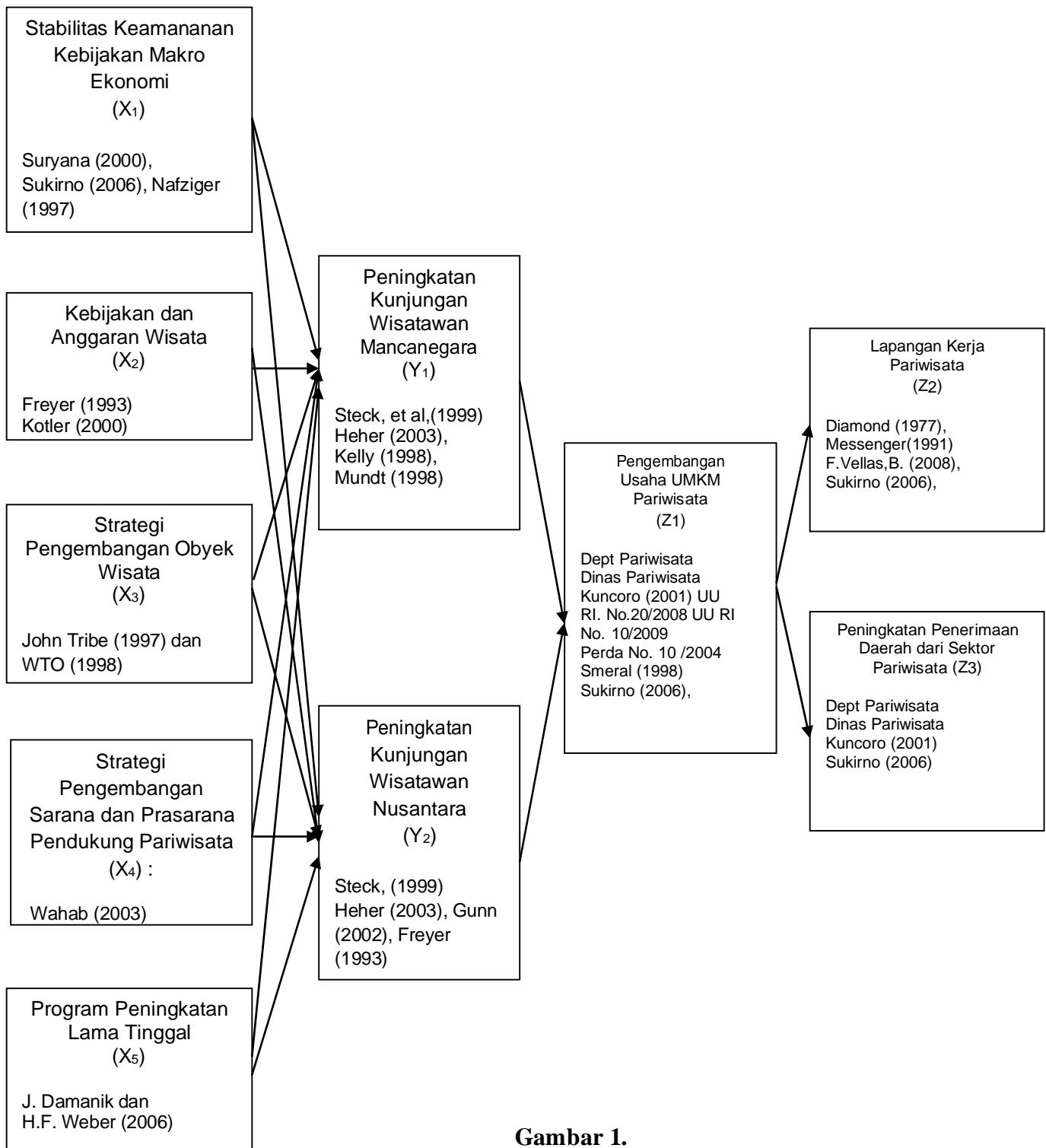
Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, antara lain:

**Tabel 1.**  
**Penelitian Yang Relevan**

Judul dan Hasil Penelitian	Peneliti, Tahun
<i>Cultural Heritage Tourism. The Villagers's Prespective : A Case Sruudy from Ngada, Flores</i> menjelaskan bahwa masyarakat Ngada tidak homogen dan tradisi masa lampau tidak nampak sekarang ini, tetapi pembentukan masyarakat atau pembentukan ulang dapat membantu berbagai pihak.	Stroma Cole (1997)
<i>Potensi Sosial Ekonomi Budaya Dalam Pengembangan Industri Pariwisata</i> menjelaskan potensi-potensi yang mendukung perkembangan pariwisata di Daerah Tujuan Wisata Kutai (Tanjung Isuy) dan Lombok Barat (Narmada)	Tim Peneliti PMB LIPI (1998)
<i>Potensi Sosial Ekonomi Budaya Dalam Pengembangan Industri Pariwisata</i> menjelaskan potensi-potensi yang mendukung perkembangan pariwisata di Daerah Tujuan Wisata Kutai (Tanjung Isuy) dan Lombok Barat (Narmada)	Fazril (2005)
Pengaruh komponen produk wisata danau terhadap jumlah kunjungan, lama tinggal dan besarnya pengeluaran wisatawan serta dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Barat. Diketahui bahwa secara bersama-sama jumlah kunjungan dan lama tinggal berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran wisata.	Myrza Rahmanita (2001)
<i>Potensi Pengembangan Kepariwisata Cirebon sebagai Heritage Tourism Destination</i> menjelaskan bahwa	

merupakan Kota Wali berarti menjadikan nilai dan tradisi ke-Wali-an yang tampil dalam budaya Cirebon menjadi tema sentral pengembangan kota termasuk keparwisatannya.	
<i>Tourism and Local Economic Development in the Era of Indonesia's Decentralization</i> menunjukkan adanya transformasi dari tujuan pembangunan secara nasional menjadi peran pemerintah daerah setempat.	Christopher Silver (2002)
<i>Creating Experiences for Our Visitor : Tourist Guide Licensing and Training in Singapore</i> dijelaskan bahwa metode pemberian lisensi di Singapura sangat diawasi secara ketat dan sebagai unsur yang signifikan bagi pelatihan para pemandu wisata.	Joan Handerson (2002)
<i>Ecotourism in Indonesia : A Strategy for Regional Tourism Development</i> menjelaskan mengenai studi kasus di Papua Barat, Indonesia. Ekologi pariwisata dalam strategi pembangunan, manfaat yang diperoleh meliputi tenaga kerja, kesejahteraan, serta konservasi lingkungan, termasuk perlindungan fauna dan flora yang langka, penciptaan industri yang berkelanjutan dalam jangka panjang.	Bruce Prideaux dan Malcolm Cooper (2002)
<i>The Impact of Tourism on the Development of Ubud Painting Art</i> menunjukkan bahwa pengembangan seni di Ubud, khususnya seni lukis menunjukkan perkembangan yang pesat. Dalam jangka panjang sejarah membuktikan seni tidak hanya dibentuk oleh aspek sesuatu yang berhubungan dengan estetika, tetapi juga berhubungan dengan politik, ekonomi dan faktor-faktor sosial yang ikut menentukan bentuk seni.	Salmon Priaji Martana (2002)

## Kerangka Berpikir



**Gambar 1.**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

1. Terdapat hubungan yang berarti diantara variabel Stabilitas Keamanan dan Kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan dan Anggaran Wisata, strategi Pengembangan Obyek Wisata, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata, Program Peningkatan Lama Tinggal.
2. Terdapat pengaruh secara parsial dan simultan yang signifikan dari variabel Stabilitas keamanan dan kebijakan makro ekonomi, kebijakan dan anggaran wisata, strategi pengembangan obyek wisata, strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung, program peningkatan lama tinggal terhadap kunjungan wisatawan mancanegara.
3. Terdapat pengaruh secara parsial dan simultan yang signifikan dari variabel Stabilitas keamanan dan kebijakan makro ekonomi, kebijakan dan anggaran wisata, strategi pengembangan obyek wisata, strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung, program peningkatan lama tinggal terhadap kunjungan wisatawan Nusantara.
4. Terdapat pengaruh secara parsial dan simultan yang signifikan dari

variabel Peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara terhadap pengembangan usaha UMKM sektor Pariwisata

5. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pengembangan Usaha UMKM sektor Pariwisata terhadap Lapangan Kerja Pariwisata.
6. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pengembangan Usaha UMKM sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Objek dan Tempat**

Objek penelitian yaitu pelaku usaha pariwisata dan UMKM yang melakukan kegiatan sektor pariwisata di DKI Jakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah para pimpinan/manajer, dan pengusaha UMKM, serta pihak-pihak lain yang terkait.

### **Populasi, Sampel dan Sampling**

Pengumpulan data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang diperoleh dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Asosiasi Tour & Travel Indonesia (ASITA), Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran.

Indonesia (APHRI). Teknik sampling yang digunakan adalah *propotionale stratified random sampling*. Banyaknya responden yang ditetapkan dalam penelitian sebanyak 175 Responden yang mewakili perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Data sekunder yang digunakan untuk analisis deskriptif dikumpulkan

berurutan lengkap (*time series*) mulai dari tahun 2008 - 2018 yang diperoleh dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Asosiasi Tour & Travel Indonesia (ASITA), Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (APHRI), Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, KADIN Jakarta dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

**Tabel 2.**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel Penelitian	Sub Variabel	Indikator	Jenis Data	Jumlah Pertanyaan
1	Stabilitas Keamanan dan kebijakan Makro Ekonomi (X1)  Suryana (2000), Sukimo (2006), Nafziger (1997)	1. Regulasi  2. Bantuan-bantuan  3. Perlindungan	- Undang-undang - Peraturan - Kebijakan - Finansial - Sarana prasarana - Pembinaan - Bantuan hukum - Pembinaan - Pengawasan	Ordinal  Ordinal  Ordinal	12 Pertanyaan
2	Kebijakan dan Anggaran Wisata (X2)  Freyer (1993) Kotler (2000)	1. Kemudahan dalam perijinan  2. Kemudahan terhadap akses informasi 3. Bantuan tambahan anggaran pemerintah untuk pariwisata 4. Tambahan Modal dari pihak lain	- Kemudahan dalam ijin perusahaan - Kemudahan dalam ijin operasional - Kemudahan informasi - Kemudahan informasi - Peningkatan anggaran dan bantuan pemerintah terhadap pengembangan wisata - Bantuan pinjaman yang harus dikembalikan - Pinjaman dari perbankan dan pihak lainnya.	Ordinal  Ordinal  Ordinal  Ordinal	10 Pertanyaan
3	Strategi Pengembangan Obyek Wisata (X3)  John Tribe (1997) dan WTO (1998)	1. Ketersediaan dana  2. Ketersediaan sarana	- Alokasi dana yang tersedia - Alokasi dana yang Dapat diperoleh dari pihak lain - Ketersediaan sarana yang tersedia	Ordinal  Ordinal  Ordinal	12 Pertanyaan

		<p>3. Kemudahan dalam penguasaan lahan</p> <p>4. Kemudahan dalam Akses transportasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan penambahan sarana untuk pengembangan berikutnya</li> <li>- Kemudahan dalam penguasaan dan pembangunan lahan</li> <li>- Kemudahan dalam penguasaan dan pembangunan lahan</li> <li>- Kemudahan dalam Akses transportasi darat</li> <li>- Kemudahan dalam Akses transportasi udara/laut/sungai</li> </ul>	Ordinal	
4	<p>Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung (X4)</p> <p>Wahab (2003)</p>	<p>1. Ketersediaan Sarana dan prasarana pendukung</p> <p>2. Kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana pendukung</p> <p>3. Kemurahan harga dalam penggunaan sarana dan prasarana pendukung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersedian sarana pendukung</li> <li>- Ketersedian prasarana pendukung</li> <li>- Kemudahan penggunaan sarana pendukung</li> <li>- Kemudahan penggunaan prasarana pendukung</li> <li>- Kemurahan penggunaan sarana Pendukung</li> <li>- Kemurahan penggunaan prasarana pendukung</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal	10 Pertanyaan
5	<p>Program Peningkatan Lama Tinggal (X5)</p> <p>Damanik dan H.F. Weber (2006)</p>	<p>1. Tersedianya informasi yang cukup dari seluruh objek wisata</p> <p>2. Kelengkapan informasi objek wisata utama berbagai paket-paket wisata</p> <p>3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan</p> <p>4. Peningkatan profesionalisme dari petugas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan informasi objek wisata utama</li> <li>- Kelengkapan informasi objek wisata pendukung</li> <li>- Kelengkapan informasi lokasi</li> <li>Kelengkapan informasi harga</li> <li>- Kelengkapan informasi layanan,dll</li> <li>- Upaya peningkatan keamanan</li> <li>- Adanya asuransi keamanan terhadap wisatawan</li> <li>- Peningkatan Pendidikan petugas</li> </ul>	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal	10 Pertanyaan



			- Peningkatan skill dari petugas		
6	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (Y1) Steck, et al,(1999) Heher (2003), Kelly (1998), Mundt (1998)	1. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara 2. Peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara 3. Peningkatan Belanja wisatawan mancanegara	- Besaran peningkatan jumlah wisatawan mancanegara - Besaran peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara - Besaran peningkatan belanja wisatawan mancanegara	Ordinal Ordinal Ordinal	10 Pertanyaan
7	Peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara (Y2) Steck, (1999) Heher (2003), Gunn (2002), Freyer(1993)	1. Peningkatan jumlah wisatawan nusantara 2. Peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara 3. Peningkatan belanja wisatawan nusantara	- Besaran peningkatan jumlah wisatawan nusantara - Besaran peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara - Besaran peningkatan belanja wisatawan nusantara	Ordinal Ordinal Ordinal	10 Pertanyaan
8	Pengembangan UMKM sektor pariwisata (Z1) Kuncoro (2001) UU RI. No.20/2008 UURINo. 10/2009 Perda No. 10/2004 Smeral (1998) Sukirno (2006),	1. Peningkatan modal 2. Peningkatan diversifikasi usaha 3. Peningkatan lokasi usaha 4. Peningkatan daerah pemasaran 5. Peningkatan keuntungan	- Peningkatan Modal sendiri - Peningkatan Modal penyertaan - Peningkatan diversifikasi usaha - Peningkatan diversifikasi produk - Peningkatan jumlah lokasi usaha - Peningkat/perluas daerah pemasaran - Peningkatan keuntungan usaha	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal	12 Pertanyaan
9	Penciptaan Lapangan Kerja Pariwisata (Z2) Diamond (1977), Messenger(1991 ) F.Vellas,B. (2008), Sukirno (2006),	1. Jumlah pekerja di aktivitas utama 2. Jumlah pekerja di aktivitas pendukung 3. Jumlah pekerja di aktivitas penunjang	- Peningkatan Jumlah dan kualitas pekerja di aktivitas utama - Peningkatan Jumlah dan kualitas pekerja di aktivitas pendukung	Ordinal Ordinal Ordinal	10 Pertanyaan

			- Peningkatan Jumlah dan kualitas pekerja di aktivitas penunjang		
10	Peningkatan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata ( Z3 ) Dept Pariwisata Dinas Pariwisata Kuncoro (2001) Sukirno (2006),	1. Penerimaan dari pajak 2. Penerimaan dari retribusi 3. Penerimaan Lain diluar pajak dan retribusi.	- Peningkatan Penerimaan dari pajak - Peningkatan Penerimaan dari retribusi - Peningkatan Penerimaan diluar pajak dan retribusi	Ordinal Ordinal Ordinal	12 Pertanyaan

### Instrumen Penelitian

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, data sekunder diperoleh dari studi literature, Dinas Pariwisata DKI Jakarta, BPS DKI Jakarta, ASITA, APHRI, KADIN DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, website : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id); [www.asita.co.id](http://www.asita.co.id); [www.aphri.co.id](http://www.aphri.co.id); [www.kadin.co.id](http://www.kadin.co.id); [www.depnakerDKI.go.id](http://www.depnakerDKI.go.id); [www.aseanjournal.com](http://www.aseanjournal.com); [www.frescoverde.com](http://www.frescoverde.com). Selain itu kunjungan dan pengamatan lapangan (observasi) di lokasi obyek wisata, usaha-usaha UMKM.

### Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan analisis komparatif deskriptif yang bersifat kuantitatif dan analisis jalur digunakan untuk menguji besarnya

kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel bebas dengan terikatnya. Analisis korelasi merupakan dasar perhitungan koefisien jalur. Adapun uji-uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji parametrik nilai F dan uji parametrik nilai t.

### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Terdapat hubungan yang berarti diantara variabel-variabel Stabilitas Keamanan dan Kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan dan Anggaran Wisata, Strategi Pengembangan Obyek Wisata, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata, Program Peningkatan Lama Tinggal. Keeratan hubungan yang terendah adalah

variabel Stabilitas Keamanan dan Kebijakan Makro Ekonomi dengan variabel Strategi Pengembangan Obyek Wisata, sedangkan keeratan hubungan yang tertinggi adalah variabel Keamanan dan Kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan dengan variabel Program Peningkatan Lama Tinggal.

2. Terdapat pengaruh baik secara parsial, maupun simultan dari variabel-variabel Stabilitas Keamanan dan kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan dan Anggaran Wisata, Strategi Pengembangan Obyek Wisata, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung, Program Peningkatan Lama Tinggal terhadap Peningkatan Jumlah dan Belanja wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta sangat signifikan. Adapun pengaruh terbesar adalah Stabilitas Keamanan dan kebijakan Makro Ekonomi sedang yang memberikan pengaruh terkecil adalah Program Peningkatan Lama Tinggal
3. Terdapat pengaruh baik secara parsial, maupun simultan dari variabel-variabel Stabilitas Keamanan dan kebijakan Makro Ekonomi, Kebijakan dan Anggaran Wisata, Strategi Pengembangan Obyek

Wisata, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung, Program Peningkatan Lama Tinggal terhadap Peningkatan Jumlah dan Belanja wisatawan nusantara di DKI Jakarta sangat signifikan. Adapun pengaruh terbesar adalah Stabilitas Keamanan dan kebijakan Makro Ekonomi sedang yang memberikan pengaruh terkecil adalah Program Peningkatan Lama Tinggal.

4. Terdapat pengaruh baik secara parsial, maupun simultan dari variabel-variabel Peningkatan Jumlah dan Belanja Wisatawan Mancanegara dan Variabel Peningkatan Jumlah dan Belanja Wisatawan Nusantara terhadap Pengembangan Usaha UMKM sektor Pariwisata di DKI Jakarta sangat signifikan. Adapun pengaruh terbesar adalah Peningkatan Jumlah dan Belanja wisatawan Nusantara merupakan variabel yang memberikan pengaruh terbesar terhadap Pengembangan UMKM sektor pariwisata.
5. Terdapat pengaruh Pengembangan Usaha UMKM sektor Pariwisata terhadap Penciptaan Lapangan Kerja sektor Pariwisata di DKI Jakarta sangat signifikan. Dengan demikian apabila variabel Pengembangan

Usaha UMKM sektor Pariwisata meningkat, maka Penciptaan Lapangan Kerja dari sektor pariwisata akan meningkat, baik yang bekerja langsung di sektor pariwisata, maupun yang bekerja di sektor penunjang pariwisata dapat meningkat secara optimal.

6. Terdapat pengaruh Penciptaan Lapangan Kerja sektor Pariwisata terhadap Peningkatan Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di DKI Jakarta sangat signifikan. Dengan demikian apabila variabel Penciptaan Lapangan Kerja sektor Pariwisata meningkat maka Peningkatan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata, baik yang penerimaan yang langsung dari pajak dan retribusi dari sektor pariwisata, maupun penerimaan yang tidak langsung atau pajak dan retribusi dari sektor penunjang pariwisata dapat meningkat secara optimal.

### **Saran-saran**

1. Saran bagi Pihak pemerintah, Asosiasi, UMKM, dan pihak - pihak yang terkait dalam rangka pengembangan usaha sektor pariwisata, sebagai berikut:
  - a. Perlu penciptaan iklim usaha

yang kondusif yang disertai dengan adanya regulasi dan keamanan, serta kepastian hukum, sehingga pengusaha atau UMKM dapat memperoleh kemudahan dan kepastian dalam melakukan investasinya.

- b. Perlu kebijakan dan regulasi yang lebih lengkap, lebih operasional dan bersifat insentif regulasi yang disertai dengan peningkatan pelayanan dari aparatur guna memberikan kemudahan terhadap aksesibilitas dan fasilitas pelayanan dari berbagai pihak.
- c. Perlu dibentuk lembaga yang independen yang terdiri kalangan instansi pemerintah yang berkaitan dengan kepariwisataan, lembaga lembaga / asosiasi, lembaga pendidikan bidang pariwisata, pengusaha pariwisata, lembaga-lembaga sosial dan tokoh masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata terutama berperan dalam pemberian informasi yang terpusat dan terpadu dalam mendukung promosi dan pengembangan produk/atraksi

- pariwisata yang dapat menarik wisatawan.
- d. Untuk memperkuat UMKM sektor pariwisata di bidang jasa, di mana akan sangat bergantung pada kemampuan profesionalisme Sumber daya manusia dan permodalan serta aksesibilitas terhadap informasi, untuk hal tersebut maka perlu adanya dukungan permodalan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, yang didukung oleh sarana dan prasarana kerja, serta teknologi yang memadai.
  - e. Seiring dengan meningkatnya persaingan dan meningkatnya kebutuhan anggota serta meningkatnya tuntutan terhadap kepuasan dari konsumen, maka perusahaan perlu melakukan upaya pengembangan jaringan usaha. Oleh karena itu pihak pemerintah (instansi - instansi terkait), bekerja sama dengan KADIN Asosiasi untuk turut membantu dan memfasilitasi kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dengan pihak ; Perbankan, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan asuransi, serta lembaga bisnis lainnya.
  - f. Asosiasi Pariwisata sebagai induk organisasi dari para pengusaha atau UMKM, perlu mengambil peranan yang lebih aktif dalam memenuhi tuntutan dan memperjuangkan kebutuhan anggota terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, membangun jaringan (*network*) dan menjembatani kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung pengembangan usaha.
  - g. Mengingat salah satu tingkat keberhasilan aktivitas perusahaan adalah pegawai, maka tingkat kesejahteraan pegawai harus ditingkatkan.
  - h. Dalam pengembangan perusahaan ke depan, harus mampu melakukan upaya-upaya terobosan dan inovasi dalam aktivitas usahanya, sehingga bukan saja hanya melayani permintaan pengguna jasa di DKI Jakarta saja, melainkan ke Provinsi-Provinsi seluruh Indonesia bahkan ke Luar Negeri.

## 2. Bagi Peneliti Lainnya.

- a. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar atau pengetahuan bagi para peneliti yang melakukan penelitian sejenis.
- b. Perlu melakukan kajian penelitian dalam lingkup yang lebih mendalam dan lebih luas bukan hanya pada variabel-variabel yang sudah diteliti, melainkan perlu menambah variabel bebas dan variabel terikat lainnya.
- c. Dalam penelitian lanjutan perlu menggunakan objek dan daerah

penelitian yang lebih luas, serta jumlah sampel yang lebih banyak

- d. Melakukan wawancara langsung secara menyeluruh kepada responden yang dituju dan pihak lainya yang terkait serta dapat melibatkan diri dalam aktivitas perusahaan yang semestinya.
- e. Penelitian lebih lanjut tentang peningkatan kinerja UMKM sektor pariwisata, melalui upaya bersama dengan mitra usaha, dengan responden yang ditelitinya adalah perusahaan yang menjadi mitra usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cole, Stroma. 1997. *Cultural Heritage Tourism. The Villagers's Prespective : A Case Srudy from Ngada, Flores*. In Nuryanti (ed). *Tourism and Heritage Management*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. 2006. *Perencanaan Ekowisata. Dari Teori ke Aplikasi*. Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM dan Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Dong-Sung Cho dan Hwy-Chang Moon, 2003. *From Adam Smith to Michael Porter. Evolusi Teori Daya Saing*. Penerjemah : Erly Suandy. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Fazril, 2005. *Pengaruh Komponen Produk Wisata Danau terhadap Jumlah Kunjungan, Lama Tinggal dan Besarnya Pengeluaran Wisatawan serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Ekonomi Universitas Borobudur Volume 17 Februari 2005*. Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, Jakarta.
- Henderson, Joan. 2002. *Creating Experiences for Our Visitor : Tourist Guide Licensing and Training in Singapore*. Volume 1, Number 2, July 2002. ASEAN Journal and Hospitality and Tourism and Nanyang Technological University, Singapore.
- Martana, Salmon Priaji. 2002. *The Impact of Tourism on the Development of Ubud Painting Art*. Volume 1, Number 2, July 2002. ASEAN Journal on Hispitality and Tourism and Centre for Tourism Research, Institut Teknologi Bandung.
- Nafziger, E.W. 1997. *The Economics of Developing Countries*. Third Edition. Upper Saddle River, New Jersey.
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Prawirokusumo, S. 2001. *Ekonomi Rakyat. (Konsep, Kebijakan dan Strategi)*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Prodeaux, Bruce and Malcolm Cooper. 2002. *Ecotourism in Indonesia : A Strategy for Regional Tourism Development*. Volume 1, Number 2, July 2002. ASEAN Journal on Hispitality and Tourism and The University of Queensland, Australia.
- Rahmanita, Myrza. 2001. *Potensi Pengembangan Kepariwisataaan Cirebon sebagai Heritage Tourism Destination*. Bournemouth University, England. (unpublished).
- Silver, Christopher. 2002. *Tourism and Local Economic Development in the Era of Indonesia's Decentralization*. Volume 1, Number 2, July 2002. ASEAN Journal on Hispitality and Tourism and University of Illionis at Urbana-Champaign, USA.
- Tim Peneliti PMB-LIPI. 1998. *Potensi Sosial Ekonomi Budaya Dalam Pengembangan Industri Pariwisata*. Makalah untuk Seminar Evaluasi Proyek Pengkajian Masalah- Masalah Strategis di Bidang Politik dan Sosial Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

24 Maret-26 Maret 1998.

Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa : Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Vellas, Francois dan Becherel, Lionel. 2008. *Pemasaran Pariwisata Internasional. Suatu Pendekatan Strategis*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Wahab, S. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Alih Bahasa : Drs. Frans Gromang. Cetakan Keempat. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dinas Pariwisata DKI Jakarta 2018. *Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*. Dihimpun oleh : Hadi Setia Tunggal, SH. Harvarindo. Jakarta. <http://www.budpar.go.id>. *The Ultimate in Diversity Promotional Website*. <http://www.antara.co.id>. (2018). *Tourism Department preparing "Visit Indonesia Year"*. <http://www.aseanjournal.com>.



# STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Lustono

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen- UTY

## ABSTRAK

*Kawasan Tampo emas di desa Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kawasan ini memiliki karakteristik alam yang menarik, kehidupan sosial dan budaya yang unik. Potensi ini harus didorong dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat merupakan upaya strategis dalam membangun masyarakat. Pengembangan kawasan wisata tampo emas merupakan investasi jangka panjang dan potensial bagi pemerintah karena sumberdaya manusia dan sumberdaya alam sudah tersedia. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengembangan desa wisata kawasan tampo emas berbasis kearifan lokal terutama berkaitan dengan konsep kriteria desa wisata yang ada di desa Gentansari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, Forum Group Discussion (FGD), dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan tahapan reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Uji Validitas dan reliabilitas dilakukan melalui proses triangulasi. Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah, masyarakat desa Gentansari kawasan tampo emas, dan pengembang pariwisata yang berjumlah 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam prinsip-prinsip keorganisasian. Terdapat tiga prinsip pokok keorganisasian yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, dan kemandirian. Kriteria desa wisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata, pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran atau promosi. Dari kelima kriteria desa wisata di desa Gentansari, baru dua yang sudah berjalan maksimal yakni daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan ketiga kriteria lainnya masih memperoleh kendala.*

**Kata Kunci:** *Desa wisata; kearifan lokal; wisata kuliner (ekonomi kreatif)*

## PENDAHULUAN

Pengembangan wisata pedesaan yang berbasis pengembangan potensi alam, social, kuliner dan budaya lokal dapat menjadi pengembangan potensi masyarakat berbasis pariwisata. Pengembangan masyarakat berbasis wisata kuliner dapat mengikutsertakan peran dan partisipasi masyarakat pedesaan (Rorah, 2012). Hal ini sejalan dengan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan desa wisata yakni bagaimana masyarakat bisa didorong dan dikembangkan secara berkesinambungan, sehingga potensi yang dimiliki desa dan masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Melalui penggalan potensi desa dan masyarakat secara berkesinambungan maka pengembangan desa wisata dapat berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, perkembangan suatu kawasan wisata tidak lepas dari pengembangan dan penggalan potensi-potensi wisata itu sendiri mulai dilevel daerah atau yang paling rendah (Aditya, 2018:20).

Upaya untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya pembinaan secara sinergis antara para pelaku usaha ekonomi kreatif, wisata, dan pemerintah. Hal tersebut membuat para pelaku usaha ekonomi kreatif dan pariwisata akan dapat merencanakan, menyusun, memprogramkan desa wisata berbasis pada kemampuan masyarakat dan potensi desa. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi antarpihak yang berkepentingan sehingga dengan terjalannya koordinasi antarpihak maka tujuan pengembangan desa wisata ekonomi kreatif akan tercapai.

Kabupaten Banjarnegara merupakan kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Potensi ini bisa dilihat dari potensi sumber daya alam

dan sumber daya manusia. Selain itu, Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi keindahan alam yang sangat besar. Berdasarkan undang-undang nomor 21/2012 Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 Kecamatan diantaranya Kecamatan Pagedongan yang memiliki potensi wisata alam yang mempesona. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar menjadi desa wisata ekonomi kreatif adalah Desa Gentansari kawasan gunung tampo emas Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Kawasan ini sekarang sudah dijadikan sebagai Kawasan Wisata alam yang memiliki

keunikan dalam pelestarian alam dan kearifan lokal. Keunikan yang menjadi unggulan desa ini adalah destinasi wisata yang berbasis pada alam dan kearifan lokal bahwa kawasan ini dulu berupa gunung tampo emas. Kemudian pada tahun 70 an gunung ini diambil batunya untuk membangun proyek nasional pembuatan waduk jendral sudirman. Karena batunya diambil dengan menggunakan peledakan, maka bekasnya menjadi danau yang luas, unik dan menarik.

Kegiatan pariwisata tidak bisa lepas dari kebudayaan atau kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pariwisata akan terjadi interaksi budaya antara wisatawan dan masyarakat setempat. Seorang wisatawan berkunjung ke wilayah wisata yang kebudayaannya lebih tinggi dari kehidupannya maka akan terjadi pembelajaran budaya pada dirinya. Dalam hal ini, wisatawan tersebut memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kebudayaan yang ia miliki.

Dalam pengembangan desa wisata tampo emas, masyarakat setempat memiliki ketentuan atau aturan yang berlaku berdasarkan kepada adat dan kebiasaaa yang berkembang di wilayah ini. Kebiasaan atau tradisi yang dipegang oleh masyarakat adalah (a) alam adalah

sumber kehidupan bagi masyarakat; (b) kebersamaan dan kekeluargaan. Kedua prinsip ini menjadi pegangan bagi semua elemen masyarakat didalam mengembangkan desa wisata.

Dari kedua prinsip hidup ini dapat dijabarkan bahwa alam harus dijaga keseimbangannya, masyarakat adalah bagian dari alam. Oleh karena itu, dalam pengembangan desa wisata pelestarian alam merupakan hal pokok yang harus dijaga. Konsep ini menjadi sebuah pegangan bersama dan aturan yang harus dijalankan dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, menjaga keseimbangan alam merupakan *kearifan lokal* karena sudah menjadi keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka (Alfian 2013). Hal ini dapat ungkapkan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian

di atas dapat diartikan bahwa *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat/lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengembangan desa wisata yang didasarkan kepada adat dan kebiasaaya masyarakat di Desa Gentansari Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara.

## **METODE**

Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan pendekatan ini dengan pertimbangan bahwa sifat data penelitian mampu mempertahankan keutuhan dari obyek, artinya berbagai data yang berkaitan dengan penelitian dipahami sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu dengan kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell yang menyatakan bahwa “studi kasus merupakan strategi penelitian di

mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2010). Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Melalui metode ini, pemaparan data hasil penelitian akan dilakukan secara deskriptif berdasarkan fakta secara kualitatif.

Sumber data ditetapkan secara purposif dengan pertimbangan penetapan responden dengan mempertimbangan sifat khusus yang merupakan ciri pokok dari populasi. Pada penelitian ini ditetapkan 9 orang responden terdiri atas pihak pemerintahan 2 orang, pengelola desa wisata 5 orang, dan pelaku usaha wisata 2 orang. Mereka berperan sebagai informan yang bertindak langsung sebagai pengelola dan pengembangan desa wisata. Pengumpulan data penelitian melalui proses wawancara dan observasi secara langsung terhadap aktivitas masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dalam bentuk diskusi, bincang santai, dan tanya jawab. Data hasil penelitian lapangan

selanjutnya diolah, disusun, dan dianalisis sehingga data memiliki nilai bagi kehidupan masyarakat.

Untuk menambah wawasan penelitian ini, dilakukan kajian pustaka terkait permasalahan pengembangan desa wisata terutama berkaitan dengan konteks strategi dan proses pengembangan desa wisata. Konsep dan teori tentang kriteria desa wisata akan dijadikan dasar dalam analisis dan pembahasan data penelitian. Konteks tersebut terkait dengan kenyataan yang terkait dengan produk dan daya tarik wisata, kesiapan dan penerimaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, dan ketersediaan ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata merupakan data primer yang diperoleh dan dijadikan dasar dalam pengolahan data hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN DESA WISATA TAMPO EMAS GENTANSARI**

Pendirian kawasan wisata kuliner (ekonomi kreatif) merupakan langkah awal untuk menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada upaya dan usaha masyarakat. Melalui semangat kebersamaan dan kekeluargaan, masyarakat desa Gentansasi berusaha untuk membangun ekonomi kreatif dengan

mengembangkan kreatifitas dan inovasi dengan memanfaatkan potensi yang ada disekitarnya baik dari hasil olahan pertanian dan peternakan dan pemanfaatan barang bekas atau limbah rumah tangga sebagai modal bersama. Melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif yang ditunjang oleh lingkungan alam desa gentansari berkembang menjadi menjadi pendukung terhadap objek wisata Tampo emas. Pengembangan wilayah desa Gentansari menjadi desa wisata alam dimulai sejak tahun 2015.

Sejak tahun 2015 desa Gentansasi sudah menata diri menjadi sebuah Kawasan wisata alam. Pengembangan desa wisata digagas oleh sekelompok pemuda desa yang memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di wiliayahnya. Kelompok pemuda ini melihat bahwa para petani memiliki perekonomin yang sangat lemah. Mereka memiliki keterbatasan lahan pertanian, modal, dan pengetahuan tetang pertanian. Pada umumnya masyarakat petani di wilayah ini mengandalkan kehidupannya dari ladang dan sawah yang dikelola secara sederhana dan menanam seadanya. Dengan demikian kehidupan para petani sangat terbatas, dalam arti hanya bisa memenuhi kehidupan seadanya.

Melihat kondisi kehidupan masyarakat ini, para pemuda desa Gentansasi memiliki gagasan untuk membangun sebuah kawasan wisata. Pada awalnya gagasan para pemuda ini tidak mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintahan desa. Namun, dengan semangat kebersamaan yang dimiliki oleh kelompok ini pada akhirnya ada beberapa tokoh masyarakat dan pemerintahan desa mendukung kegiatan tersebut. Dengan kebersamaan yang dibangun kelompok pemuda maka pada akhir tahun 2005 berdirilah kelompok usaha ekonomi kreatif.

Melalui kegiatan kelompok ekonomi kreatif maka terjadi perubahan pengelolaan dan pengolahan hasil hasil pertanian dan peternakan. Sebelum terbentuknya kelompok ini hasil pertanian (kebun kopi, padi, dan kelapa dan lain lain), perikanan dan peternakan dijual begitu saja, sekarang sebagian besar hasil pertanian, perikanan dan peternakan sudah dilakukan pengolahan kebersamaan dan kekeluargaan, kemudian dijual di objek wisata di desa yaitu tampo emas, menggunakan manajemen kolektif dengan mengutamakan kebersamaan

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pada keterbatasan dalam pengembangan manajemen, proses pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produksi ekonomi kreatif belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat dalam peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi, efisiensi keuangan, pengembangan jaringan usaha, dan pemasaran belum berjalan dengan maksimal. Namun, sebagai cikal-bakal kawasan wisata Tampo emas, Kelompok usaha ekonomi kreatif berusaha untuk menggabungkan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi alam maupun potensi sumberdaya manusia. Penggabungan seluruh potensi ini dengan cara membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Langkah awal yang dilakukandalam membangun desa wisata adalah melakukan sosialisasi dan diskusi dengan seluruh lapisan masysrakat. Hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam setiap pertemuan adalah batasan kawasan wiasata tampo emas, ruang lingkup desa wisata, visi dan misi, tujuan, dan strategi agar wisata tampo emas ini banyak dikunjungi wisatawan.

Melalui proses sosialisai yang mengedepankan sistem kekeluargaan

maka masyarakat desa gentansari sangat memahami bahwa pengembangan kawasan wisata tambo emas wisata yang ada di desanya dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan desa wisata maka bisnis pertanian dan peternakan, produk ekonomi kreatif akan semakin berkembang yang mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Hal tersebut akan memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep desa wisata. Desa Wisata adalah suatu kawasan yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung. Setiap unsur tersebut disajikan dalam satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat tanpa melepaskan tata aturan kehidupan atau tradisi dan budaya masyarakat setempat (Wihasta, 2012). Selain itu, desa wisata dapat dimaknai sebagai sebuah kawasan dengan keunikan dan kehasan yang dimiliki, dikelola, dan disajikan secara menarik dan unik.

### **Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Wisata Tambo Emas**

Setiap destinasi wisata sering tidak dapat mempertahankan keaslian dan keunikan dari budaya dan

kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena struktur sosial masyarakat mengalami perubahan atau penambahan produk sesuai dengan pengembangan usaha wisata. Tidak sedikit produk baru tersebut dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat yang seharusnya tetap dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, perlu diperlukan pemikiran mengenai langkah-langkah masyarakat dan pemerintah supaya pengembangan destinasi wisata tidak mengubah karakteristik objek wisata maupun kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya.

Pada umumnya budaya lokal memiliki nilai-nilai yang tinggi, baik nilai yang bersifat filosofis maupun sosiologis. Dapat dikatakan budaya lokal merupakan sesuatu yang eksotis. Kata eksotis diartikan sebagai yang asing, atau belum diketahui orang banyak sehingga merangsang rasa ingin tahu (Spillane 1994). Keindahan alam, kehidupan sosial, kekayaan spiritual merupakan daya tarik yang bisa mengundang rasa ingin tahu masyarakat luar. Oleh karena itu, ke eksotisan ini harus ditampilkan dalam keaslian sehingga menjadi daya tarik utama dalam destinasi wisata.

Untuk menjaga kelestarian nilai kearifan lokal di kawasan

wisata, harus melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan pariwisata yang berbasis masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membangun kelompok masyarakat yang aktif dan peduli terhadap kegiatan pelestarian kawasan wisata. Keterlibatan Masyarakat dalam kelompok ini sebagai wujud kongkrit tindakan masyarakat yang peduli terhadap kawasan wisata sekaligus potensi sumber daya alam lainnya. Melalui sebuah komunitas pemeliharaan kelestarian alam bisa diwujudkan. Wujud kearifan lokal ada di dalam kehidupan masyarakat yang mengenal dengan baik lingkungannya, masyarakat hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, memahami cara memanfaatkan sumberdaya alam secara arif dan bijaksana. Kearifan lokal dalam wujud pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan merupakan wujud konservasi masyarakat.

Kelompok ekonomi kreatif merupakan kelompok usaha sekaligus penggerak desa wisata di Desa gentansasi Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara. Kelompok ekonomi kreatif dalam menjalankan roda organisasinya memiliki prinsip yang jelas dan tegas. Prinsip tersebut adalah keanggotaan bersifat terbuka

dan sukarela, manajemen organisasi dilaksanakan secara demokratis, dan kemandirian. Berpegang pada prinsip ini, maka Kelompok ekonomi kreatif membangun standar dan pendukung desa wisata. Semua prinsip ini tergambar di dalam misi wisata tampo emas yakni "mewujudkan usaha ekonomi kreatif unggul bersama masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan sdm, sosial ekonomi dan ekologi". Hal ini sesuai dengan pendapat Putri dan Rorah yakni Desa wisata harus memiliki kriteria-kriteria dan faktor-faktor pendukung seperti potensi produk/obyek dan daya tarik wisata yang unik dan khas, tingkat penerimaan dan komitmen yang kuat dari masyarakat setempat, potensi sumber daya manusia lokal yang mendukung, peluang akses terhadap pasar wisatawan, ketersediaan area/ ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata ( Putri& Rorah, 2013).

Pengelolaan dan pengembangan desa wisata tampo emas memiliki empat prinsip utama yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, manajemen organisasi dilaksanakan secara demokratis, dan kemandirian. (a) Prinsip yang pertama adalah keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, hal ini menggambarkan



bahwa keanggotaan didalam Kelompok usaha ekonomi kreatif yang memiliki program bahwa tidak dibatasi baik jumlah maupun sifat kenaggotaan. Siapapun bisa menjadi anggota kelompok ekonomi kreatif tanpa melihat status dan profesinya selama memiliki semangat kebersamaan didalam membangun desa.

Melalui prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarena ini maka dibangun komitmen keanggotaan menjadi lebih kuat. Selain itu, masyarakat memiliki komitmen terhadap seluruh program termasuk pada program pengembangan desa wisata. Hal ini menjadi modal awal yang besar di dalam membangun sebuah desa wisata. Modal utama pengembangan desa wisata adalah terdapatnya penerimaan dan komitmen dari masyarakat setempat pada kegiatan pariwisata. Hal ini berarti terdapat sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat terhadap aktivitas pariwisata. Dalam aktivitas pariwisata akan terjadi komunikasi dan interkasi antara masyarakat setempat dengan wisatawan. Hal tersebut membuat masyarakat setempat harus sudah siap menerima perubahan sosial yang akan terjadi

dengan tetap dalam koridor sosial budaya lokal.

Untuk membangun masyarakat memiliki sikap terbuka terhadap pariwisata, perlu adanya motivasi yang kuat dari masyarakat setempat. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki motivasi dalam menjaga karakter dari lingkungan fisik alam pedesaan, sosial, dan budaya yang berkembang pada masyarakat. Motivasi masyarakat merupakan faktor yang mendasar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Apabila motivasi melestrikan itu tidak berkembang maka keunikan dari lingkungan sosial dan budaya akan hilang. Apabila hal itu terjadi, para wisatawan tidak akan tertarik lagi untuk berkunjung sehingga kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung kembali.

(b) Prinsip yang kedua yaitu manajemen organisasi dilaksanakan secara demokratis. Dalam konteks manajemen organisasi, kelompok ekonomi kreatif ini mengedepankan kebersamaan didalam mencapai tujuan bersama. Pengelola kelompok ekonomi kreatif tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan seluruh roda organisasi, melainkan hanya sebagai pelaksana roda organisasi. Adapun yang dilaksanakan

di dalam organisasi adalah semua hasil kesepakatan bersama. Semua ini telah menjadi sebuah kesepakatan bahwa pengelola kelompok ekonomi kreatif merupakan representasi dari seluruh anggota, sehingga pengelola harus menjalankan apa yang telah disepakati anggota. Semua ini sudah tertuang didalam misi organisasi yakni *mewujudkan usaha ekonomi kreatif unggul bersama masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan SDM, sosial, ekonomi, dan ekologi.*

Didalam misi ini sudah tergambar secara jelas mengenai gambaran tujuan organisasi yakni pemberdayaan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Peningkatan kesejahteraan ini dicapai secara demokratis melalui peningkatan produksi ekonomi kreatif yang unggul. Hal ini merupakan sebuah gambaran pelaksanaan demokrasi kerakyatan yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Sifat kebersaan dan kekeluargaan sangat kental dan terasa didalam pelaksanaan semua aktivitas organisasi.

(c) Prinsip yang ketiga adalah kemandirian. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk membangun rasa percaya diri terhadap potensi diri dan

lingkungannya. Melalui prinsip ini, masyarakat dituntut untuk mampu menggali semua potensi yang ada untuk dikembangkan menjadi modal dasar didalam meningkatkan ekonomi kemasyarakatan sebagai penunjang kemajuan desa. Dalam pengembangan desa wisata tampo emas, pengelola memotivasi masyarakat untuk terus berkembang didalam sektor usaha masing-masing dengan konsep saling mendukung dan menunjang. Hal ini tertuang dalam misi kelompok ekonomi kreatif terutama misi kesatu dan kedua yaitu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok ekonomi kreatif.

Prinsip yang ketiga ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pengusaha ekonomi kreatif, maupun sebagai pengembang desa wisata. Hal ini sesuai pula dengan salah satu standar pengembangan desa wisata yaitu tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas yang cukup dalam mengembangkan desa wisata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan mendorong terhadap peningkatan kapasitas dan produktifitas sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan sosial ekonomi masyarakat secara otomatis

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat desa Gentansari akan merasakan secara langsung dampak positif dari pengembangan desa wisata tampo emas.

Berdasarkan kepada ketiga prinsip yang dikembangkan oleh Kelompok ekonomi kreatif ini, manfaat yang dapat dirasakan masyarakat adalah (a) meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; (b) peningkatan sosial ekonomi; (c) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia baik pengetahuan, keterampilan dan jiwa entrepreneur; (d) berjalannya konteks demokratis dalam menjalankan organisasi.

### **Pengembangan Wisata Desa Gentansari**

Pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang (Fandeli, 1995). Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan daya tarik, aksesibilitas, dan fasilitas yang

mendukung rekreasi, wisatawan, dan penduduk setempat saling diuntungkan.

### **1. Daya Tarik**

Objek dan daya tarik wisata adalah modal utama yang harus dimiliki suatu kawasan pengembangan wisata. Dengan kondisi alam dan sumberdaya dukung lainnya desa Paledah berusaha mengembangkan wilayah ini menjadi desa wisata. Dengan dimotori oleh kelompok ekonomi kreatif maka desa ini membangun desa wisata tampo emas. Desa wisata Tampo emas yang menitikberatkan menjadi desa wisata ekonomi kreatif. Hal yang menjadi daya tarik utama adalah kondisi alam dan produksi ekonomi kreatif masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, yang menjadi daya tarik utama adalah panorama alam dan produk hasil buatan manusia.

Berdasarkan hal itu, potensi pariwisata agro yang dikembangkan bisa dibagi dalam dua kelompok besar yakni potensi wisata alam dan potensi wisata produk buatan manusia, (a) potensi alam dikembangkan adalah karagaman kekayaan alam, tampo emas, perkebunan (kopi dan kelapa), pertanian (pepaya, jagung, padi, dan kedelai), peternakan (kambing, entog, itik, sapi). dan (b) produk ekonomi

kreatif yang dikembangkan yakni segala produk yang dihasilkan dari kreatifitas manusia seperti pengolahan pupuk organik, kuliner makanan olahan dan kerajinan, kesenian, , rumah makan, warung tani, penginapan, rental alat transportasi.

## 2. Aksesibilitas

Aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana prasarana termasuk transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata (Muttaqin, 2013). Gambaran aksesibilitas dapat tergambarkan dari segi geogefafis. Gambaran kawasan wisata tampo emas desa Gentansasi secara geogefafis merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara . Jarak desa dari Ibu Kota Kecamatan sekitar 4 KM. Bila dilihat dari sarana transportasi menuju desa ini masih kurang. Hal ini terlihat dari belum adanya sarana angkutan umum secara regular. Selain itu, akses jalan yang belum mendukung “sebagian besar jalan dalam keadaan rusak dan ukuran jalan yang kecil” menjadi faktor penghanbat untuk menuju desa wisata. Sarana lain yang belum tersedia adalah petunjuk jalan menuju desa wisata. Tidak adanya rambu-rambu dan gerbang

(gapura) masuk kampung wisata ini menjadi salah satu kesulitan para wisatawan untuk sampai di lokasi wisata.

## 3. Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata

Proses pengembangan desa wisata tidak bisa terlepas dari proses pengembangan fasilitas pendukung wisata seperti transportasi, akomodasi berupa *homestay*, fasilitas layanan publik, kesenian, dan sebagainya harus dikembangkan sejalan dengan pengembangan desa wisata. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena aktifitas wisata pedesaan akan dapat berjalan baik dan menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal dan berkomunikasi dengan masyarakat, sekaligus mempelajari mengenai budaya dan produk-produk ekonomi kreatif.

Fasilitas yaitu semua jenis sarana yang khusus ditujukan untuk mendukung, mempermudah, mendukung kenyamanan dan keselamatan wisatawan pada saat berkunjung ke daerah wisata. Fasilitas yang ada baik menuju maupun di lokasi wisata masih sederhana. Fasilitas di lokasi wisata baru direncanakan dan akan

dikembangkan. Sarana yang akan dikembangkan sebagai penunjang desa wisata adalah kuliner makanan olahan dan kerajinan, rumah makan, kesenian dan atraksi-atraksi seni, rental transportasi, dan rumah tinggal wisatawan (*homestay*). Penyediaan fasilitas ini belum bisa dilaksanakan karena terkendala anggaran dan sumberdaya lainnya. Namun semua fasilitas ini sudah masuk di dalam perencanaan pengembangan desa wisata Tampo emas.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek wisata (Dewi, 2013). Pengembangan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat desa harus memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Hal ini harus dijalankan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pariwisata (Dalimunthe, 2007). Keterlibatan masyarakat ini bisa dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat.

Pemberdayaan dan pengembangan desa wisata digarisbawahi oleh Murphy (1988). Ia menyatakan bahwa pengembangan kegiatan pariwisata merupakan “kegiatan yang berbasis komunitas”. Hal ini berarti bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal merupakan unsur penggerak utama kegiatan pariwisata.

Proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi di desa Gentansari dapat terlihat dari proses pendirian desa wisata yang di motori oleh para anggota kelompok ekonomi kreatif. Pendirian kawasan wisata tampo emas sebagai langkah awal dalam upaya penggalangan kekuatan ekonomi masyarakat yakni dengan memanfaatkan panoram alam bekas galian gunung tampo emas untuk membuat bendungan waduk Jendral sudirman yang belokasi di desa Bawang kecamatan bawang kabupaten Banjarnegara. Kemudian ditunjang, proses pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas produksi ekonomi kreatif belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat pula dalam peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi, efisiensi keuangan, pengembangan jaringan usaha, dan pemasaran belum berjalan. Keberhasilan tampo emas desa Gentansari sebagai desa wisata

tidak lepas dari peran serta masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dengan kesadaran sendiri mengelola dan mengembangkan kawasan tampo emas ini menjadi salah satu objek wisata. Dengan semangat kebersamaan seluruh masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan obyek wisata tampo emas.

## **5. Pemasaran dan Promosi**

Kegiatan promosi merupakan kegiatan yang intensif sebagai usaha memperkuat daya tarik produk wisata kepada calon wisatawan. Saat ini, pelaksanaan promosi masih hanya komponen-komponennya dari desa wisata seperti panorama alam berupa danau bekas galian batu gunung tampo emas, produk-produk ekonomi kreatif, atraksi, dan transportasi. Seharusnya komponen ini diramu sehingga menjadi paket wisata yang komprehensif dan menjadi media promosi langsung. Promosi ini harus dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan dengan pemasaran produk wisata.

Aktivitas promosi di wisata tampo emas belum terstruktur/ terencana secara baik. Hal ini terjadi karena aktivitas promosi belum menjadi program kerja kelompok ekonomi kreatif. Oleh karena itu, aspek isi pesan dan media

penyampaian pesa promosi belum diperhatikan. Sementara ini, promosi mengenai desa wisata yang digunakan melalui media yang sederhana yakni brosur dan pesan dari orang ke orang.

## **KESIMPULAN**

Ekonomi kreatif dalam pengembangan wisata Tampo emas di desa gentansasi, kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam prinsip-prinsip keorganisasian. Terdapat tiga prinsip pokok keorganisasian yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, manajemen organisasi dilaksanakan secara demokratis, dan kemandirian. Kriteria desa wisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata, pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif, dan pemasaran atau promosi. Dari kelima kriteria wisata Tampo emas desa gentansasi baru dua yang sudah berjalan maksimal yakni daya tarik wisata dan pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif. Sedangkan ketiga kriteria lainnya masih memperoleh kendala. Kendala terbesar untuk menjalankan ketiga kriteria tersebut adalah minimnya sumberdaya manusia kopenten dibidang pariwisata dan keterbatasan anggaran.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adityaji, R. (2018). Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Menggunakan Metode Analisis SWOT: Studi Kasus Kawasan Pecinan Kapasan Surabaya. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(1). doi:10.26905/jpp.v3i1.2188
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hutan, P. (2003). Pedoman Analisis Daerah Operasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA). *Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Bogor*
- Muttaqin, T., Purwanto, R. H., & Rufiqo, S. N. (2013). Kajian potensi dan strategi pengembangan ekowisata di cagar alam Pulau Sempu Kabupaten Malang provinsi Jawa timur. *Jurnal Gamma*, 6(2)
- Putri, H. P. J., & Manaf, A. (2013). Faktor-faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata di Dataran Tinggi Dieng. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 2(3), 559-568
- Romani, S. (2006). Penilaian potensi obyek dan daya tarik wisata alam serta alternatif perencanaannya di taman nasional bukit duabelas Provinsi Jambi
- Rorah, D. N. P. (2012). *Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Wisata Kebonagung Kecamatan Imogiri* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial)
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Travers, M. (2001). *Qualitative Research Through Case Studies*, London: Sage Publications, hal. 9-10. Bandingkan dengan dengan konsepsi Neuman, Lawrence W (1994), *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approachs*. Boston: Allyn and Bacon, hal. 62
- Wihasta, C. R., & Prakoso, H. B. S. (2012). Perkembangan Desa Wisata Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Donokerto Kecamatan Turi. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1)

# STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU

**Sotya Partwi Ediwijoyo**

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen-UTY

wien.sotya@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to determine licensing services at Investment and Integrated One Stop Services Office, Kebumen Regency as measured using the Community Satisfaction Index. This research is a type of descriptive research using Community Satisfaction Index analysis based on Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia No. 14/2017 concerning Guidelines for Community Satisfaction Survey Unit of Public Service Providers. The study was conducted in 26 Districts of Kebumen Regency with 374 respondents using licensing services. From the results of the study it can be seen that the Community Satisfaction Index for licensing services obtained a result of 82.15, in the Service Quality index the figure is in the category between 76.61-88.30 which means "Good". Then the performance of licensing services in Kebumen Regency is in the category of good service quality.*

**KEYWORDS:** Licensing services, Public services, Community Satisfaction Index

## 1. PENDAHULUAN

Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladminsitrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan terpenuhinya standar pelayanan publik

tersebut, harapannya hanyalah mewujudkan Indonesia menjadi welfare state yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap ketimpangan yang ada.

Sejurus dengan hal tersebut, Undang-Undang tersebut juga mengatur 9 hak masyarakat/pengguna pelayanan publik. Salah satunya, masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Hak inilah yang menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik. Tanpa pengaturan hak ini pun, sebenarnya fungsi pengawasan pelayanan publik telah melekat kepada masyarakat. Ini dikarenakan sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil pajak yang disetorkan masyarakat sehingga secara otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



Pemerintah sebagai “public service” harus mewujudkan tugas pelayanan tersebut dalam kinerja pemerintah daerah dan diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat secara menyeluruh dan mampu memberikan kenyamanan dan keamanan. Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Maka cukup jelas, bahwa pelayanan harus mampu dilaksanakan baik oleh Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Masyarakat selama ini memiliki persepsi bahwa pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah cenderung kurang bahkan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan atas perilaku oknum aparat pemerintah yang memberikan pelayanan. Selain pelayanan yang berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, salah satu keluhan yang sering terdengar adalah perilaku oknum aparat yang sering kurang bersahabat. Realita tersebut memerlukan kepedulian aparatur pemerintah agar masyarakat memperoleh layanan prima. Kepriimaan layanan selanjutnya akan mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan pelanggan.

Beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat adalah memperlambat proses penyelesaian pemberian izin, mencari

Berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis, alasan kesibukan melaksanakan tugas lain, sulit dihubungi, senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dapat menjadi faktor penentu berlangsungnya suatu organisasi birokrasi pemerintahan di DPMPTSP Kabupaten Kebumen, berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Daerah.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Berbagai keluhan dari masyarakat mengindikasikan bahwa pemerintah sebagai abdi masyarakat belum menjalankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan. Padahal masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Untuk itu perlu adanya evaluasi mengenai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penilaian kinerja pelayanan publik berdasarkan perspektif pemberi layanan dewasa ini tidak lagi menjadi alat ukur yang dominan, tetapi seiring dengan tuntutan good governance dan demokrasi maka penggunaan perspektif pengguna layanan dalam menilai kinerja

pelayanan publik sudah menjadi suatu keharusan sebagai tolak ukur menilai kinerja pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan perbaikan iklim investasi di daerah khususnya di bidang administrasi pelayanan perizinan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah kebijakan antara lain melalui penertiban peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman peningkatan pelayanan terpadu satu pintu dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah yang esensinya mewajibkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk membentuk perangkat daerah berupa lembaga pelayanan perizinan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instansi yang dibentuk Pemerintah Daerah dengan maksud agar pelayanan perizinan dan non perizinan sudah melalui pelayanan terpadu satu pintu sehingga pelayanan masyarakat khususnya di bidang perizinan tidak berbelit-belit dan menyusahkan.

Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Pelayanan publik yang ada harus dapat mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Jumlah staf/aparat yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak pada level menengah dan level atas agar pelayanan publik dapat tepat sasaran. Pelayanan yang diberikan juga harus mendekatkan birokrasi dengan masyarakat pelanggan. Dengan

demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Sinambela, 2010). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut memuaskan (Lupiyoadi, 2001).

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1. Pelayanan Publik**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Pelayanan publik menurut Agung Kurniawan (2005) adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang

telah di tetapkan. Masyarakat berharap bahwa pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran, pengelolaan anggaran secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yakni sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Crosby, Lethimen dan Wyckoff, mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai penyesuaian terhadap perincian-perincian dimana kualitas ini dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai. Dilakukannya kontrol terus menerus dalam mencapai keunggulantersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Secara substansial kualitas pelayanan didefinisikan sebagai bentuk siap, yang diperoleh dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang nyata-nyata mereka terima dengan layanan yang mereka harapkan.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu: Primer dan Sekunder. Primer adalah semua

penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. Sekunder adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Pelayanan birokrasi akan menyentuh ke berbagai segi kehidupan masyarakat, demikian luasnya cakupan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah maka mau tidak mau pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik. Inti dari pelayanan masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi tersebut. Pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk berempati kepada masyarakat. Empati mengandung pengertian sebagai kesanggupan dari birokrat pemerintah untuk menempatkan dirinya dari pihak masyarakat dan melihat hal-hal atau masalah-masalah dari sudut pandangan masyarakat. Melalui empati yang dilakukan oleh pegawai itu akan menuntut kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasar prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.
2. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
3. Keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan, unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Efisiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
6. Ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan: nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan dan pemerataan, yang dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Ketepatan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

## **2.2. Good Governance Dan Pelayanan Publik**

Paradigma dalam membahas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan pergeseran paradigma dari perspektif state menjadi governance. Denhardt dan Denhardt (2003) melihatnya mulai dari Old Public Administration, New Public Management dan yang terakhir New Public Service. Sejalan dengan itu Tony Bovaird dan Elke Loffler juga mengemukakan tiga pendekatan dalam pelayanan publik, yaitu Public Administration, Public Management dan Public Governance. Dari beberapa pandangan dan pendekatan di atas, pada intinya memperlihatkan bahwa adanya pendekatan baru berupa pelayanan publik yang lebih demokratis, dan bertatakelola baik (good governance).

Keterkaitan antara konsep good-governance (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) sudah cukup jelas logikanya. Laporan Daniel Kaufman<sup>6</sup>, misalnya, dari hasil survai di ratusan

negara menunjukkan bahwa unsur- unsur tata pemerintahan yang baik antara lain mencakup pemenuhan hak- hak politik warganegara, kemampuan negara untuk mengendalikan korupsi birokratis, membuat peraturan yang kondusif, dan yang tidak kalah pentingnya ialah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Berbagai pemahaman tentang tata pemerintahan yang baik sudah banyak didiskusikan. Misalnya, Canada International Development Agency (CIDA) telah mendefinisikan tata pemerintahan yang baik sebagai cara dimana kekuasaan digunakan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial di sebuah negara. Tata pemerintahan yang baik adalah penggunaan kekuasaan di semua tingkatan pemerintah secara efektif, jujur, kesamaan, transparan dan akuntabel. Ada empat karakteristik untuk menempatkan tata pemerintahan yang baik itu yaitu: Pertama, legitimasi dalam hal penerimaan otoritas kekuasaan publik, termasuk di dalamnya segala aturan, proses dan prosedur yang ada. Kedua, akuntabilitas publik terhadap kekuasaan dan legitimasinya dengan memperhatikan proses pemegang kekuasaan dan prosedur dari pembuatan kebijakan. Ketiga, manajemen yang efektif dalam dimensi teknis. Efektivitas menjadi hal penting dengan mengacu birokrasi publik yang berdaya dan efisien, dalam menentukan prioritas dan sumber daya publik. Keempat, ketersediaan informasi antara semua lini termasuk kelompok masyarakat sipil dan pemerintah untuk menilai efektifitas dari kekuasaan dan birokrasinya.

### **2.3. Konsep Pelayanan Publik Di DPMPTSP Kab. Kebumen**

Berkaitan dengan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai tolak ukur seberapa jauh kualitas pelayanan, yang merupakan pendorong setiap penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat karakteristik yang berbeda, sehingga menimbulkan pendapat dari masyarakat yang memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan yang diterima masyarakat.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif sekaligus dapat membangun kualitas manusia.

Arah pembangunan kualitas manusia adalah dengan memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mengatur dan menentukan masa depannya sendiri.

Pelayanan publik di DPMPTSP memiliki slogan “SMILE” yang merupakan akronim dari : Semangat, Mumpuni, Inovatif, Loyal, Empati. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki instansi tersebut.

Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di “Front Office”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat, tetapi juga dari para pegawai di “Back Office” yang melakukan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu: fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum. Fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, fungsi utamanya memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat. Fungsi pembangunan berhubungan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan, fungsi pokoknya adalah *development function* dan *adaptive function*. Fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas- tugas pemerintahan umum (regulasi), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban, fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*). Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

### 3. METODOLOGI

Metode penyusunan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif (*quantitative approach*) melalui proses pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi mengenai fenomena pada saat sekarang (*existing condition*) secara obyektif. Tujuannya untuk menyusun gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sehingga diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk penyelenggaraan pelayanan di tahun 2019.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 yang dimaksud dengan responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi

Berikut ini data responden penerima pelayanan perizinan:

Tabel 3.1. Data responden

<b>Data Responden</b>		
Jenis Kelamin	Laki	256
	Perempuan	118
Pendidikan	SD & SLTP	86
	SLTA	121
	Sarjana/Diploma	167
Usia	< 40	140
	41-56	93
	>57	66

Sumber: Data diolah, 2019

unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Dalam survei ini, responden adalah masyarakat yang sudah memperoleh layanan perizinan. Adapun untuk besaran sampel dan populasi diatur dengan menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Survei dilaksanakan dengan 374 responden yang tersebar di 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen, dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 256 responden. Rata-rata responden ini mempunyai latar belakang pendidikan SMA/SLTA sebanyak 121 responden dan mayoritas responden mempunyai latar belakang pendidikan Diploma/Sarjana sebanyak 167 responden dengan mayoritas usia dibawah 41 tahun.

Untuk pengolahan data, merujuk pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017, tentang tata cara pengolahan data, yaitu untuk setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Untuk memperoleh nilai SKM

unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25. Nilai mutu pelayanan berdasarkan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Nilai Mutu Pelayanan

MUTU PELAYANAN		
A	Sangat baik	88,31 – 100
B	Baik	76,61 - 88,30
C	Kurang baik	65,00 - 76,60
D	Tidak baik	25,00 - 64,99

Sumber: Permenpan RB No. 14 (2017)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan keinginan dan inspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kondisi yang seperti digambar diatas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive, dan adaptif dan sekaligus dapat membangun “kualitas manusia” dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan

dengan kehidupan manusia (Poltak Lijan Sinambela, 2006). Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menuntut kualitas tertentu. Pelayanan yang diselenggarakan

pengelola melalui aparatnya, walaupun tidak bertujuan mencari keuntungan namun tetap harus mengutamakan

kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Hasil survei kepuasan masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk tahun 2019 ini dengan total responden sebanyak 374 pengguna jasa pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen menunjukkan nilai sebesar 82,15 yang berarti “Baik”.

Tabel 3.1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di DPMPTSP

	TAHAP 3
<b>UNSUR KEPUASAN MASYARAKAT</b>	<b>N= 374</b>
Persyaratan	8,56
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	8,58
Waktu Penyelesaian	8,82
Biaya/Tarif	9,26
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	9,33
Kompetensi Pelaksana	9,08
Perilaku Pelaksana	9,40
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	9,19



Sarana dan prasarana	9,92
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>82,15</b>

Sumber: Data diolah, 2019

Beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat adalah memperlambat proses penyelesaian pemberian izin, mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis, alasan kesibukan melaksanakan tugas lain, sulit dihubungi, senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”. Masyarakat sebagai pengguna jasa/layanan tidak memiliki kemampuan apapun untuk berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada pengelola pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa konteks *after sales services* atau layanan purna jual yang merupakan satu kesatuan dari konsep pelayanan publik, masih belum menjadi acuan yang cukup penting di DPMPTSP. Adanya peraturan perundangan yang baru dalam penerbitan izin tertentu, belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik. Banyak masyarakat pengguna izin mengeluhkan perubahan tersebut, terutama dengan sudah tidak diberlakukannya lagi HO atau izin gangguan yang diganti dengan penerbitan izin lingkungan. Perubahan ini belum sepenuhnya dapat dipahami masyarakat pengguna layanan perizinan, mengingat dalam penerbitan izin lingkungan dengan menggunakan system layanan OSS, harus mendapatkan rekomendasi teknis dari OPD terkait, maka DPMPTSP yang bertugas sebagai pelayanan administrasi tidak dapat mengendalikan jangka waktu

pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna izin. Demikian juga dengan permohonan izin mendirikan bangunan yang terkendala dengan harus adanya atau sudah diterbitkannya izin lingkungan. Prosedur dan persyaratan ini dianggap masyarakat cukup memberatkan dan melelahkan. Karena syarat dan aturan yang harus dipenuhi tidaklah mudah dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Sehingga dalam unsur persyaratan dan prosedur serta jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan menjadi rendah nilainya.

Meskipun masyarakat sudah menyadari tentang persyaratan yang harus dipenuhi, namun dalam mengajukan perizinan tertentu, masih diperlukan beberapa persyaratan yang melibatkan instansi atau organisasi perangkat daerah lainnya. Hal ini terkadang membingungkan masyarakat pengguna jasa, karena konotasi dari pelayanan terpadu dengan konsep OSS atau online single submission tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena dalam memenuhi persyaratan tersebut, mereka harus berurusan dengan OPD lain yang juga dalam hal untuk menerbitkan surat atau rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan oleh DPMPTSP. Untuk memenuhi persyaratan tersebut masyarakat harus mengurus sendiri ke instansi tersebut, dan dalam perjalanan pengurusannya terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Jangka waktu masih menjadi keluhan yang sering diungkapkan masyarakat pengguna jasa. Beberapa diantaranya mengeluhkan tentang jangka waktu pada saat proses pengurusan perizinan yang membutuhkan pengecekan lapangan oleh petugas dan tim teknis. Petugas tidak dapat memberitahukan secara pasti kapan waktunya pengecekan ke lapangan setelah berkas persyaratan

dimasukkan. Hal ini akan mempengaruhi jangka waktu keluarnya izin yang diajukan. Masyarakat juga mengeluh tentang jangka waktu pembuatan dikarenakan tidak satu hari jadi terkadang melebihi dari satu hari. Selain itu masyarakat pengguna jasa mengeluhkan tidak adanya komunikasi dalam hal pemberian kabar saat izin telah keluar.

Dalam hal biaya, dikarenakan pengenaan biaya untuk izin yang diajukan hanya ditetapkan pada beberapa izin saja seperti IMB dan izin penggunaan kekayaan daerah, sedangkan untuk pengajuan izin lainnya tidak dikenakan biaya. Tetapi pada proses pengajuan izin yang berkaitan dengan instansi teknis lain, timbul biaya yang besaran nilainya terkadang tidak sama. Keluhan yang umum terjadi adalah besaran biaya yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pengurusan izin IMB yang sama di kabupaten lainnya.

Kualitas pelayanan seringkali menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan prima. Kualitas ini tidak hanya tentang prosedur tetapi lebih kepada para pelaksana yang berada di front office sebagai ujung tombak pelayanan maupun di back office yang merupakan pendukung utama keberhasilan pelayanan. Dibutuhkan kepekaan terhadap setiap permasalahan yang timbul akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur perizinan, sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami ruang lingkup perizinan dan prosedur yang terjadi. Untuk itu diperlukan kemampuan komunikasi, ketepatan dalam menanggapi dan menangani permasalahan oleh para petugas.

Mengacu pada beberapa hambatan yang terjadi, khususnya pada

permasalahan di prosedur perizinan yang mencantumkan beberapa persyaratan yang melibatkan OPD lain, seringkali membuat masyarakat pengguna jasa enggan mengurus sendiri perizinan yang mereka perlukan. Walaupun seringkali sudah diberitakan di beberapa media masa akan kemudahan pembuatan izin/proses perizinan, bahkan dengan penggunaan teknologi dalam pembuatan izin, tetapi hal ini tidak menjadikan masyarakat pengguna jasa untuk mengajukan izin sendiri. Selain keterbatasan waktu, terkadang ketidaktahuan terhadap persyaratan yang diajukan membuat masyarakat pengguna jasa menggunakan tenaga perantara dalam pengurusan izin, walaupun untuk itu mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.

Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

DPMPSTSP menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui

tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Kebumen dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan untuk perbaikan layanan publik. Dalam melakukan perbaikan layanan diawali dengan melakukan evaluasi terhadap kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Secara keseluruhan untuk tahun 2019 ini dengan total responden sebanyak 374 pengguna jasa pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen, memperoleh hasil sebesar 82,15, dalam indeks Mutu Pelayanan angka tersebut berada pada kategori antara 76,61-88,30 yang berarti “Baik”.

Peraturan perundangan yang baru dalam penerbitan izin tertentu, belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik. Banyak masyarakat pengguna izin mengeluhkan perubahan tersebut, terutama dengan sudah tidak diberlakukannya lagi HO atau izin gangguan yang diganti dengan penerbitan izin lingkungan. Perubahan ini belum sepenuhnya dapat dipahami masyarakat pengguna layanan perizinan, mengingat dalam penerbitan izin lingkungan dengan menggunakan system layanan OSS, harus mendapatkan rekomendasi teknis dari OPD terkait, maka DPMPTSP yang bertugas sebagai pelayanan administrasi tidak dapat

mengendalikan jangka waktu pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna izin. Demikian juga dengan permohonan izin mendirikan bangunan yang terkendala dengan harus adanya atau sudah diterbitkannya izin lingkungan. Prosedur dan persyaratan ini dianggap masyarakat cukup memberatkan dan melelahkan. Karena syarat dan aturan yang harus dipenuhi tidaklah mudah dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Sehingga dalam unsur persyaratan dan prosedur serta jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan menjadi rendah nilainya.

Jangka waktu masih menjadi keluhan yang sering diungkapkan masyarakat pengguna jasa. Beberapa diantaranya mengeluhkan tentang jangka waktu pada saat proses pengurusan perizinan yang membutuhkan pengecekan lapangan oleh petugas dan tim teknis. Petugas tidak dapat memberitahukan secara pasti kapan waktunya pengecekan ke lapangan setelah berkas persyaratan dimasukkan. Hal ini akan mempengaruhi jangka waktu keluarnya izin yang diajukan. Selain itu masyarakat pengguna jasa mengeluhkan tidak adanya komunikasi dalam hal pemberian kabar saat izin telah keluar. Penanganan pengaduan ataupun pengelolaan terhadap saran maupun masukan dari masyarakat pengguna jasa belum menjadi prioritas dalam penyajian pelayanan publik di satuan kerja pemerintah daerah.

## REFERENSI

- Atep. (2004). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bovaird, T. &. (2003 (ed.). *Public Management and Governance*. . London: Routledge.
- De Vries, P. (1995). A Review of Some Critical Perspectives on Development Bureaucracy and Policy. *In Search of The Middle Ground: Essays on the Sociology of planned development*.
- Denhardt, J., & Denhardt, R. A. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Gasperz, V. (2006). *Total Quality Management (TQM) untuk Praktisi Bisnis dan Industri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Kaufmann, D. (2009). Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008. *Policy Research Working Paper 4978, The World Bank*.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Napittupulu, P. (2012). *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Bandung: PT. Alumni.
- Rasyid, R. (1998). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarif Watampone .
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinambela, L. P. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## Peraturan Dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Mystery Shopping Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Peraturan Pengganti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal).

# PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI ECOMMERCE DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN UMKM

Saimin  
Program Studi S3 Dokter Ilmu Manajemen  
Universitas Teknologi Yogyakarta  
email: grhsaimin@gmail.com

---

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Teknologi E-Commerce dan Standar Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Teknologi E-Commerce dan Standar Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Variabel penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Teknologi E-Commerce dan Standar Akuntansi Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul yang jumlahnya tidak dapat diketahui sehingga sampel minimal 100 responden. Teknik Pengambilan Sampel purposive sampling. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan taraf signifikansi 5%.*

*Hasil penelitian diperoleh Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Teknologi E-Commerce tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Secara simultan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Teknologi E-Commerce dan Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul..*

**Katakunci:** Pemahaman Peraturan Perpajakan; Teknologi; E-Commerce; Standar Akuntansi Keuangan; Kualitas Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN

UMKM merupakan penyelamat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998, dan krisis ekonomi global tahun 2008. Disaat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali (Rudiantoro dan Siregar, 2012). Jumlah UMKM di Indonesia merupakan yang paling besar dibanding negara- negara lain, pada tahun 2014 jumlah pelaku UMKM di Indonesia terdapat sekitar 57,9 juta (Sari, 2014). Besarnya jumlah

UMKM tersebut mencerminkan bahwa UMKM mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini.

Upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM yang paling terkenal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Peraturan ini mengatur pajak penghasilan dari usaha yang dilakukan wajib pajak yang memiliki omset kotor tertentu yang diberlakukan secara aktif tanggal 1 juli 2018. Peraturan Peperintah Nomor 23 tahun 2018 dapat berdampak pada perhitungan dan besarnya pajak UMKM yang memiliki omset

dibawah Rp 4,8

Miliar yaitu menjadi 0,5%. Peraturan tersebut memiliki tujuan untuk memduhakan UMKM dalam membayar pajak, sehingga akan memacu pertumbuhan UMKM yang lebih baik (Diatmika, 2013).

Fenemona sekarang masih minimnya kesadaran msyarakat dalam membayar pajak dan masih rendahnya wajib pajak dalam melaporkan pajak teurtangnya secara baik, maka upaya pemerintah mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan *sunset policy*, (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017). Kebijakan ini memberikan kesempatan pengamunan wajib pajak yang kurang bayar dan tidak bayar. Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajak karena memiliki ketakutan terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan pajak. Subyek pajak masih perlu penjelasan dan pemahaman atas peaturan perpajakan secara konsep, untuk dapat menyusun laporan perpajakn secara benar (Kartika, 2016). Tingkat pemahaman akan peraturan perpajakan dari wajib pajak memliki potensi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah diterbitkan PP No. 46 Tahun 2013 yang diperbaharui dengan PP No. 13 tahun 2018.

Selain pemahaman tentang peraturan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi berupa *E-Commerce* juga mampu berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Menurut (Baum, 2000) *E-Commerce* merupakan bagaian strategi bisnis yang mampu memasrkan produk secara luas dan tidak terbatas. Era globalisasi semua sektor usaha akan terdampak pada perkembangan teknologi infromasi tidak kecuali pemakain *E- Commerce* dalam UMKM. Menurut (Chodijah, 2018) berpendapat bahwa *E- Commerce* memiliki peran pengaruh yang

signifikan terhadap perkembangan usaha bisnis UMKM. UMKM yang dapat bersing dengan usaha lainnya secara konsisten cenderung menafaatkan teknologi infromasi *E-Commerce*. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem informasi akuntansi. Pemanfaat teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan akan berdampak pada ketepatan waktu penyajian dan tingkat ketelitian dalam memasukkan angka dalam laporan keuangan. Semakin cepat pengelolaan data yang akan disajikan perusahaan akan semakin cepat memberikan informasi tentang perusahaan. Maka dengan dukungan sistem informasi akuntansi di suatu perusahaan, maka akan berpengaruh pada ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan kuangan telah banyak dilakukan, seperti (Jelly dan Mawikere, 2017), penerapan peraturan pemerintah No 46 Tahun 2103 berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 4 Ayat (2). Peneliti (Wahyudi, 2017), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan (Sanjaya, 2017), penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Tetapi berbeda dengan peneliti (Silviana Agustami, 2016), bahwa penerapan SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti (Nadir, 2017) penerapan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap informasi laporan keuangan.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**



akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu juga PSAK syariah dan juga SAP.

Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan adalah teknik atau cara wajib pajak mengetahui dan kemampuan wajib pajak dalam memahami berlakunya Peraturan Perpajakan baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait Peraturan Perpajakan memberikan gambaran secara rasional bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak yang ditanggung sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kemampuan Wajib pajak adalah proses atau cara wajib pajak dalam menginterpretasikan Peraturan Perpajakan. Wajib pajak yang mampu mengiteresasikan dengan benar dapat mendorong Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya dengan baik yaitu mampu menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya.

**Pemanfaatan Teknologi E-Commerce** *E-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana *website* digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan *browser Web* untuk membeli dan menjual produk. McLeod Pearson (2008).

### **Standar Akuntansi Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadinya keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut (Sanjaya, 2017) mengatakan penyajian laporan keuangan yang dibuat manajer atau pimpinan perusahaan yang dipercayakan kepadanya oleh pemilik, pemerintah atau (kantor pajak), kreditor (bank dan lembaga keuangan lainnya) dan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut SAK (2014) Kesalahan dalam membaca laporan keuangan bisa menyebabkan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Pernyataan standar akuntansi keuangan (SAK) nomor 1 (2014) mengungkapkan : Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang posisi bagian sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentunya diperlukan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment* ini. Adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh yang berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang di buat.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Ruky Nuraini Elfa, 2018), pemahaman atas peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang mampu berdampak pada keandalan informasi laporan keuangan. Sedangkan peneliti lain (Kusuma, 2016) Pemahaman peraturan perpajakan tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tentang perpajakan mengatur besarnya pajak UMKM. UMKM yang mempunyai omset kotor lebih kecil 4,8 miliar akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari omset kotor tersebut (<http://ortax.org>). Semakin efisien dan efektif penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya akan membawa dampak pada kualitas laporan keuangan yang dibuat wajib pajak badan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan: **Hipotesis 1:** Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi E- Commerce Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut (Kurnia, 2010) UMKM yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi E-Commerce akan lebih mampu bertahan dan bersaing jika di bandingkan dengan UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi E-Commerce. Usaha yang mampu mengikuti teknologi seperti E-Commerce akan mampu bersaing dengan perusahaan lain sejenis.. Sistem pelaporan manajemen adalah sistem yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban. Teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) menyatakan ekspektasi terhadap kinerja (*performance expectancy*), yaitu sejauh mana suatu individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya untuk mencapai hasil-hasil dalam kinerja pekerjaannya.

Peneliti (Wahyudi, 2017), menyatakan bahwa teknologi *E- Commerce* berpengaruh terhadap kinerja usaha, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Hal ini didukung peneliti (Siregar Rudiantoro, 2012), Pengaruh Pemanfaat teknologi informasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penggunaan teknologi *e – commerce* akan mendorong kinerja perusahaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehandalan laporan keuangan yang dibuat. Penerapan teknologi *e – commerce* yang baik dan benar, akan membawa dampak pada kualitas laporan keuangan yang handal. Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak- pihak di dalam dan di luar organisasi (Yanto., Her, Bestari D. H., 2016) Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan:

**Hipotesis 2:** Pemanfaatan Teknologi *E- Commerce* Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### **Pengaruh Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan akan memiliki konsekuensi pada peningkatan profesional sumber daya manusia yang mengelola keuangan perusahaan. Pengetahuan tentang berbagai peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang sesuai dengan jenis usaha UMKM akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah standar yang digunakan. Hal tersebut didukung oleh tujuan dari standar akuntansi yaitu menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan (Belkaoui, dalam IAI, 2016). Dengan diterapkannya SAK, diharapkan kualitas laporan keuangan yang disusunnya akan meningkat. Untuk menilai kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif yang harus ada dalam laporan keuangan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan

untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Dalam teori entitas menyatakan mengimplementasikan SAK alam menyusun laporan keuangan, UMKM dapat memenuhi syarat untuk memperoleh kebutuhan modal (pengajuan kredit), dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi modal.

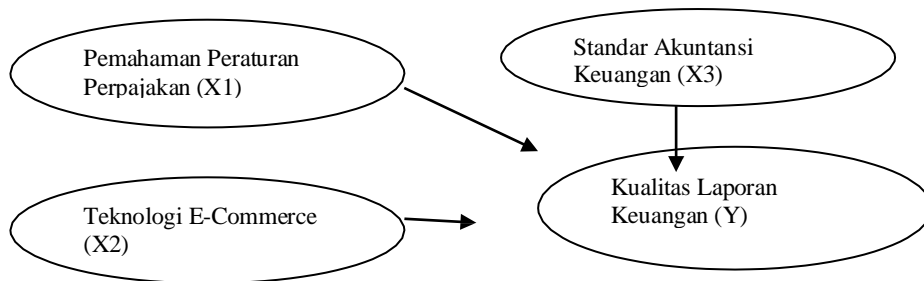
Peneliti (Sanjaya,2017), menyatakan usaha yang menerapkan

SAK dengan baik akan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik pula. Tapi berbeda dengan peneliti (Mahfud, Muhammad Arfan, 2017), menyatakan bahwa penerapan SAK belum mampu berdampak secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan:

**Hipotesis 3:** Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

### Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1 Kerangka Berpikir

## METODOLOGI PENELITIAN

### Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah korelasional. Korelasional yaitu sifat penelitian berfokus pada analisis hubungan antar variabel yang diuji melalui statistik korelasional. Artinya penelitian ini mencoba untuk mengetahui

sejauh mana tingkat hubungan dan kualitas hubungan.

### Definisi Operasional Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Pemahaman mengacu pada cara seorang individu untuk menilai dan mengerti arti

sesuatu. Dalam lingkup penelitian ini pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib oajak memahami isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman Peraturan Perpajakan ukur dengan indikator (Suntono dan Kartika, 2015) : Pengetahuan Wajib Pajak terkait aturan umum Peraturan Perpajakan dan kemampuan Wajib Pajak secara teknis terkait Peraturan Perpajakan baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

### **Pemanfaatan Teknologi E-Commerce (X2)**

Pemanfaatan Teknologi E-Commerce adalah penggunaan alat yang dapat membantu manusia untuk mengolah, memproses suatu data dan menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat, Pemanfaatan Teknologi E-Commerce diukur dengan indikator (Jony Wong, 2010): seleksi dan nilai, Kinerja dan layanan, Periklanan secara intensif, Hubungan komunitas, Keamanan dan kehandalan

### **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (X3)**

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadinya keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan diukur dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Adapun indikator dari Standar Akuntansi Keuangan EMKM adalah (IAI, 2016) : Siklus Laporan Keuangan SAK, Pencatatan Persediaan, Kelengkapan laporan keuangan, Frekuensi Laporan Keuangan, Kepatuhan terhadap SAK,

### **Kualitas laporan keuangan,**

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas Laporan

Keuangan diukur dengan indikator (Ghozali dan Chariri, 2014): Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama (Sugiyono, 2016). Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kabupaten Bantul. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data (Sugiyono, 2016). pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara (*purposive sampling*) dimana penentuan anggota sampel diambil dengan cara menetapkan kriteria yaitu:

- a. UMKM baik orang pribadi maupun badan usaha yang telah terdaftar dan memiliki NPWP.
- b. UMKM yang memiliki peredaran bruto  $\leq$  Rp 4,8 miliar setiap tahunnya.
- c. Wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Bantul.
- d. Wajib pajak UMKM yang menggunakan E-Commerce

### **Sumber dan Metode Pengumpulan**

#### **Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan *field research* atau survei dengan teknik kuesioner (*questionnaires*). Menurut (Sugiyono, 2016) teknik pengumpulan data dengan kuesioner dimana peneliti menyusun instrumen berdasarkan indikator penelitian.

#### **Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan SPSS

23.0. Langkah yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan statistic deskriptif, uji asumsi klasik (uji

multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas), analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

**Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan	100	30,00	50,00	40,4700	4,26983
Pemahaman Peraturan Perpajakan	100	10,00	20,00	15,2700	2,56572
Teknologi E-Commerce	100	12,00	25,00	19,3800	2,92595
Standar Akuntansi Keuangan	100	30,00	50,00	39,8700	4,71545
Valid N (listwise)	100				

Nilai mean variabel kualitas laporan keuangan sebesar 40,47 dengan standar deviasi sebesar 4,426983. Nilai mean variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 15,27 dengan standar deviasi sebesar 2,56572. Nilai mean variabel Teknologi *E-Commerce* sebesar 19,38 dengan standar deviasi sebesar 2,92595. Nilai mean variabel Standar Akuntansi Keuangan sebesar 39,87 dengan standar deviasi sebesar 4,71545, masing-masing variabel memiliki nilai mean lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar deviasi masing-masing variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki kategori relatif tinggi

### 2. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,30595983
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,050
	Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z		,556
Asymp. Sig. (2-tailed)		,917

a. Test distribution is Normal.

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<sup>1</sup> (Constant) Pemahaman Peraturan Perpajakan	,780	1,282
Teknologi E-Commerce	,663	1,509
Standar Akuntansi Keuangan	,613	1,632

b. Calculated from data.

Hasil olah data diatas menunjukkan bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov Z* sebesar 0,556 dan nilai *Asymp. Sig. (2- tailed)* sebesar 0,917 yang diperoleh model regresi lebih dari  $\alpha$  (0,05) yaitu  $0,917 > 0,05$  yang berarti bahwa data berdistribusi normal

**a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan**

ation

**b. Uji Multikolinearitas**

Dari seluruh variabel penelitian menunjukan nilai *Variance In*

*Factor* (VIF) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

**c. Uji Heterokedastisitas**

**Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,517	1,769		1,423	,158
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-,017	,085	-,023	-,203	,839
Teknologi E-Commerce	-,089	,079	-,142	-1,119	,266
Standar Akuntansi Keuangan	,055	,052	,138	1,051	,296

**a. Dependent Variable: Abs\_Residual**

Dari tabel 4 diperoleh bahwa seluruh variabel bebas mempunyai nilai probabilitas yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat

disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terjadi Heterokedastisitas.

**1. Analisis Regresi Berganda**

**Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,611	3,052		5,442	,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,493	,149	,296	3,309	,001
Teknologi E-Commerce	,183	,142	,125	1,290	,200
Standar Akuntansi Keuangan	,321	,091	,354	3,510	,001

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

**a. Persamaan**

$$Y = 16,611 + 0,493X_1 + 0,183X_2 + 0,321X_3$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$b_0 = 16,611$  artinya jika nilai Pemahaman Peraturan Perpajakan, Teknologi *E-Commerce* dan Standar Akuntansi Keuangan sama dengan nol (0), maka Kualitas Laporan Keuangan UMKM nilainya sebesar 16,611.

$b_1 = 0,493$  artinya jika Pemahaman Peraturan Perpajakan mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan naik sebesar 0,493 satuan dengan asumsi variabel lain konstan

$b_2 = 0,183$  artinya jika Teknologi *E-Commerce* mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 0,183 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

$b_3 = 0,321$  artinya jika Penerapan Standar Akuntansi Keuangan mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 0,321 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

**b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimensi n 0 a	,633	,401	,382	3,35722

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Keuangan, Pemahaman PeraturanPerpajakan, Teknologi E -

Commerce Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

sebesar 38,2% sedangkan sisanya sebesar 61,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian yang pengaruhnya cukup besar.

**a. Uji Hipotesis**

**Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

**Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	d f	Mean Square	F	Sig .
1	Regression	722,902	3	240,967	21,380	,000 <sup>a</sup>
	Residual	1082,008	96	11,271		
	Total	1804,910	99			

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Keuangan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Teknologi E-Commerce

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Teknologi *E- Commerce* dan Standar Akuntansi Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan



## Uji Secara Parsial (Uji-t)

**Tabel 8. Hasil Uji Secara Parsial (Uji-t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,611	3,052		5,442	,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,493	,149	,296	3,309	,001
Teknologi E-Commerce	,183	,142	,125	1,290	,200
Standar Akuntansi Keuangan	,321	,091	,354	3,510	,001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai beta 0,493 dan bertanda positif. Nilai signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **Pengaruh Teknologi E- Commerce terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Teknologi *E-Commerce* memiliki nilai beta 0,183. Nilai signifikansinya sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, artinya variabel Teknologi *E-Commerce* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan memiliki nilai beta sebesar 0,321. Nilai signifikansinya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Standar Akuntansi

keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak Badan di Kabupaten Bantul telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan

Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan apabila Pemahaman Peraturan Perpajakan semakin tinggi, maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Hasil ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ruky Nuraini Elfa, 2018), pemahaman atas peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Teori entitas yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini sesuai pendapat (Bodnar, George H. dan Hopwood, 2011), untuk mendapatkan tingkat kualitas laporan keuangan yang handal, maka diperlukan pemahaman atas peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik sangat penting bagi otoritas pajak untuk memperbaiki sistem pajak dan dapat meningkatkan kehandalan laporan yang berlaku, telah mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT, memiliki NPWP, mengetahui fungsi pajak sebagai

penerimaan negara dan paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Teknologi *E-Commerce* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Hal ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2017), menyatakan bahwa teknologi *E-Commerce* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa UMKM di kabupaten Bantul sebagian besar belum memanfaatkan Teknologi *E-Commerce*.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Hal ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sanjaya, 2017), menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai pendapat Belkaoui, (IAI, 2016). Dengan diterapkannya SAK, diharapkan kualitas laporan keuangan yang disusunnya akan meningkat. Untuk menilai kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif yang harus ada dalam laporan keuangan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. . Dalam teori entitas menyatakan mengimplementasikan SAK dalam menyusun laporan keuangan, UMKM dapat memenuhi syarat untuk memperoleh kebutuhan modal (pengajuan kredit), dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi modal. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bantul sudah

dapat menganalisis bukti transaksi penerimaan kas secara lengkap, mampu mencatat jurnal setiap saat, catatan persediaan dengan lengkap, laporan posisi keuangan/neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal/ekuitas, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan (CALK), Mempunyai periode laporan keuangan (seperti setiap bulan atau tahun), dan mengakui semua aset/modal dan kewajiban/hutang sesuai SAK EMKM. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2012) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM.

## **PENUTUP**

Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Teknologi *E-Commerce* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul. Secara simultan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Teknologi *E-Commerce* dan Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Bantul.

## **SARAN-SARAN**

Bagi UMKM supaya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan melakukan peningkatan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Pihak UMKM dapat melakukan pelatihan pada karyawan bagian keuangan tentang pemahaman peraturan perpajakan. Pihak UMKM supaya lebih memanfaatkan Teknologi *E-Commerce* dalam pemasaran produknya. Perlunya penerapan Standar

Akuntansi Keuangan di UMKM, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat bermanfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya

menambah variabel bebas yang lain yang sekiranya mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

## REFERENSI

- Anwar, P. C. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramdeia Pustaka Utama.
- Baum, D. (2000). *E-Commerce*. New Jersey: oracle corp.
- Chodijah, S. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta ), 8(1), 34–48.
- Diatmika, G. I. P. (2013). Penerapan Akutansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, *Vol.3, No.*
- Djoko, M. (2011). *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Efrianingsih, M. E. (2017). Pengaruh Pengembangan Karir Dan Komitmen Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Universitas Lampung Bandar Lampung*.
- Irwadi, M. (2016). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Penerimaan Pajak ( Studi Kasus Pada KPP Pratama Kayu Ag. *Jurnal Akuntanika, No. 2, Vo.*
- Kurnia, R. S. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud, Muhammad Arfan, dan S. A. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( Studi Empiris Pada KoperasI DI, 1–9.
- Nadir, R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Sumber Daya Manusia , terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua ( Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru ), 14(1), 57–68.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Ka. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 7(1), 207–222.*
- Silviana Agustami, I. A. S. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 1, No, 245–251.*
- Siregar Rudiantoro, R. dan S. V. (2012). Kualitas Laporan Keuangana UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Volume 12 .*
- Wahyudi, A. D. (2017). Pengaruh Teknologi Informasi dan E - Commerce terhadap Kinerja Usaha (Studi KasusPerusahaan Fabrikasi Mie, Baso dan Sosis YEN Kota Bandung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*
- Yanto., Her, Bestari D. H., B. S. dan J. M. M. (2016). The Behavior of Indonesian SMEs in Accepting Financial Accounting Standards Without Public Accountability. *International Journal of Business and Management Science, Volume 6 N.*

# DAMPAK Kecerdasan Emosi Terhadap Kualitas Pengambilan Keputusan Pemimpin dan Efektivitas Sekolah di Indonesia

Budiono<sup>1</sup>, Nur Wening<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Teknologi Yogyakarta

Jl. Siliwangi (Ringroad Utara), Jombor, Sleman, D.I. Yogyakarta 55285 E-mail :

[buditulada@gmail.com](mailto:buditulada@gmail.com)<sup>1</sup>, [wening104@yahoo.co.id](mailto:wening104@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menguji aspek-aspek kecerdasan emosi yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan pemimpin pendidikan yang selanjutnya berpengaruh terhadap efektivitas sekolah di Indonesia. Data diambil dengan kuesioner yang diikuti oleh pendidik (guru dan kepala sekolah) sejumlah 104 pendidik terdiri dari 83 orang guru dan 21 kepala sekolah. Pengolahan data dikerjakan dengan *SmartPLS*, dan hasilnya menunjukkan bahwa aspek kesadaran diri (kesadaran emosional, introspeksi diri, percaya diri), regulasi diri (kontrol diri, kepercayaan, hati nurani, kemampuan beradaptasi dan inovatif), berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan sebesar 0.538. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar sekolah sangat memperhatikan dan menomorsatukan kesadaran diri dan regulasi diri sebagai aspek kecerdasan emosi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efeknya pada efektivitas sekolah.

**Kata kunci : kecerdasan emosi, pengambilan keputusan, efektivitas sekolah**

## ABSTRACT

This article aims to examine the aspects of emotional intelligence that most dominantly affect the quality of educational leaders' decision-making which in turn have an effect on the effectiveness of schools in Indonesia. The data were collected by using a questionnaire followed by 104 educators (teachers and principals) consisting of 83 teachers and 21 school principals. Data processing using *SmartPLS* shows that the aspects of self-awareness (emotional awareness, self-introspection, self-confidence), self-regulation (self-control, trust, conscience, adaptability and innovation) have an effect on the quality of decision making by 0.538. The results of this study recommend that schools pay close attention to and prioritize self-awareness and self-regulation as aspects of emotional intelligence to improve the quality of decision making and its effect on school effectiveness.

**Keyword : *emotional intelligence, decision making, school effectiveness***

## 1. PENDAHULUAN

Melesatnya pembangunan suatu negara tidak tergantung pada canggihnya teknologi dan peralatan

modern yang digunakan. Justru kualitas pendidikan yang menjadi rujukan sejauh mana kemajuan suatu bangsa diukur (Behin et al., 2018; Chukwueke, 2018; Giri & Shrestha,

2017; Grohmann et al., 2018; Scheerens & Marks, 2017). Bobroknya kualitas pendidikan disebabkan oleh rendahnya efektivitas sekolah sebagai organisasi (Ali et al., 2016; Bhuyan, 2018; Sangsurin et al., 2020).

Sekolah sebagai organisasi harus memperhatikan dan memiliki kekuatan yang efektif untuk mewujudkan sekolah yang handal (Bellei et al., 2019a). Hal-hal yang meningkatkan efektivitas semestinya menjadi prioritas pihak-pihak berwenang dalam sekolah.

Efektivitas suatu lembaga sangat dipengaruhi sejauhmana kualitas pengambilan keputusan pimpinan di sekolah tersebut (Negulescu & Doval, 2014). Proses pengambilan keputusan yang berkualitas sangat berkaitan hal-hal yang tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat kognitif dan mental dari pemimpin.

Fenomena inilah yang menjadi keprihatinan dan sesegera mungkin, secara bertahab dan berkelanjutan perlu dilakukan peningkatan kapasitas kecerdasan emosi dan trik-trik yang jitu untuk melahirkan keputusan-keputusan yang berkualitas dari para pemimpin di sekolah. Semua keputusan memiliki komponen kognitif dan emosi. Kemampuan penerapan emosi pembuat keputusan tergantung pada pengalaman sebelumnya, modal diri atau kapasitas emosi dan kebaikan-kebaikan emosi yang telah dilakukan oleh individu dalam melaksanakan hasil keputusan (Sumathy & Madhavi, 2015).

Dengan demikian penelitian ini menggambarkan aspek mana saja dari kecerdasan emosi yang paling dominan yang dengannya efektivitas sekolah, manapun termasuk sekolah perlu melakukan prioritas dan aspek-aspek kualitas pengambilan keputusan yang mempengaruhi terwujudnya efektivitas sekolah.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey terbuka kepada para tenaga pendidik (tendik) di Indonesia, baik guru maupun kepala sekolah. Pengambilan data dilakukan secara online dengan menggunakan *google form* via email ataupun medsos. Responden terdiri dari 38 laki-laki dan 66 perempuan, dengan rincian 84 orang pendidik SD/MI, 10 orang pendidik SMP/MTS dan 10 orang pendidik SMA/SMK.

Pemilihan segmen ini tentu karena jumlah dominan dunia kependidikan di Indonesia adalah level dasar dan menengah. Pengambilan data ini menghindari dari bias jender untuk mendapat gambaran riil di lapangan, sehingga data lebih valid dan otentik.

Sekalipun data survey dan analisis diarahkan pada dunia pendidikan secara khusus, sesungguhnya secara teori aspek teori yang diujikan juga memiliki dampak atau pengaruh terhadap dunia industri dan perusahaan baik skala kecil maupun besar.

Data diolah menggunakan *SmartPLS* menguji signifikansi pengaruh dimensi-dimensi kecerdasan emosi yang paling besar terhadap kualitas pengambilan keputusan. Dari kualitas yang dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, sejauhmana dimensi pengambilan keputusan mempengaruhi efektivitas sekolah. Persyaratan untuk analisis interpretasi hasil (inner model) dijabarkan dalam tabel di bawah ini. Semua item atau indikator telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas serta tidak terdapat adanya multikolinearitas antar indikator.

Tabel 1 hasil outer loading

	ES	KE	KPK
X.1		0.786	
X.10		0.814	
X.2		0.759	
X.3		0.717	
Y1.2			0.899
Y1.3			0.909
Y2.2	0.833		
Y2.3	0.947		
Y2.4	0.852		
Y2.5	0.868		

Tabel 2 analisis terhadap construct reliability

	's Cronbach Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
ES	0.905	1.156	0.930	0.768
KE	0.770	0.773	0.853	0.593
KPK	0.777	0.778	0.900	0.818

Tabel 3 analisis fornell larcker criterion

	ES	KE	KPK
ES	0.876		
KE	0.112	0.770	
KPK	0.086	0.538	0.904

Sebagai persyaratan dalam analisis, maka yang dipergunakan telah memenuhi semuanya. Convergent validity; validitas indikator sebagai pengukur variabel sudah memiliki reliabilitas yang baik yaitu masing-masing indikator > 0.70 (tabel 1). Construct Reliability adalah mengukur reliabilitas konstruk variabel laten (tabel 2). Nilainya yang dianggap reliabel sudah diatas 0,70. Average Variance Extracted- AVE (tabel 3) digunakan untuk mengetahui tercapainya syarat validitas diskriminan sudah sebesar 0,50. Sebelum dianalisis, semua item atau indicator telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas serta tidak

terdapat adanya multikolinearitas antar indicator.

### 3. LANDASAN TEORI

#### 3.1 Kecerdasan Emosi

Kecerdasan emosi merupakan kapasitas untuk mengenali diri kita sendiri dan orang lain, untuk memotivasi diri dan untuk mengelola emosi dengan baik dalam diri kita sendiri dan dalam hubungan kita (Goleman: 1998). Internalisasi kecerdasan emosi memungkinkan staf organisasi atau perusahaan apapun untuk mengatur emosi mereka sendiri ketika berhadapan dengan pelanggan atau pengguna jasa, termasuk di sekolah (Chrusciel, 2006).

Kepala sekolah perlu memiliki beberapa kapasitas baku untuk mewujudkan kepemimpinan yang kuat sehingga mampu mewujudkan sekolah yang efektif. Kepemimpinan kepala sekolah terintegrasi dalam sikap dan tidakannya dalam mengambil keputusan. Adakah dia memiliki kecerdasan emosi sehingga ia bisa membawakan perangai diri dan komunikasi yang efektif untuk mewujudkan sasaran utamanya yaitu efektivitas sekolah.

Lima aspek kecerdasan emosi menjadi tolok ukur yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan efektivitas sekolah. Yaitu, kesadaran diri (kesadaran emosional, introspeksi diri, percaya diri), regulasi diri (kontrol diri, kepercayaan, hati nurani, kemampuan beradaptasi dan inovatif), motivasi diri (dorongan berprestasi, komitmen, inisiatif dan optimisme), empati (berorientasi layanan, mengembangkan orang lain, memaksimalkan keragaman, dan kesadaran mempengaruhi orang) dan komunikasi (kepemimpinan, ubah katalisator, manajemen konflik,

membangun kebersamaan, kolaborasi dan kerjasama, serta kemampuan tim (Nafukho & Muya, 2014)

### 3.2 Pengambilan Keputusan

Peningkatan kemampuan pengambilan keputusan yang berkualitas dapat dilakukan dalam berbagai cara, di tingkat individu atau dalam kelompok, dan dapat mencakup pengalaman dalam kursus atau program organisasi atau secara akademis (Holian, 2006).

Pemimpin menghadapi situasi (peluang atau ancaman) yang harus membuat keputusan dalam melakukan semua kegiatan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan sangat penting dalam semua kegiatan manajerial dan proses organisasi (Moghadam et al., 2011).

Kekuatan kualitas pengambilan keputusan adalah juga dipengaruhi dari informasi yang masuk dalam organisasi dan pemimpin organisasi (George & Desmidt, 2018). Informasi yang masuk merupakan pengetahuan yang harus diatur sedemikian rupa. Hal ini memiliki pengaruh dominan juga, tetapi bagaimanapun pemimpin yang berorientasi pada efektivitas tidak akan gegabah untuk menggunakan kewenangannya melebihi kapasitas pribadinya.

Kualitas proses pengambilan keputusan dapat dicapai dengan memperhitungkan beberapa pendorong yang kuat, antara lain faktor lingkungan, strategi organisasi, etika, pemberdayaan, informasi dan umpan balik, program, opsi, penghindaran risiko, sumber daya dan peluang (Negulescu & Doval, 2014). Pemimpin dalam melakukan proses pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan bagaimana, apa dan kapan. Satu hal yang perlu dicari jawabannya adalah mengapa mereka memutuskannya. Penelitian ini membahas kaitannya dengan dimensi

kecerdasan emosi yang mana yang paling berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan seorang pemimpin sehingga mempengaruhi efektivitas sekolah.

### 3.3 Efektivitas Sekolah

Peran administrator sekolah dalam pengorganisasian pekerjaan pedagogis, dan budaya sekolah memerankan keberlanjutan efektivitas pendidikan dalam jangka panjang (Bellei et al., 2019b).

Efektivitas pemimpin kependidikan ditandai dengan lima perilaku: *pertama*; menciptakan kondisi membentuk dan mengokohkan kolaborasi. *Kedua*; secara aktif mengkondisikan berpikir tentang pengambilan keputusan, perencanaan kurikulum, dan masalah terkait. *Ketiga*; secara sadar membangun konsensus nilai-nilai bersama. *Keempat*; sengaja berbagi tanggung jawab pendidikan dengan para pemangku kepentingan. *Kelima*; meyakini sebagai fasilitator dan bertindak berdasarkan keyakinan bahwa semua pemangku kepentingan menjanjikan pendidikan berkualitas bagi siswa (English, 2006). Efektivitas sekolah sangat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan kepala sekolah sebagai sosok yang mengejawantahkan efektivitas sekolah. Dengan penjelasan teori tersebut, maka hipotesis yang diujikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**H1:** Kecerdasan Emosi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Pengambilan Keputusan.

**H2:** Kualitas Pengambilan Keputusan secara struktural Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Efektivitas Sekolah.

**H3:** Kecerdasan Emosi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Efektivitas Sekolah.



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dengan *SmartPLS* hubungan antara kecerdasan emosi (KE), kualitas pengambilan keputusan (KPK) dan efektivitas sekolah (ES) adalah sebagai berikut.

Tabel 4. hasil analisis pengaruh KE terhadap KPK dan ES

	Original Sample (O)	Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics ( O/STDEV )	P-Values
KE-ES	0.112	0.114	0.146	0.771	0.441
KE-KPK	0.558	0.553	0.082	6.554	0.000
KPK-ES	0.355	0.356	0.143	2.490	0.014

Besarnya koefisien parameter untuk variabel kecerdasan emosi terhadap kualitas pengambilan keputusan sebesar 0,538 yang berarti terdapat pengaruh positif kecerdasan emosi terhadap kualitas pengambilan keputusan. Atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik nilai kecerdasan emosi maka kualitas pengambilan keputusan akan semakin baik pula. Peningkatan satu satuan kecerdasan emosi akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sebesar 53,8%. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *bootstrap* atau resampling, dimana hasil uji koefisien estimasi kecerdasan emosi terhadap kualitas pengambilan keputusan hasil *bootstrap* adalah sebesar 0,553 dengan nilai t hitung 6,554 maka nilai p value adalah 0,000 < 0,05 sehingga terima H1 atau yang berarti pengaruh langsung kecerdasan emosi terhadap kualitas pengambilan keputusan bermakna atau signifikan secara statistik.

Disinilah pentingnya bagi setiap pimpinan untuk memperhatikan kecerdasan emosi sebagai faktor mendasar dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan

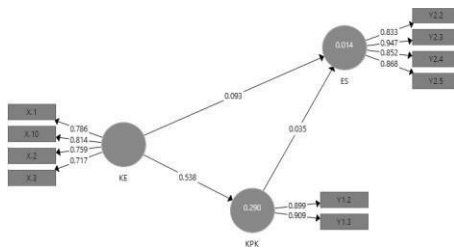
adalah sesuatu yang berimbang dalam seluruh kebijakan dan kekuatan lembaga atau organisasi.

Besarnya koefisien parameter untuk variabel kecerdasan emosi terhadap efektivitas sekolah sebesar 0,093 yang berarti terdapat pengaruh positif kecerdasan emosi terhadap efektivitas sekolah. Atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik nilai kecerdasan emosi maka efektivitas sekolah akan semakin meningkat pula. Peningkatan satu satuan kecerdasan emosi akan meningkatkan efektivitas sekolah sebesar 9,3%. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *bootstrap* atau resampling, dimana hasil uji koefisien estimasi kecerdasan emosi terhadap efektivitas sekolah hasil *bootstrap* adalah 0,056 dengan nilai t hitung 0,249 maka nilai p value adalah 0,516 > 0,05 sehingga terima H0 atau yang berarti pengaruh langsung kecerdasan emosi terhadap efektivitas sekolah tidak bermakna atau tidak signifikan secara statistik. Namun demikian pengembangan penerapan dalam merealisasikan visi misi lembaga terutama sekolah sangat mendesak dan mendasar. Strategi dan pendekatan yang tepat akan meningkatkan signifikansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Hasil analisis pengaruh KPK terhadap ES secara tidak langsung

	O	(M)	(STDEV)	( O/STDEV )	P
KE -> KPK -> ES	0.019	0.029	0.080	0.239	0.811

Sesuai tabel 5, kualitas pengambilan keputusan pengaruhnya terhadap efektivitas sekolah sangat kecil, p value 0,804 > 0,05 sehingga tidak signifikan atau terima H0. Sekalipun demikian, masih ada faktor lain yang bisa mempengaruhi terhadap efektivitas sekolah.



Gambar 1. bagan analisis *inner model* hubungan antara KE, KPK dan ES

Hanya empat dimensi KE saja yang sangat mendasar untuk selalu jadi perhatian khusus para pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan agar berjalan lancar dan melesat menuju organisasi atau lembaga yang efektif. Dalam hal ini kepala sekolah, sangat berhajat untuk merealisasikan dimensi kecerdasan emosi yaitu kesadaran diri, regulasi diri, motivasi diri, empati.

Dalam hal memunculkan kualitas pengambilan keputusan (KPK), pemimpin ataupun kepala sekolah harus fokus pada implementasi dan pemantauan pemecahan masalah. Fokus ini akan memudah staf konsentrasi dan tidak terpecah pada berbagai hal yang tidak selaras dengan sasaran lembaga. Adapun pemecahan masalah merupakan sesuatu yang sangat didamba untuk segera ada bagi siapa saja, terlebih lembaga semacam sekolah. Dalam mengambil keputusan, pemimpin harus mengacu pada tujuan strategis, agar segala kesungguhan dan pengorbanan yang dilakukan tidak akan sia-sia.

Kepala sekolah secara aktif perlu mengkondisikan berpikir bagi guru dan staffnya tentang pengambilan keputusan, perencanaan kurikulum, dan masalah terkait lainnya. Apa yang dipikirkan staff akan membantu kepala sekolah menggolkan keputusan yang diinginkan bersama. Oleh karena itu kepala sekolah secara sadar perlu membangun konsensus nilai-nilai bersama untuk warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Kepala sekolah dengan sengaja harus siap bertanggung jawab terhadap para pemangku

kepentingan untuk mencapai tujuan sekolah. Tanpa adanya tanggungjawab yang kuat akan menjauhkan sekolah dari efektivitas. Dengan demikian kepala sekolah akan mampu meyakinkan diri sebagai fasilitator dan bertindak berdasarkan keyakinan bahwa semua pemangku kepentingan menjanjikan kemajuan pendidikan yang berkualitas untuk masa depan.

## 5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan. Adapun kecerdasan emosi memiliki pengaruh lemah terhadap efektifitas sekolah sekalipun tidak signifikan. Yang lebih penting bagi pemimpin agar menyadari keadaan emosi yang dirasakan dan penyebabnya, menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri (kesadaran diri), terbuka untuk umpan balik yang jujur, perspektif baru, pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan diri (regulasi diri). Dalam mengambil keputusan kepala sekolah harus fokus pada implementasi dan pemantauan pemecahan masalah dan mengacu pada tujuan strategis. Selain itu, ada aspek lain yang bisa dikembangkan untuk merealisasikan efektivitas sekolah selain faktor kecerdasan emosi dan kualitas pengambilan keputusan. Untuk penelitian selanjutnya perlu dikembangkan solusi bagaimana pengambilan keputusan memiliki kekuatan dampak terhadap lembaga atau organisasi secara lebih signifikan. Sekolah sangat berhajat dalam hal ini. Disarankan penelitian selanjutnya untuk menggali lebih jauh hubungan kualitas pengambilan keputusan terhadap efektivitas sekolah. Dimungkinkan ada variabel-variabel moderator yang memperkuat hubungan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N., Sharma, S., & Zaman, A. (2016). School Culture and School Effectiveness: Secondary Schools in Pakistan. *Malaysian Online Journal of Educational Management*, 4(4), 50–65. <https://doi.org/10.22452/mojem.vol4no4.4>
- Behin, B., Esmaceli, F., & Asadollahi, R. (2018). An English Teacher ' s Professional Identity Development: The Effect of Educational Policies. *Journal of Modern Research in English Language Studies* 5(2),19- 40,5(2). <https://doi.org/10.30479/jmrels.2019.10271.1278>
- Bellei, C., Morawietz, L., Valenzuela, J. P., & Vanni, X. (2019a). Effective schools 10 years on: factors and processes enabling the sustainability of school effectiveness. *School Effectiveness and School Improvement*. <https://doi.org/10.1080/09243453.2019.1652191>
- Bellei, C., Morawietz, L., Valenzuela, J. P., & Vanni, X. (2019b). Effective schools 10 years on: factors and processes enabling the sustainability of school effectiveness. In *School Effectiveness and School Improvement* (Vol. 0, Issue 0). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/09243453.2019.1652191>
- Bhuyan, B. (2018). A study on the organizational effectiveness and academic achievement of secondary schools in Assam. *International Journal of Advance Research Development*, 3(8), 147–149.
- Chrusciel, D. (2006). Considerations of emotional intelligence (EI) in dealing with change decision management. *Management Decision*, 44(5), 644–657. <https://doi.org/10.1108/00251740610668897>
- Chukwueke, C. (2018). *EFFECT OF LIBRARY SERVICES ON THE EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN ABIA STATE: A STUDY OF IGBERE SECONDARY SCHOOL IGBERE*. *Emerging technologies in the delivery of library and information services in Nigeria* View project. [https://digitalcommons.unl.edu/libp\\_hilprac](https://digitalcommons.unl.edu/libp_hilprac)
- English, F. W. (2006). *Encyclopedia of Leadership and Educational Administration*. SAGE Publications Ltd.
- George, B., & Desmidt, S. (2018). Strategic-Decision Quality in Public Organizations: An Information Processing Perspective. *Administration and Society*, 50(1), 131–156. <https://doi.org/10.1177/0095399716647153>
- Giri, A., & Shrestha, V. (2017). The Effect of School Construction on Educational Outcomes among Females: Evidence from Nepal. In *The Development Journal of the South* (Vol. 2, Issue 1).
- Grohmann, A., Klühs, T., & Menkhoff, L. (2018). Does financial literacy improve financial inclusion? Cross country evidence. *World Development*, 111, 84–96. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.020>
- Holian, R. (2006). Management decision making, ethical issues and “emotional” intelligence. *Management Decision*, 44(8), 1122– 1138. <https://doi.org/10.1108/00251740610690658>

- Moghadam, A. H., Tehrani, M., & Amin, F. (2011). Study of the relationship between Emotional Intelligence (EI) and management decision making styles. *World Applied Sciences Journal*, 12(7), 1017–1025.
- Nafukho, F. M., & Muyia, M. A. H. (2014). Emotional Intelligence and Its Critical Role in Developing Human Resources. In *Handbook of Human Resource Development* (pp. 623–639). <https://doi.org/10.1002/9781118839881.ch36>
- Negulescu, O., & Doval, E. (2014). The Quality of Decision Making Process Related to Organizations' Effectiveness. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 858–863. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00548-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00548-6)
- Sangsurin, K., Chusorn, P., & Agsonsua, P. (2020). A model of causal relationships affecting the effectiveness of primary schools under khon kaen primary education service area. *International Journal of Higher Education*, 9(1), 230–236. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n1p230>
- Scheerens, J., & Marks, G. N. (2017). Malleability in educational effectiveness: what are realistic expectations about effect sizes? Introduction to the special issue. In *Educational Research and Evaluation* (Vol. 23, Issues 5–6, pp. 143–147). Routledge. <https://doi.org/10.1080/13803611.2017.1455280>
- Sumathy, L., & Madhavi, C. (2015). Influence of Emotional Intelligence on Decision Making by Leaders. *American International Journal of Social Science*, 4(1), 134–140. {Bibliography}

## BIO-DATA PENULIS

1. Nur Wening, merupakan dosen tetap Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) sejak 2017 dengan homebase di Program Doktor Ilmu Manajemen. Beliau konsentrasi di Manajemen Human Capital Strategik, yang merupakan lulusan sarjana FE-UII (manajemen), kemudian melanjutkan ke program pascasarjana UGM (MSi) dan melanjutkan program Doktor Manajemen di UNS.
2. Sujoko, adalah dosen senior di Universitas Teknologi Yogyakarta pada program Doktor Ilmu Manajemen. Konsentrasi beliau adalah manajemen keuangan, merupakan lulusan dari UGM di program sarjana dan magister, kemudian melanjutkan studi Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Brawijaya.
3. Endah Marendah Ratnaningtyas, merupakan mahasiswa di Program Doktor Ilmu Manajemen UTY dengan konsentrasi Manajemen Strategi. Saat ini masih menyelesaikan disertasi sebagai rangkaian tugas akhir di program doctor sekaligus menjadi dosen di STIE Bank Yogyakarta.
4. Lustono adalah mahasiswa program doctor ilmu manajemen di UTY dengan konsentrasi Manajemen Strategi yang saat ini dalam proses penyelesaian studi dengan menulis disertasi. Merupakan dosen tetap di STIE Taman Siswa Banjarnegara.
5. Sotya Partiwidi Ediwijoyo tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen UTY yang sedang menyelesaikan studinya. Memilih konsentrasi Manajemen Keuangan dalam bidang konsentrasi disertasinya, merupakan dosen di Politeknik Dharma Patria Kebumen.
6. Saimin merupakan mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen UTY dan sedang menulis disertasi dalam konsentrasi Manajemen Strategi
7. Budiono tercatat sebagai mahasiswa di program doctor ilmu manajemen UTY dan merupakan guru serta kepala sekolah di SD negeri Wonosari. Mengambil konsentrasi Manajemen SDM dalam penulisan disertasinya.

## Penerbit & Pencetak

Universitas Teknologi Yogyakarta  
Jalan Siliwangi, Ringroad Utara, Jombor, Mlati, Sleman,DIY  
Email: [publikasi@uty.ac.id](mailto:publikasi@uty.ac.id)  
Website: [www.uty.ac.id](http://www.uty.ac.id)

ISBN 978-623-7746-12-6



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mereproduksi isi buku ini baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk, cara dan atau alasan apapun juga tanpa izin tertulis dari pengarang



©2019

Diterbitkan Oleh:

Universitas Teknologi Yogyakarta Jl. Siliwangi,  
Jombor, Sleman, Yogyakarta

Email: [publikasi@uty.ac.id](mailto:publikasi@uty.ac.id)

Website: [www.uty.ac.id](http://www.uty.ac.id)

## **Penerbit & Pencetak**

Universitas Teknologi Yogyakarta  
Jalan Siliwangi, Ringroad Utara, Jombor, Mlati, Sleman,DIY  
Email : [pasca@uty.ac.id](mailto:pasca@uty.ac.id)  
Website : [www.uty.ac.id](http://www.uty.ac.id)

ISBN 978-623-7746-12-6



**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mereproduksi isi buku ini baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk, cara dan atau alasan apapun juga tanpa izin tertulis dari pengarang**

